SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI
SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
(THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations),* perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penyelenggaraan Rapat dan Mekanisme Koordinasi Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations*);

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangasa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93);
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA *(THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS).*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) yang selanjutnya disingkat ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik

Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam yang memiliki tujuan dan prinsip bersama sebagaimana tertuang di dalam Piagam ASEAN.

2. Sekretariat Nasional ASEAN yang selanjutnya disebut Setnas ASEAN adalah sekretariat yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sebagai implementasi dari pengesahan Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan ASEAN.
3. Kepala Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Kepala adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4. Pelaksana Harian Setnas ASEAN-Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah jabatan *ex-officio* yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5. Anggota Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Anggota adalah jabatan *ex-officio* yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya perwakilan kementerian, lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani tugas dan fungsi terkait kerja sama ASEAN.
6. Pilar Masyarakat ASEAN adalah pondasi Masyarakat ASEAN yang terdiri dari unsur Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh unsur Setnas ASEAN atau kementerian dan/atau lembaga dari 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN dalam penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi lainnya.

BAB II

RINCIAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Keanggotaan Setnas ASEAN terdiri dari:
    a. Kepala;
    b. Pelaksana Harian; dan
    c. Anggota.
(2) Rincian susunan anggota Setnas ASEAN ditetapkan oleh Kepala dalam Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 4

Kepala mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala menyelenggarakan fungsi:

a. kepemimpinan dalam rapat koordinasi dan rapat pleno Setnas ASEAN;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil rapat serta hal terkait pelaksanaan kegiatan Pilar Masyarakat ASEAN kepada Presiden Republik Indonesia; dan

c. penetapan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian serta pembentukan kelompok kerja secara *ad hoc* apabila dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Pelaksana Harian

Pasal 6

Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 6, Pelaksana Harian menyelenggarakan fungsi:

a. kepemimpinan dalam rapat pleno Setnas ASEAN, mewakili Kepala apabila berhalangan;
b. pelaporan hasil rapat pleno kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat koordinasi Setnas ASEAN;
c. kepemimpinan dalam rapat kerja Setnas ASEAN; dan
d. pelaporan hasil rapat kerja kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno Setnas ASEAN.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan administratif dan operasional Setnas ASEAN, Pelaksana Harian dapat membentuk tim administratif dan operasional.
(2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim administratif dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Harian menunjuk koordinator tim yang selanjutnya disebut sekretaris.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN diantaranya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan hubungan antarkementerian dan/atau lembaga.

BAB III

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Rapat Setnas ASEAN terdiri atas:

a. rapat koordinasi;
b. rapat pleno; dan
c. rapat kerja.

Bagian Kedua

Rapat Koordinasi

Pasal 11

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
(2) Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala dengan mengundang seluruh unsur Setnas ASEAN tingkat pimpinan tinggi utama pada kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN.
(3) Rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.

(5) Rapat koordinasi Setnas ASEAN dipandang sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota.

(6) Rapat koordinasi wajib dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dari setiap Pilar Masyarakat ASEAN atau perwakilan yang secara resmi ditunjuk.

Bagian Ketiga

Rapat Pleno

Pasal 12

(1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dipimpin oleh Kepala atau Pelaksana Harian dengan mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN.

(2) Rapat pleno diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Dalam hal Kepala berhalangan hadir, rapat pleno dipimpin oleh Pelaksana Harian.

(4) Hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Kepala bersifat mengikat seluruh peserta rapat dan dapat langsung diimplementasikan atau dibahas lebih lanjut pada tingkat rapat koordinasi.

(5) Hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala untuk selanjutnya menjadi laporan rekomendasi dalam rapat koordinasi.

Bagian Keempat

Rapat Kerja

Pasal 13

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipimpin oleh Pelaksana Harian dengan

mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam satu dan/atau lintas Pilar Masyarakat ASEAN.

(2) Rapat kerja diselenggarakan sewaktu-waktu jika diperlukan dan hasil rapat dilaporkan kepada Kepala untuk menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno.

Pasal 14

(1) Undangan dan agenda rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat dilaksanakan.

(2) Kehadiran unsur Setnas ASEAN dibuktikan dengan daftar hadir.

(3) Dalam hal keadaan mendesak, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 15

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara fisik, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang menetapkan pembatasan pertemuan fisik.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdapat keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan segera, rapat kerja dapat dilakukan melalui media telekomunikasi.

(3) Media telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala.

Pasal 16

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat kerja sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal suatu pangambilan keputusan memerlukan pencermatan dan pembahasan lebih lanjut di tingkat teknis, maka Kepala pada rapat koordinasi dapat

menugaskan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian untuk melanjutkan pembahasan.

(3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi terkait pengambilan keputusan yang perlu dilaksanakan dan disampaikan pada rapat koordinasi berikutnya.

(4) Dalam hal rapat koordinasi tidak dapat menyepakati rekomendasi rapat pleno dan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, Kepala melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 17

(1) Hasil rapat koordinasi, rapat pleno, dan rapat kerja Setnas ASEAN bersifat mengikat serta menjadi acuan yang wajib dilaksanakan seluruh unsur Setnas ASEAN dan kementerian dan/atau lembaga yang tercakup dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN.

(2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen resmi yang meliputi:
   a. keputusan terhadap suatu isu khusus ASEAN yang dicapai melalui musyawarah mufakat;
   b. notula/laporan rapat koordinasi Setnas ASEAN; dan/atau
   c. informasi lainnya yang berhubungan dengan isu ASEAN serta dipandang memiliki keterkaitan atau memberikan dampak pada salah 1 (satu) atau seluruh Pilar Masyarakat ASEAN.

Pasal 18

(1) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diedarkan kepada seluruh Anggota serta kementerian dan/atau lembaga terkait.

(2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
   a. suatu naskah dinas yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh Kepala atau Pelaksana Harian; dan

b. suatu naskah dinas elektronik yang apabila berklasifikasi rahasia diedarkan menggunakan teknologi enkripsi.

(3) Bentuk dan standar teknik penyusunan naskah dinas yang digunakan mengacu pada ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata naskah dinas.

(4) Kegiatan kearsipan termasuk pengelolaan arsip, pembinaan, dan pengawasan sistem arsip, dilakukan oleh Arsiparis sesuai dengan kebutuhan Setnas ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil rapat yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan melalui media elektronik dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 19

Rapat Setnas ASEAN didukung oleh sekretaris dan/atau tim administratif dan operasional yang bertugas menyusun dokumen resmi hasil rapat koordinasi.

Bagian Kelima
Mekanisme Koordinasi

Pasal 20

Seluruh Anggota Setnas ASEAN didorong untuk bekerja sama antarkementerian dan/atau sektoral secara lintas pilar, khususnya dalam penanganan isu lintas sektoral yang menjadi perhatian bersama.

Pasal 21

Kegiatan dan penugasan terkait dengan ASEAN, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan Anggota Setnas ASEAN, disampaikan kepada Kepala Setnas ASEAN melalui Pelaksana Harian.

Pasal 22

(1) Setnas ASEAN menyusun rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagai pelaksanaan dokumen rencana

pembangunan guna mencapai visi masyarakat ASEAN yang ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN di tingkat nasional.

(2) Rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri

(3) Setnas ASEAN dalam penyusunan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV
RENCANA AKSI NASIONAL TAHUN 2022 – 2025

Pasal 23

(1) Untuk pertama kali, penetapan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk tahun 2022-2025 ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.

(2) Ketentuan mengenai rencana aksi nasional tahun 2022-2025 implementasi cetak biru ASEAN tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Nasional *The Association of Southeast Asian Nations* di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 26

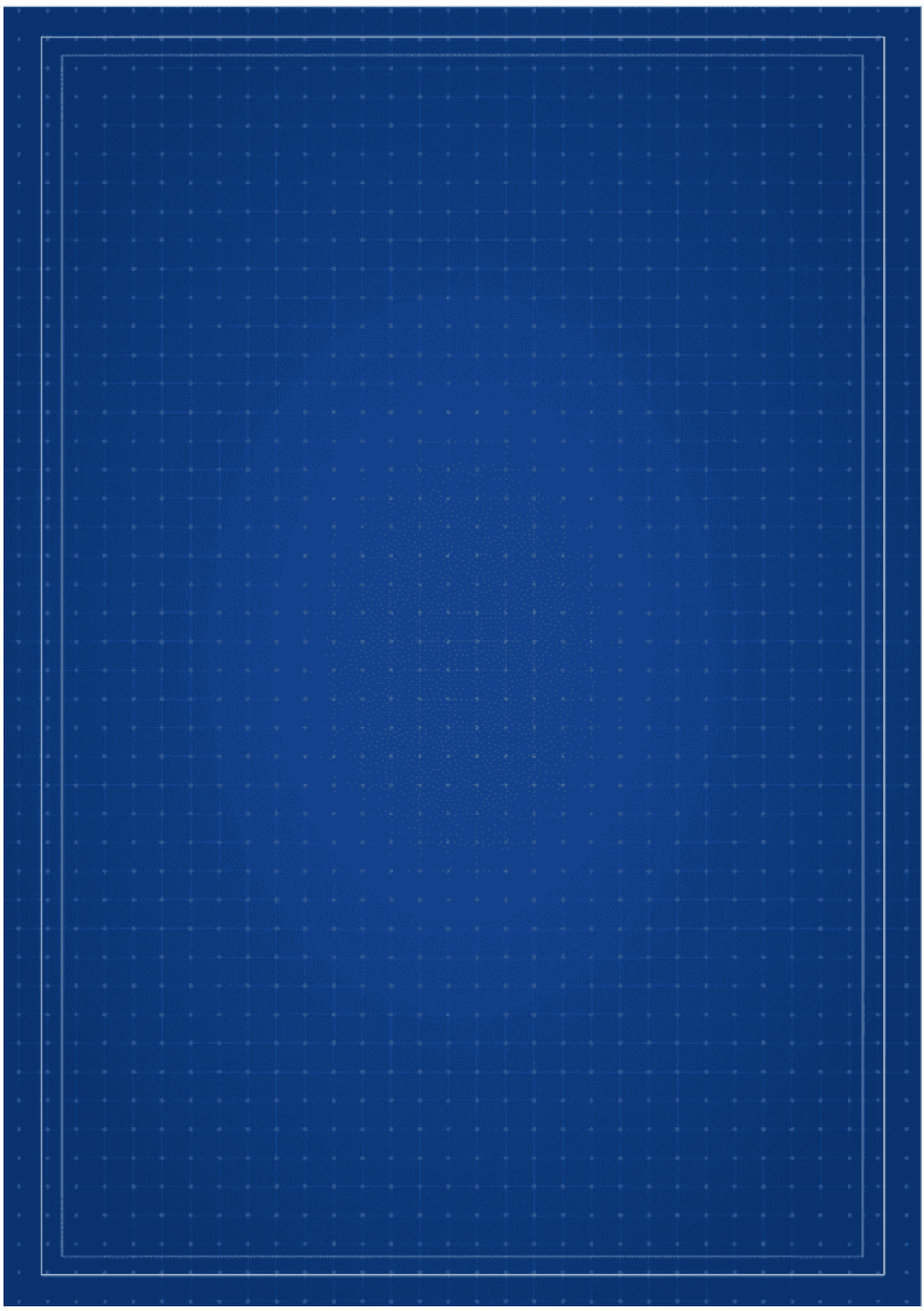
Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

Dian Kusumaningsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA *(THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS)*

RENCANA AKSI NASIONAL TAHUN 2022-2025
IMPLEMENTASI CETAK BIRU ASEAN TAHUN 2025

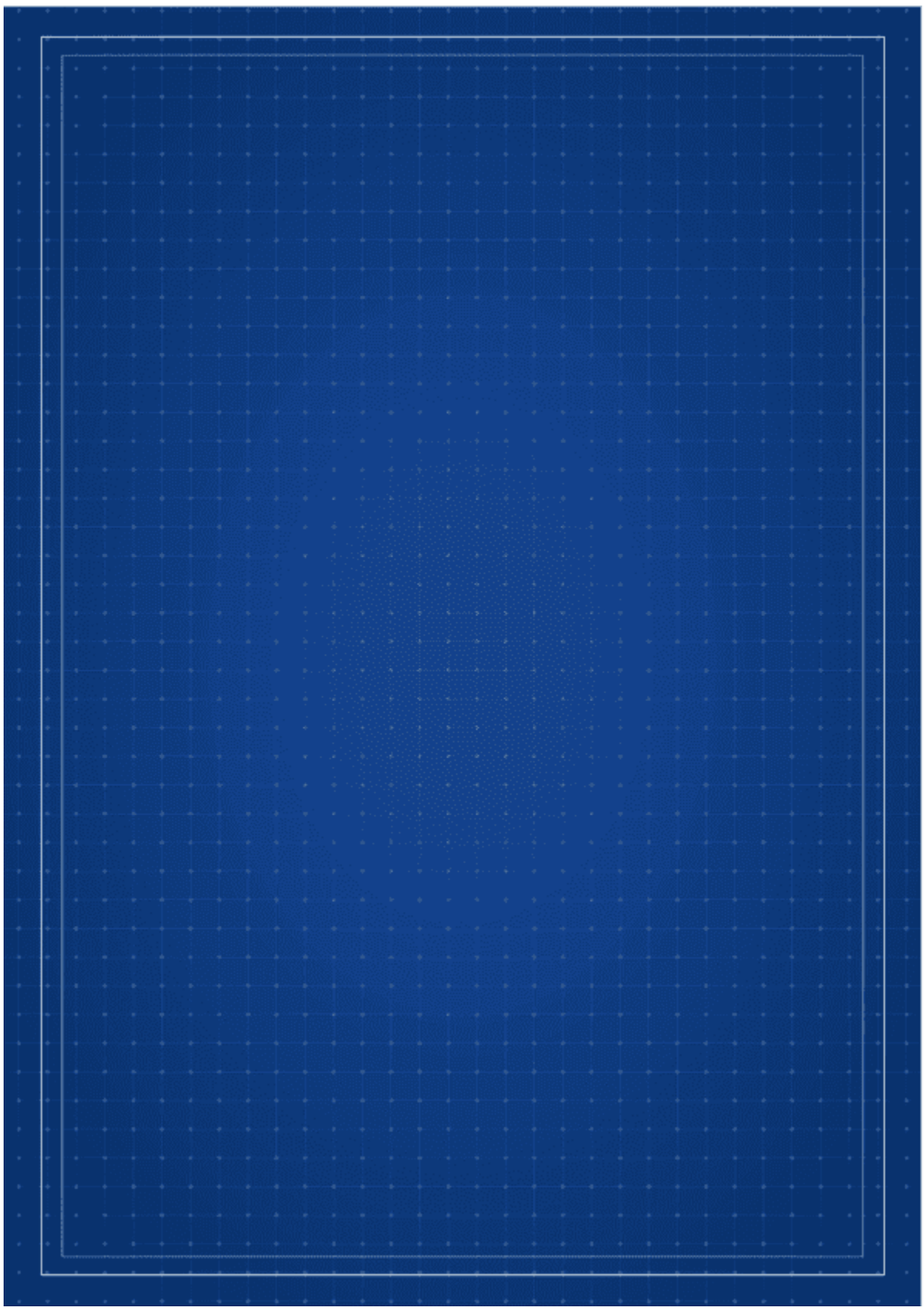

Kementerian PPN/
Bappenas
RENCANA AKSI NASIONAL TAHUN 2022-2025
IMPLEMENTASI CETAK BIRU
ASEAN
TAHUN
2025
Politik
Keamanan
Ekonomi
Sosial Budaya



Daftar Isi

Daftar Isi	**1**
Rencana Aksi Nasional ASEAN Pilar Politik Keamanan	**2**
A. Masyarakat Yang Berbasis Aturan, Berorientasi Pada Rakyat, Berpusat Pada Rakyat	4
B. Kawasan Yang Damai, Aman dan Stabil	18
C. Sentralitas ASEAN Di Kawasan yang Dinamis dan Berwawasan Luas	50
D. Memperkuat Kapasitas dan Keberadaan Institusional ASEAN yang Kuat	57
Rencana Aksi Nasional ASEAN Pilar Ekonomi	**61**
A. Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh	63
B. ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis	70
C. Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral Pendukung Diplomasi Ekonomi	76
D. ASEAN yang Berdaya Tahan, Inklusif, Berorientasi Pada Rakyat, dan Berpusat Pada Rakyat	88
Rencana Aksi Nasional Pilar Sosial Budaya	**96**
A. Mengikutsertakan dan Bermanfaat bagi Rakyat	98
B. Inklusif	101
C. Berkelanjutan	107
D. Ketahanan	111
E. Dinamis	116


Rencana Aksi Nasional
Pilar Politik
Keamanan



Pilar Politik Keamanan



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Penanggungjawab Pilar Masyarakat Polkam ASEAN pada Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia bertanggungjawab untuk memperkuat upaya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pada 9 badan sektoral dan 1 organ ASEAN. 9 badan sektoral ASEAN meliputi ASEAN Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM/ADMM Plus), ASEAN Ministers Meeting on Transnational Crimes (AMMTC), Southeast Asia Nucelar Weapon Free Zone (SEANWFZ), ASEAN Ministers Meeting on Drugs Matters (AMMD), ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM), ASEAN Minister / Attorneys General Meeting of the Central Authorities on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (AMAG/MLAT), ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) dan 1 organ yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan berusaha untuk mewujudkan Kawasan ASEAN yang aman, damai, stabil dan sejahtera, untuk itu badan-badan sektoral ASEAN menjalin kerjasama dalam penanggulangan isu-isu yang menjadi tantangan bersama di ASEAN diantaranya isu kejahatan transnasional. Dicatat Pilar Polkam ASEAN telah memiliki 2 produk hukum yang bersifat legally-binding dalam menanggulangi ancaman kejahatan perdagangan orang dan terorisme.

ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT), dimana Indonesia merupakan salah satu inisiator utama, telah ditandatangani oleh Kepala Negara ASEAN pada tahun 2007. ACCT memberikan dasar hukum yang kuat bagi Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi terorisme termasuk pada aspek pencegahan dan penanganan root-causes terorisme. Upaya penanggulangan terorisme terus digalakkan oleh badan sektoral SOMTC melalui Mabes Polri dan BNPT selaku focal point-nya melalui implementasi Bali Work Plan 2019-2025.

Bali Work Plan merefleksikan komitmen ASEAN untuk menyinergikan kolaborasi lintas pilar dan lintas sektoral dari 19 badan sektoral untuk menanggulangi meningkatnya radikalisasi dan mencegah ekstremisme yang mengarah pada kekerasan. Inisiatif Indonesia di ASEAN juga merujuk pada upaya Indonesia di tingkat nasional melalui pengesahan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE). RAN PE menggunakan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah proses radikalisasi yang mentarget kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda

Untuk kejahatan perdagangan orang Para Kepala Negara ASEAN telah menandatangani dokumen ASEAN Convention Against Trafficking Especially Women and Children (ACTIP) pada tahun 2015. ACTIP memberikan dukungan kepada para penegak hukum Indonesia untuk dapat secara lebih komprehensif melakukan kerja sama lintas batas negara dalam memberantas kejahatan perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara, di bawah kerangka kerja sama ASEAN. Konvensi tersebut akan memperkuat legislasi nasional serta memajukan upaya regional terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Terlebih lagi, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara sumber sekaligus negara tujuan dan transit TPPO. Indonesia juga merupakan negara di kawasan dengan jumlah pekerja migran terbanyak, yakni sekitar 4.5 juta orang, dimana 70 persen diantaranya merupakan perempuan. ACTIP mendorong terwujudnya pendekatan menyeluruh terhadap isu kejahatan perdagangan orang melalui konsep 4P, yaitu: Protection, Prevention, Prosecution, dan Partnership melalui kerja sama diantara anggota ASEAN

Pada badan sektoral ALAWMM dicatat capaian ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance on Criminal Matters (MLAT) pada tahun 2004. MLAT telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 dengan memberikan mandat kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat. Seiring dengan meningkatnya konektivitas dan arus barang, jasa dan manusia maka diikuti pula oleh peningkatan tindak kejahatan lintas negara. Untuk itu maka MLAT menjadi penting bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk mengajukan bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak kejahatan guna mencegah Kawasan ASEAN menjadi safe-haven bagi pelaku kriminal dan mencegah impunitas kriminal.

Mengingat banyaknya capaian penting ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia maka Indonesia harus memastikan agar capaian-capaian tersebut dapat diimplementasikan di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden RI agar kesepakatan-kesepakatan ASEAN dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat dan tidak berhenti pada pembahasan di level elit. Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam bersama dengan Setnas ASEAN-Indonesia, Bappenas dan 27 Kementerian dan Lembaga terkait telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pada Pilar Politik dan Keamanan ASEAN (RAN Pilar Polkam ASEAN). RAN Pilar Polkam ASEAN merujuk pada dokumen ASEAN Political Security Community Blueprint 2025 yang memuat 290 langkah aksi untuk menjadi panduan bagi seluruh anggota ASEAN dalam memajukan Kerjasama Pilar Polkam ASEAN hingga tahun 2025.

"Agar kesepakatan–kesepakatan ASEAN dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat dan tidak berhenti pada pembahasan di level elit."

RAN Pilar Polkam ASEAN memuat 137 rencana aksi yang disarikan dari 290 langkah aksi APSC Blueprint 2025. RAN akan diampu oleh 27 Kementerian dan Lembaga guna mewujudkan 4 elemen utama Pilar Masyarakat Polkam ASEAN yaitu mewujudkan (a) Masyarakat yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat (b) Kawasan yang damai, aman dan stabil, (c) sentralitas ASEAN di Kawasan yang dinamis dan berwawasan luas serta (d) memperkuat kapasitas dan keberadaan institusional ASEAN yang kuat.

"Elemen utama Pilar Masyarakat Polkam ASEAN yaitu mewujudkan (a) Masyarakat yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat (b) Kawasan yang damai, aman dan stabil, (c) sentralitas ASEAN di Kawasan yang dinamis dan berwawasan luas serta (d) memperkuat kapasitas dan keberadaan institusional ASEAN yang kuat."

A. Masyarakat yang Berbasis Aturan, Berorientasi Pada Rakyat, Berpusat Pada Rakyat

A.1.1. Mengimplementasikan Piagam ASEAN Secara Penuh dan Efektif

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memastikan implementasi seluruh Ketentuan Piagam ASEAN untuk memungkinkan ASEAN berfungsi sebagai organisasi yang berbasis aturan ii. Ratifikasi dan implementasi Agreement on Privilege and Immunities of ASEAN dan Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms.	Penyelenggaraan Koordinasi Persiapan Penyusunan Joint Statement dan Joint Communique Pertemuan Tingkat Menteri dan Kepala Negara ASEAN	Terimplementasikannya Piagam ASEAN melalui dokumen Joint Statement dan Joint Communique yang dikeluarkan pada pertemuan ASEAN	2022-2025	Kemlu
	Pelaksanaan/Implementasi Agreement on Privileges and Immunities of ASEAN dan Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms	Terimplementasikannya Agreement on Privileges and Immunities of ASEAN dan Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms	2022-2025	Kemlu

A.1.2. Mengimplementasikan Perjanjian ASEAN yang Telah Ditandatangani / Diratifikasi

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memastikan ratifikasi perjanjian ASEAN yang telah ditandatangani;	Implementasikan Bohol TIP Work Plan	Terimplementasikannya Bohol TIP Work Plan	2022-2025	Kemlu ; Mabes Polri
ii. Memastikan implementasi perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN.	Reviu Perjanjian ASEAN terkait Proses Ratifikasi dan Implementasinya di dalam Negeri	1. Diratifikasinya Berbagai Perjanjian ASEAN 2. Tersusunnya Program di Tingkat Nasional dan Kawasan dalam Rangka Mengimplementasikan Perjanjian ASEAN	2022-2025	Kemlu

A.1.3. Menegakkan Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang Mengatur Tata Hubungan Yang Damai

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Menghormati Piagam PBB dan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara.	Menjadikan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, dimana 10 negara ASEAN menjadi Negara Pihak, sebagai dasar setiap perjanjian internasional	Terbentuknya prinsip-prinsip Piagam ASEAN sebagai dasar hubungan antar negara ASEAN dan non-ASEAN	2022-2025	Kemlu

A.1.4. Menghormati Prinsip Kemerdekaan, Kedaulatan, Kesetaraan, Keutuhan Wilayah, Tidak Campur Tangan, Dan Identitas Nasional

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Tidak mengambil bagian atau berpartisipasi dalam kebijakan atau aktivitas termasuk penggunaan wilayah, oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau aktor non-negara, yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah atau stabilitas politik dan keamanan dari negara anggota ASEAN ii. Meningkatkan konsultasi dan memperkuat kerjasama dalam mengatasi ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan wilayah Negara Anggota ASEAN iii. Mendiseminasikan informasi mengenai Piagam ASEAN, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan instrumen penting ASEAN lainnya kepada masyarakat umum serta berupaya memasukkan pengetahuan tersebut dalam kurikulum sekolah. iv. Menyelenggarakan kegiatan nasional atau regional untuk memajukan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan norma-norma dalam berbagai instrumen penting ASEAN, termasuk Piagam ASEAN dan TAC	Penyelenggaraan ASEAN forum setiap tahun (meliputi pertemuan tingkat menteri dan level teknis)	Terselenggaranya Pertemuan ASEAN secara rutin setiap tahunnya	2022-2025	Kemlu, Kemenko Polhukam, Mabes Polri, BNPT, Kemkumham, Kemhan, BNN.
	Diseminasi Piagam ASEAN	Terdiseminasinya piagam ASEAN	2022-2025	Kemlu

A.1.5. Memajukan Kesadaran Mengenai Masyarakat yang Berorientasi Pada Rakyat Dan Berpusat Pada Rakyat

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendorong Sekretariat ASEAN dan Yayasan ASEAN melalui koordinasi dengan Badan ASEAN terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ASEAN, termasuk:	Berpartisipasi Aktif dalam Berbagai Kegiatan yang Diselenggarakan Sekretariat ASEAN	- Peran Aktif Indonesia dalam Kegiatan Sekretariat ASEAN - Tersosialisasikannya Kegiatan Sekretariat ASEAN kepada Publik	2022-2025	Kemlu
a. Mendorong diselenggarakannya berbagai acara seperti konferensi akademis, lokakarya dan seminar; b. Menerbitkan publikasi secara berkala tentang ASEAN untuk didiseminasikan kepada masyarakat.	Perumusan SOP dan Pembahasan Bilateral Arrangement untuk Implementasi Pemberian Bantuan Konsuler untuk Warga ASEAN oleh Kantor Perwakilan ASEAN di Negara Ketiga	Terimplementasikannya SOP Bantuan Konsuler untuk Warga ASEAN oleh Kantor Perwakilan ASEAN di Negara Ketiga	2022-2025	Kemlu
ii. Memasukkan studi ASEAN dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan Negara Anggota ASEAN melalui koordinasi dengan Badan ASEAN terkait	Membuka ASEAN Lane di tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia	Dibukanya ASEAN Lane pada pemeriksaan imigrasi udara dan laut di Indonesia	2022-2025	Kemkumham
iii. Mendorong pemahaman yang lebih baik tentang ASEAN diantara masyarakat umum di negara Mitra Wicara, dan pihak eksternal lainnya melalui Pusat ASEAN dan Komite ASEAN di Negara Ketiga serta Organisasi Internasional (ASEAN Committees in Third Countries and International)	Melakukan prakarsa dan kegiatan dalam merumuskan Peraturan Teknis implementasi Guidelines (SOP) dan memulai pembahasan Bilateral Arrangement untuk Implementasi Guidelines Bantuan Konsuler untuk warga ASEAN oleh Kantor Perwakilan ASEAN di negara ketiga (2020-2025)	Terimplementasikannya Guidelines Bantuan Konsuler untuk warga ASEAN oleh Kantor Perwakilan ASEAN di negara ketiga (2019-2025)	2022-2025	Kemlu
iv. Menerapkan jalur imigrasi ASEAN (ASEAN Lane) di bandar udara internasional di Negara Anggota ASEAN v. Menjajaki penerapan kartu perjalanan bisnis ASEAN untuk memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha antar Negara Anggota ASEAN vi. Mempertimbangkan Prosedur Operasi Standar (SOP) atau pedoman pemberian bantuan konsuler oleh Kantor Perwakilan ASEAN di Negara Ketiga bagi warga Negara Anggota ASEAN yang tidak memiliki Perwakilan	Inisiasi pembahasan ASEAN Visa Portal	Terlaksananya koordinasi pembahasan inisiasi penerapan ASEAN Common Visa	2022-2025	Kemkumham

vii. Menjajaki kelayakan penerapan Visa Bersama ASEAN (ASEAN Common Visa) bagi warga negara non-ASEAN.				

A.1.6. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap sistem politik, hukum, budaya dan sejarah Negara Anggota ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendorong dimasukkannya studi politik, sistem hukum, budaya dan sejarah Negara Anggota ASEAN ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap identitas bersama dan keanekaragaman ASEAN ii. Mengembangkan kelompok para ahli untuk mendorong pemahaman, pengetahuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman Negara Anggota ASEAN, termasuk melalui ASEAN University Network (AUN) dan Pusat Studi ASEAN; dan iii. Mendorong program pertukaran pelajar pada tingkat sekolah menengah atas dan universitas untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Negara Anggota ASEAN dan kerja sama ASEAN.	Penyusunan Modul pembelajaran mengenai ASEAN di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Tersusunnya Modul Ajar mengenai ASEAN untuk tingkat Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	2022-2025	Kemlu, Kemdikbud
	Pelaksanaan ASEAN University Network (AUN) Work Plan	tersusunnya AUN Workplan	2022-2025	Kemlu, Kemdikbud

A.1.7. Meningkatkan penghormatan dan pengakuan terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC) di Kawasan Asia Tenggara

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Menyelenggarakan kegiatan untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip TAC diantara para Negara Pihak (High Contracting Parties).	Mendiseminasikan Prinsip-Prinsip TAC kepada seluruh pihak	Meningkatnya Pemahaman terkait Norma-Norma TAC	2022-2025	Kemlu

A.2 Memperkuat Demokrasi, Tata-kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakkan Hukum, Promosi dan Perlindungan HAM Serta Kebebasan Fundamental Termasuk Memerangi Korupsi.

A.2.1 Memajukan Prinsip-prinsip Demokrasi

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Menyelenggarakan seminar, program pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi pejabat pemerintah, wadah pemikir (think-tanks), pemuda serta organisasi kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan pihak eksternal untuk berbagi pengalaman mengenai demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi; ii. Berbagi pengalaman ASEAN dalam upaya memajukan demokrasi dan lembaga demokrasi, termasuk melalui Forum Demokrasi Bali; dan iii. Menyusun best practices pada pengamat pemilu sukarela dan berbagi informasi tersebut kepada sesama negara anggota ASEAN.	Menindaklanjuti Resolusi-Resolusi ASEAN Inter-Parliamentaru Assembly (AIPA)	Mendukung penguatan peran Parlemen dalam pemajuan peran Indonesia di ASEAN melalui diplomasi Parlemen dalam forum AIPA	2022-2025	Kemlu ; AIPA Indonesia
	Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF)	Partisipasi negara anggota dan mitra ASEAN pada kegiatan tahunan Bali Democracy Forum (BDF)	2022-2025	Kemlu
	Pelaksanaan Kerja Sama antar Komisi Pemilihan Pemilihan Umum (KPU) di Negara-negara Anggota ASEAN	Terselenggaranya kerja sama antar Institusi KPU dengan Negara-negara ASEAN	2022-2025	KPU

A.2.2 Menanamkan Budaya Tata Kelola yang Baik dan Mengarusutamakan Prinsip Terkait ke Dalam Berbagai Kebijakan Dan Praktik Masyarakat ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendorong dialog dan kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong dan memungkinkan mengembangkan ide-ide baru, berbagai konsep dan metode dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang partisipatif dan efektif; ii. Mendorong dimasukkannya budaya tata kelola yang baik dalam kurikulum pendidikan;	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Berbagai Sektor	Terlembaganya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Berbagai Sektor	2022-2025	Kemenpan-RB
	Menginisasi Kerja Sama di Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan Negara Anggota dan Mitra ASEAN	Terjalinnya Kerja Sama di Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan Negara Anggota dan Mitra ASEAN	2022-2025	Kemenpan-RB

iii. Memastikan implementasi yang penuh dan efektif dari area kerjasama untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Masyarakat ASEAN termasuk meningkatkan kapasitas profesional lembaga publik dalam good governance iv. Mendorong pertukaran dan pemajuan praktik-praktik terbaik mengenai tata kelola yang baik dan pelayanan publik, dalam layanan masyarakat Negara Anggota ASEAN; v. Mendukung Yayasan ASEAN untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna menumbuhkan tanggung jawab sosial perusahaan; dan vi. Mendorong saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui pelatihan dan seminar tentang konsep kepemimpinan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang ditujukan untuk menetapkan baselines, tolok ukur dan norma- norma.	Mempromosikan Pemanfaatan ASEAN Foundation oleh Swasta dan Pemangku Kepentingan Lain di Tingkat Nasional	Terpromosikannya ASEAN Foundation Kepada Berbagai Pemangku Kepentingan	2022-2025	Kemlu

A.2.3 Menanamkan Budaya Integritas dan Anti Korupsi dan Mengarusutamakan Prinsip-Prinsip Terkait Kedalam Berbagai Kebijakan dan Praktik Masyarakat ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Melaksanakan sepenuhnya Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi (MoU on Cooperation for Preventing and Combating Corruption) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2004;	Implementasi MoU on Cooperation for Preventing and Combating Corruption	Terselenggaranya review dan implementasi MoU ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) mengenai Cooperation for Preventing and Combating Corruption	2022-2025	KPK

ii. Mendorong kerja sama ASEAN untuk mencegah dan memberantas korupsi, antara lain dengan memanfaatkan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pidana dalam masalah kriminal 2004 (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004/MLAT) iii. Mendorong kerja sama ASEAN dalam mengimplementasikan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC); iv. Memperkuat implementasi Undang-undang dan Peraturan dalam negeri tentanG pemberantasan korupsi dan praktik anti korupsi baik di sektor publik maupun swasta di ASEAN, termasuk melalui program peningkatan kapasitas; v. Mengintensifkan kerja sama dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang dapaT berlaku guna memberantas korupsi, di bidang pemulihan aset dan penolakan keberadaan tempat perlindungan yang aman bagi terpidana korupsi; vi. Memperkuat jejaring Negara-negara Asia Tenggara Melawan Korupsi (Southeast Asian Parties against Corruption/SEAPA) untuk meningkatkan kerja sama anti korupsi di kawasan dan di tingkat nasional melalui berbagai badan atau lembaga terkait; vii. Meningkatkan saling berbagi pengalaman, praktik-praktik terbaik dan pertukaran pandangan mengenai etika, nilai-nilai dan integritas budaya untuk memperkuat kegiatan anti-korupsi, termasuk melalui Dialog Integritas ASEAN (ASEAN Integrity Dialogue);	Implementasi Kerja sama ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)	- Tersusunnya ASEAN-PAC Action Plan 2023-2025 - Terlaksananya TOR ASEAN-PAC	2022-2025	KPK
	Kerja Sama terkait Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset	- Terselenggaranya Kerja Sama Peningkatan Kapasitas di Bidang Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset - Meningkatnya Kerja Sama Penanggulangan Korupsi dan Pemulihan Aset dalam Kerangka Mutual Legal Assistance (MLA) - Terselenggaranya Kerja Sama pertukaran Informasi dan data terkait Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset dengan Negara Anggota ASEAN	2022-2025	KPK, Kemkumham
	- Implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Lingkup ASEAN yang efektif - Pertukaran Informasi mengenai progress Implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Lingkup ASEAN pada forum kerjasama ASEAN-PAC	- Terselenggaranya kerjasama anti korupsi di level regional sejalan dengan komitmen negara-negara ASEAN pada UNCAC - Terselenggaranya pertukaran informasi mengenai implementasi UNCAC pada forum ASEAN-PAC	2022-2025	KPK
	Meningkatkan Kerja Sama antar Badan Terkait untuk Menanggulangi Kejahatan Pencucian Uang	Terselenggaranya Kerja Sama untuk Mencegah Kejahatan Pencucian Uang	2022-2025	Kemlu, Mabes Polri, PPATK

viii. Meningkatkan dan memajukan kerja sama antar intelijen keuangan/lembaga yang berwenang di Negara Anggota ASEAN di bidang pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi mengenai potensi pencucian uang.				

A.2.4 Menyusun Program-Program untuk Saling Mendukung dan Membantu di Antara Negara Anggota ASEAN dalam Pengembangan Strategi untuk Penguatan Aturan Hukum, Sistem Peradilan dan Infrastruktur Hukum

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Menugaskan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministers Meeting/ALAWMM), melalui kerja sama dengan Badan Sektoral lainnya dan Entitas yang berkaitan dengan ASEAN, termasuk Asosiasi Hukum ASEAN (ASEAN Law Association/ALA), guna mengembangkan program kerja sama untuk penguatan aturan hukum, sistem peradilan dan infrastruktur hukum. ii. Melanjutkan upaya Kelompok Kerja (Working Groups/WGs) ALAWMM dan ASLOM untuk memperkuat infrastruktur hukum di ASEAN, termasuk ASLOM WG tentang Penelaahan Modalitas untuk Harmonisasi Hukum Dagang Negara Anggota ASEAN (Examining Modalities for Harmonisation of Trade Laws of ASEAN Member States) dan ASLOM WG tentang Bantuan Yudisial dalam Masalah Perdata dan Komersial (Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters); iii. Mendukung aktivitas dan program kerjasama untuk memperkuat jejaring kerjasama antar lembaga Kehakiman di Negara-Negara Anggota ASEAN	Penyelenggaraan ASEAN Law Minister Meeting (ALAWMM) dan ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM) dalam Pembangunan Harmonisasi Hukum dan Menyiapkan ASEAN Exradition Treaty	Meningkatnya Kontribusi Indonesia dalam ALAWMM dan ASLOM	2022-2025	Kemkumham
	Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) kerjasama MLA dan ekstradisi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sejumlah daerah di Indonesia	Terlaksanakannya FGD layanan MLA dan ekstradisi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sejumlah daerah di Indonesia	2022-2025	Kemkumham
	Menyusun Kurikulum Hukum ASEAN di Fakultas Hukum Universitas	Tersusunnya kurikulum hukum ASEAN di Fakultas Hukum universitas bekerja sama dengan Pusat Studi ASEAN	2022-2025	Kemlu

iv. Meningkatkan akses untuk bantuan hukum di Negara Anggota ASEAN guna memajukan keadilan sosial melalui peningkatan jumlah kegiatan edukasi publik dan pemasyarakatan; v. Melaksanakan studi banding bagi anggota parlemen tentang penerbitan peraturan dan perundang-undangan; vi. Mengembangkan kurikulum universitas mengenai sistem hukum dari masing-masing Negara Anggota ASEAN dan instrumen hukum yang berkaitan dengan Masyarakat ASEAN; dan vii. Meningkatkan kerja sama antara ALAWMM dan ALA dan organisasi Track II lainnya melalui seminar, lokakarya, dan penelitian tentang hukum internasional, termasuk perjanjian ASEAN.				

A.2.5 Mendorong dan Melindungi Hak Asasi Manusia, Kebebasan Dasar dan Keadilan Sosial untuk Menjamin Kehidupan Rakyat yang Bermartabat Dalam Keadaan Damai, Harmonis dan Sejahtera

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk memperkuat lembaga dan legislasi nasional, memajukan pendidikan mengenai hak asasi manusia dan mengadakan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait; ii. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk meratifikasi atau mengaksesi instrumen pokok hak asasi manusia internasional dan memastikan implementasinya;	Impementasi AICHR Five Years Workplan 2020-2025 dan Penyusunan AICHR Five Years Workplan 2026-2030	- Terimplementasikan nya AICHR Five Years Workplan 2020-2025 - Tersusunnya AICHR Five Years Workplan 2026-2030	2022-2025	Kemlu
	Penyelenggaran AICHR Mini UPR oleh Negara ASEAN	Terselenggaranya AICHR Mini UPR	2022-2025	Kemlu

iii. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk meningkatkan Keterlibatan dengan PBB dan mekanisme Hak Asasi Manusia terkait dimana Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, termasuk Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review) dan Badan- badan Perjanjian terkait serta membagikan pengalaman dan praktik terbaik; iv. Mendukung ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam melaksanakan mandatnya, sesuai dengan Kerangka Acuan; v. Meningkatkan pertukaran informasi mengenai upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di antara Negara Anggota ASEAN sesuai dengan Piagam ASEAN, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD) dan Phnom Penh Statement on the Adoption of the AHRD, serta deklarasi dan instrumen hak asasi manusia internasional. vi. Memperkuat implementasi AHRD dan Phnom Penh Statement on the Adoption of the AHRD, termasuk diseminasi informasi dan peningkatan kesadaran publik atas deklarasi tersebut. vii. Mempromosikan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di ketiga pilar Masyarakat ASEAN melalui konsultasi antara Badan Sektoral ASEAN yang relevan viii. Mendorong interaksi dan konsultasi, apabila dianggap tepat, di antara AICHR, Badan Sektoral ASEAN dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia	Meningkatkan Partisipasi Civil Society Organization (CSO) dalam Aktivitas AICHR	- Peningkatan CSO di ASEAN yang memiliki Status Konsultatif dengan AICHR - Terselenggaranya Roundtabke Discussion (RTD) dengan CSO untuk Mereviu Implementasi ASEAN Human Right Declaration (AHRD)	2022-2025	Kemlu
	Mendiseminasikan Kegiatan AICHR kepada Publik	Terpublikasikannya Kegiatan AICHR melalui Berbagai Media	2022-2025	Kemlu
	Implementasi dan Monev ASEAN Enabling Masterplan to Mainstream the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community di ketiga Pilar ASEAN	- Terimplementasikan nya ASEAN Enabling Masterplan to Mainstream the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community di ketiga Pilar ASEAN - Terselenggaranya Monev Pelaksanaan ASEAN Enabling Masterplan to Mainstream the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community di ketiga Pilar ASEAN	2022-2025	Kemlu

ix. Melanjutkan kerja AICHR dalam melakukan kolaborasi riset isu tematik HAM sesuai dengan TOR-nya; x. Melanjutkan kerja AICHR dalam memperoleh informasi dari Negara Anggota ASEAN dalam pemajuan dan perlindungan HAM xi. Meningkatkan kesadaran publik mengenai hak asasi manusia, di kalangan masyarakat ASEAN, termasuk pemutakhiran publikasi mengenai kegiatan AICHR dan kegiatan informasi publik oleh Badan Sektoral ASEAN terkait secara berkala; xii. Mempertimbangkan, apabila dipandang perlu, review TOR AICHR seperti yang diatur dalam TOR, konsisten dengan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN, dengan pandangan untuk lebih meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN; xiii. Memperkuat interaksi antara jejaring kinerjs mekanisme HAM yang ada termasuk LSM, badan sektoral ASEAN yang relevan xiv. Mendorong koordinasi dan konsultasi antar Badan dan Organ ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi AHRD, Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan Wanita dan Anak ASEAN (Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children), serta Deklarasi Bali tentang peningkatan peranan dan partisipasi kelompok disabilitas dalam Masyarakat ASEAN (Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community), seraya mempertahankan jalur pelaporannya masing-masing				

xv. Bekerja sama secara erat dengan Badan Sektoral terkait, seraya mempertahankan jalur pelaporan masing-masing untuk mempercepat pelaksanaan tugas ASEAN Committee on the Implementation of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam mengembangkan instrumen untuk menjamin agar hak-hak pekerja migran terlindungi dengan baik di kawasan, sesuai dengan undang- undang, peraturan dan kebijakan di masing-masing Negara Anggota ASEAN.				

A.2.6 Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Entitas yang Berhubungan Dengan ASEAN dan Pemangku Kepentingan Terkait Dalam Memajukan Masyarakat Politik-keamanan ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mengintensifkan keterlibatan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly dalam mendorong Masyarakat ASEAN yang berbasis aturan, termasuk implementasi berbagai kesepakatan dan deklarasi ASEAN di tingkat nasional, untuk memfasilitasi integrasi kawasan;	Pendampingan kepada Parlemen RI dalam Berbagai Pertemuan AIPA	Partisipasi Aktif Parlemen Indonesia dalam Pertemuan AIPA	2022-2025	Kemlu ; Sekretariat DPR
	Partisipasi aktif pada ASEAN Coordinating Conference for APSC (ASCCO)	Paritisipasi Aktif dalam ASCCO	2022-2025	Kemlu
ii. Mempromosikan interaksi lebih lanjut antara badan sektoral ASEAN dan institusi relevan ASEAN seperti ASEAN Institute of Strategic and International Studies (ASEAN-ISIS) dan Supreme Audit Institution; iii. Meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh wadah pemikir (think-tanks) dan institusi akademik ASEAN mengenai perkembangan regional dan internasional;	Mendorong Kerja Sama dengan Institusi Akademik untuk Melakukan Kajian mengenai Perkembangan Regional	Terselenggaranya Kerja Sama Penyusunan Kajian terkait Isu Regional dengan Institusi Akademik	2022-2025	Kemlu

A.3 Menanamkan Budaya Perdamaian, Termasuk Nilai Nilai Toleransi dan Moderasi Sebagai Dasar Untuk Harmonisasi, Perdamaian, dan Keseimbangan di Kawasan Kita Dan Meluas.

A.3.1 Mempromosikan Budaya Damai, Antara Lain, Penghormatan Atas Keberagaman, Pemajuan Toleransi dan Pemahaman Atas Keyakinan, Agama dan Budaya

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendorong partisipasi aktif dari perwakilan terkait untuk melakukan dialog lintas agama (inter-faith dialogues) di dalam dan di antara Negara Anggota ASEAN guna menanamkan nilai- nilai toleransi dan moderasi pada tingkat akar rumput; ii. Mengintensifkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pemuda, dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemajuan budaya damai dan moderasi, melalui penyelenggaraan lokakarya dan seminar serta kegiatan lain sesuai dengan Langkawi Declaration on the Global Movement of Moderates; iii. Mendorong interaksi lebih lanjut antara berbagai prakarsa ASEAN mengenai moderasi dan toleransi, dan prakarsa regional dan global yang tengah berlangsung, seperti Dialog Lintas Agama dan dialog lintas Peradaban, dalam rangka mengembangkan sinergi dan membangun kemitraan.	Penyelenggaraan ASEAN Youth Interfaith Conference	Terselenggaranya ASEAN Youth Interfaith Conference	2022-2025	Kemlu
	Mendukung implementasi Langkawi Declaration on the Global Movement of Moderates dalam Berbagai Kegiatan K/L	Terimplementasikannya Langkawi Declaration on the Global Movement of Moderates dalam berbagai kegiatan Nasional dan Regional	2022-2025	Kemenko Polhukam

A.3.2 Memajukan Toleransi dan Moderasi Untuk Menjembatani Perbedaan, Meredakan Ketegangan, Menyelesaikan Sengketa dan Melawan Ekstrimisme Dengan Kekerasan (Violent Extremism) Dalam Segala Bentuk Manifestasinya

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memajukan pendidikan sebagai sarana efektif untuk menanamkan cara menghargai kehidupan daN nilai-nilai tolerans dan moderasi, anti-kekerasan dan saling pengertian untuk	Mendukung Peningkatan Peran ASEAN-IPR dalam Pelaksanaan Program terkait counter terrorism, radicalism, dan violent extremism	'Menguatnya Kapasitas Sekretariat ASEAN IPR	2022-2025	Kemlu

mencegah penyebaran ekstrimisme dengan kekerasan dan mengatasi akar masalahnya; ii. Mendorong pelaksanaan dialog dan pertukaran, menyelenggarakan program pemasyarakatan dan dialog lintas budaya untuk memperkuat gaung moderasi; iii. Mendorong ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN- IPR) dan ASEAN untuk seminar, lokakarya dan Foundation menyelenggarakan program melalui dengan Movement of Moderates (GMM) dan PBB untuk mempromosikan gaung moderasi iv. Melakukan kerja sama teknis dengan PBB dan organisasi terkait, memungkinkan, bertukar keahlian dan pengalaman dalam memajukan toleransi dan moderasi; v. Melakukan studi untuk memajukan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan perdamaian, proses perdamaian dan resolusi konflik; vi. Menyediakan ruang, dukungan dan mekanisme untuk menumbuhkan kepemimpinan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pemuda dan perempuan, untuk membantu peningkatan inovasi dan vitalitas ASEAN guna mengatasi tantangan global secara efektif, termasuk munculnya ekstrimisme dengan kekerasan; dan vii. Berbagi best practices kebijakan terintegrasi antara ASEAN Foundation, ASEAN-IPR dan GMM pada satu pihak dan Mitra Wicara dan Mitra Eksternal, termasuk organisasi internasional relevan di kawasan.	Pelaksanaan PoA counter terrorism, violent extremism, dan radicalism di tingkat nasional dan kawasan	Terimplementasikannya PoA counter terrorism, violent extremism, dan radicalism di tingkat nasional dan kawasan	2022-2025	Polri, BNPT, Kemlu
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Bagi Mediator	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Mediator	2022-2025	Kemhan ; Kemlu
	Kerja Sama ASEAN-UN Regional Dialogue (AURED)	Partisipasi Aktif dan penyusunan rekomendasi Indonesia dalam AURED	2022-2025	Kemlu
	Penelitian/Workshop/ Seminar Terkait Isu Resolusi Konflik	Terselenggaranya Penelitian dan Workshop Terkait Isu Resolusi Konflik	2022-2025	Kemlu, ASEAN-IPR Indonesia

B. Kawasan Yang Damai, Aman Dan Stabil

B.1 Memperkuat Kemampuan ASEAN Dalam Menghadapi Tantangan yang Sudah Ada dan Baru

B.1.1 Memperkuat Mekanisme di bawah Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan peran Ketua ASEAN, sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN, untuk memastikan respon yang tepat waktu dan efektif untuk tantangan-tantangan spesifik; ii. Meningkatkan peran Dewan APSC (APSC Council) dan Keketuannya dengan cara lebih memfokuskan pada isu-isu substanti dan strategis serta menangani isu-isu lintas sektoral dan lintas pilar yang berada dalam lingkupnya secara efektif; iii. Meningkatkan peran pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) dan Keketuannya dalam mengatasi tantangan yang ada dan mulai mengemuka, terutama yang muncul dari pesatnya perkembangan situasi geopolitik, dan memperkuat sentralitas ASEAN; iv. Meningkatkan peran pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defence Ministerial Meeting) dan Keketuaannya dalam memajukan dialog pertahanan dan keamanan serta kerja sama praktis untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan; v. Meningkatkan peran Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministers Meeting/ALAWMM) dan Keketuaannya dalam memperkuat hukum dan kerja sama hukum di ASEAN, serta pemberian bantuan	Partisipasi Aktif pada pertemuan APSC Council	Tersusunnya rekomendasi Indonesia dalam pertemuan APSC Council	2022-2025	Kemlu ; Kemenko Polhumkam
	Partisipasi Aktif pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM)	Tersusunnya masukan Indonesia dalam AMM secara reguler pada isu strategis dengan berdasarkan kepada kepentingan nasional Tersusunnya masukan / kebijakan Indonesia dalam pertemuan AMM	2022-2025	Kemlu
	Partisipasi Aktif pada pertemuan ADMM dan Keketuannya	Tersusunnya masukan / kebijakan Indonesia dalam pertemuan ADMM secara reguler Terlaksananya Work Plan di masing- masing badan sektoral terkait	2022-2025 2022-2025	Kemhan Kemlu ; Kemhan
	Partisipasi Aktif pada pertemuan ALAWMM dan Keketuannya dalam memperkuat hukum dan kerjasama hukum di ASEAN	Tersusunnya masukan / kebijakan Indonesia dalam pertemuan ALAWMM secara reguler Terlaksananya Work Plan di masing- masing badan sektoral terkait	2022 & 2024 2022 - 2025	Kemkumham Kemkumham
	Berkontribusi pada pertemuan AMMTC dan Keketuannya dalam mengatasi kejahatan transnasional	Tersusunnya masukan / kebijakan Indonesia dalam pertemuan AMMTC secara reguler Terlaksananya Work Plan di masing- masing badan sektoral terkait	2022 & 2024 2022 - 2025	Polri Polri
	Berkontribusi pada pertemuan AMMD dan Keketuannya dalam mengatasi isu lintas sektoral terkait obat terlarang	Tersusunnya masukan / kebijakan Indonesia dalam pertemuan AMMD secara reguler	2022 & 2024	BNN

hukum dan yudisial diantara Negara Anggota ASEAN dalam mendukung Masyarakat ASEAN; vi. Meningkatkan peran Menteri ASEAN Tentang Kejahatan Lintas Negara (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes / AMMTC) dan Keketuaannya untuk mengatasi kejahatan trans-nasional yang sudah ada dan mulai mengemuka, melalui kerja sama dan koordinasi dengan Badan ASEAN terkait lainnya; vii. Meningkatkan peran pertemuan Menteri ASEAN tentang obat- obatan terlarang (ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters / AMMD) dan Keketuaannya dalam menyediakan panduan strategis untuk mewujudkan ASEAN bebas dari obat terlarang (Drug-Free ASEAN) dan memperkuat kerja sama dalam isu-isu lintas sektoral yang berhubungan dengan obat terlarang; viii. Meningkatkan peran Ketua ARF dalam meningkatkan dialog dan kerja sama dalam isu polkam melalui pemajuan confidence- building measures (CBMs), aktivitas preventive diplomacy termasuk inisiatif conflict resolution; ix. Meningkatkan peran Sekjen ASEAN dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan Piagam ASEAN dan mandat Negara Anggota ASEAN, termasuk membantu Ketua ASEAN dalam menjalankan tugas spesifik terkait hubungan eksternal dan situasi kemanusiaan darurat; x. Meningkatkan peran Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (Committee of Permanent Representatives to ASEAN/CPR) dalam mendukung tugas Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council/ACC),		Terlaksananya ASEAN Work Plan on Securing Communities Against illicit Drugs 2016-2025	2022-2025	BNN
	Partisipasi aktif pertemuan ARF	Tersusunnya masukan / kebijakan Indonesia dalam pertemuan ARF secara reguler	2022-2025	Kemlu
	Memberikan dukungan terhadap Sekretariat Jenderal ASEAN	Diberikannya dukungan terhadap Sekretariat ASEAN melalui keikutsertaan aktif Indonesia dalam berbagai pelaksanaan kerjasama ASEAN	2022-2025	Kemlu
		Diberikannya dukungan / fasilitasi Sekretariat ASEAN di Indonesia	2022-2025	Kemlu

Dewan APSC dan Badan Kementerian Sektoral (Sectoral Ministerial Bodies) serta untuk memfasilitasi kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal;				

B.1.2 Memperkuat Peran Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dalam Dialog Strategis Mengenai Isu-isu Pertahanan dan Keamanan Serta Kerja Sama Praktis, Serta Meningkatkan Sentralitas ASEAN Dalam Proses Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN- Plus (ASEAN Defence Ministers Meeting-plus/ADMM-plus)

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan dialog strategis dalam ADMM untuk mendorong kerja sama yang lebih erat dalam menangani isu-isu pertahanan dan keamanan bersama;	Penyelenggaraan pertemuan ADMM/ADSOM	Terselenggarakannya pertemuan ADMM / ADSOM	2022-2025	Kemhan
		Tersusunnya dan terimplementasikannya ADMM Work Programme	2022-2025	Kemhan
ii. Mengimplementasikan Program Kerja ADMM mengenai kerja sama praktis yang berkaitan dengan isu-isu pertahanan dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;		Terimplementasikannya ASEAN Declaration on One ASEAN One Response: ASEAN Responding to Disaster as One in The Region and Outside the Region;	2022-2025	Kemhan, BNPB
iii. Mendorong pertukaran pengamat (observer) termasuk bentuk partisipasi lainnya, oleh negara ADMM Plus dalam latihan kemiliteran ADMM-Plus, serta bantuan kemanusiaan dan bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief / HADR) dengan pendekatan yang fleksibel, tidak mengikat dan sukarela;	Implementasi Program ADMM dalam berbagai bentuk kerja sama	Pemberian kontribusi Indonesia untuk penguatan dan pemanfaatan ASEAN Center of Military Medicine (ACMM)	2022-2025	Kemhan, Mabes TNI
		Meningkatnya kerja sama ADMM-Plus dalam bentuk workshops, seminar, dan joint xercise	2022-2025	Kemhan
iv. Memastikan implementasi Hubungan Komunikasi Langsung (Direct Communications Link) diantara seluruh negara ADMM untuk komunikasi yang aman dan efektif, serta mempromosikan pembentukannya ke negara-negara ADMM-Plus;		Meningkatnya people-to-people interaction melalui ASEAN Defence Interaction Program	2022-2025	Kemhan
		Terjajakinya kerja sama ASEAN Defence Industry Collaboration Program	2022-2025	Kemhan
v. Mendorong antara lain kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat di bidang kedokteran militer, termasuk melalui Pusat Kedokteran Militer ASEAN (ASEAN Centre of Military Medicine);		Meningkatnya kerja sama ADMM Plus Experts Working Group (EWG) on Counter Terrorism, HADR, Maritime Security, Military Medicine, Peacekeeping Operation, Humanitarian Mine Action, Cyber Security	2022 & 2024	Kemhan

vi. Mengimplementasikan tugas DMM-Plus, termasuk rencana kerja kelompok kerja (Working Group/WG) pakar ADMM-Plus, yaitu, di bidang HADR, operasi penjaga perdamaian, keamanan maritim, kedokteran militer, kontra terorisme dan tindakan pemusnahan ranjau untuk kemanusiaan (humanitarian mine action), serta memastikan sentralitas ASEAN dalam proses yang berlangsung;	Implementasi ASEAN Direct Communication Infrastructure (ADI)	Terdorongnya pemanfaatan ADI dalam kerja sama pertukaran data daninformasi antar negara	2022-2025	Kemhan
		Dikembangkannya jaringan ADI dengan penambahan sistem komunikasi antara lain teleconference dan materi pertukaran informasi yang berkaitan dengan inisiatif Indonesia dalam ASEAN Our Eyes	2022-2025	Kemhan
vii. Melakukan review regular mengenai inisiatif yang sudah ada agar sejalan dengan prioritas ADMM dan ADMM Plus dengan isu-isu keamanan regional yang menjadi perhatian bersama;	Meningkatkan peran Indonesia dalam implementasi tugas ADMM-Plus	Terimpelemntasikannya ADMM-Plus Work Plan di 7 area kerja sama prioritas, EWG on CT, HADR, MM, MS, PKO, HMA, CS dengan mengutamakan sentralitas ASEAN	2022-2025	Kemhan
		Tersusunnya dan terimplementasikann ya ADMM-Plus 3 Years Work Programme 2020-2023, 2024-2027	2022-2025	Kemhan
	Melakukan konsolidasi antar K/L terkait review kegiatan-kegiatan ADMM / ADMM-Plus setiap tahun	Terciptanya konsolidasi antar K/L terkait review kegiatan-kegiatan ADMM / ADMM-Plus setiap tahun	2022-2025	Kemhan

B.1.3 Memperkuat Proses Forum Regional ASEAN (ARF) dalam Mendukung Masyarakat ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Meningkatkan peran ARF sebagai mekanisme yang berorientasi aksi yang mengembangkan respon konkret dan efektif dalam menanggulangai permasalahan bersama di kawasan;	Koordinasi dan Penyelenggaraan ASEAN Regional Forum (ARF)	Terlaksananya kegiatan ARF 2020-2025 dalam bentuk inter-sessional meeting maupun study group	2022-2025	Kemlu
ii. Mendorong peran ASEAN Regional Forum dan ketuanya untuk membagi informasi dan koordinasi antar partisipan ARF dan antar rapat ARF tahunan.		Terimplementasinya ARF Work Plan di berbagai isu (maritime security, counter terrorism and transnational crime, disaster relief, non proliferation and disarmament dan ICTS)	2022-2025	Kemlu

iii. Meningkatkan peran Sekretaris Jenderal ASEAN di ARF termasuk memperkuat lebih lanjut unit ARF di sekretariat ASEAN		Terlaksananya kegiatan-kegiatan diseminasi informasi terkait hasil-hasil dan rencana pertemuan ARF (kepada seluruh partisipan ARF)	2022-2025	Kemlu
iv. Implementasi keputusan Menteri ARF untuk memajukan ARF menuju tahapan preventive diplomacy sekaligus melanjutkan memperkuat upaya confidence-building measures (CBMs);		Peningkatkan jumlah implementasi keputusan Menteri ARF menuju tahapan preventive diplomacy dalam berbagai pertemuan oleh Indonesia secara terus menerus	2022-2025	Kemlu
v. Mengembangkan program kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan, apabila dianggap tepat, antara ARF dengan organisasi regional dan internasional terkait, termasuk organisasi yang berada di bawah naungan PBB;		Dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan kerja sama ARF dengan UN atau organisasi lainnya	2022-2025	Kemlu
vi. Mengakui kontribusi ARF Experts and Eminent Persons dalam kerja ARF dan menggunakan rekomendasi, dimana diperlukan, untuk memperkuat ARF		Dilakukannya review Indonesia atas proses mekanisme ARF	2022-2025	Kemlu
vii. Mengembangkan kapasitas ARF Head of Defence Universities, Colleges and Institution Meeting untuk mendorong pemajuan kerja sama pertahanan dan militer, termasuk pertukaran best practices;				
viii. Review mekanisme dan proses ARF untuk memperkuat efektivitas dan koordinasi ARF, termasuk kerja dari mekanisme lain yang relevan."				

B.1.4 Memperkuat Proses KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS) dalam Mendukung Masyarakat ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Terus memastikan bahwa East Asia Summit (EAS) tetap menjadi mekanisme yang dipimpin pada tingkat Kepala Negara, bersifat kedepan, dan menjadi forum strategis untuk mendorong promosi perdamaian dan stabilitas di kawasan;	Peran Aktif / Kontribusi Indonesia dalam memperkuat proses KTT Asia Timur (East Asia Summit)	Peran aktif Indonesia dalam Pertemuan KTT Asia Timur	2022-2025	Kemlu
		Tergalangnya dukungan terhadap konsep Indo-Pacific Indonesia / ASEAN di EAS	2022-2025	Kemlu

ii. Memastikan implementasi kegiatan dan proyek secara efektif di bawah kerangka kerja sama EAS di seluruh area prioritas iii. Meningkatkan kapabilitas Sekretariat ASEAN untuk koordinasi dan tindak lanjut kerja sama EAS, termasuk meperkuat divisi yang menangani EAS iv. Mendorong koordinasi lebih lanjut di antara Kepala Perwakilan Negara Peserta EAS di Jakarta untuk memperkuat kerja sama EAS dan memfasilitasi tindak lanjut berbagai Pertemuan EAS secara efektif.		Terimplementasinya Deklarasi EAS di bidang environment and energy cooperation, education cooperation, finance cooperation, global health issues and pandemic disease, natural disaster management, ASEAN connectivity, food security cooperation, trade economic cooperation.	2022-2025	Kemlu
		Meningkatnya implementasi 4 area kerja sama di bawah kerangka ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)	2022-2025	Kemlu
		Terimplementasikannya Manila Plan of Action untuk meningkatkan Phnom Penh Declaration on Development Initiative 2018-2022	2022	Kemlu
		Tersusunnya Plan of Action baru untuk kerja sama EAS masa 3-5 tahun ke depan.	2022-2023	Kemlu
		Terimplementasinya Plan of Action baru untuk kerja sama EAS masa 3-5 tahun ke depan.	2023-2025	Kemlu
		Adanya dukungan terhadap EAS Unit dalam mendiseminasikan informasi terkait EAS kepada publik	2022-2025	Kemlu
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pertemuan EAMJ	2022-2025	Kemlu

B.1.5 Memperkuat Kerangka Kerja Sama ASEAN Plus Three dalam Mendukung Masyarakat ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memperkuat proses ASEAN Plus Three (APT) sebagai kendaraan utama dalam mencapai tujuan jangka panjang East Asia Community dengan ASEAN sebagai juru mudinya di tengah perubahan arsitektur keamanan	Kontribusi Indonesia dalam kerangka Kerja Sama ASEAN Plus Three	Terselenggaranya pertemuan AP pada tingkat Menteri dan Kepala Negara	2022-2025	Kemlu
		Terimplementasinya APT Work Plan 2018-2022 di bidang kerja sama politik dan keamanan,	2022	Kemlu

ii. Memastikan secara efektif dan tepat waktu pengimplementasian kegiatan dan APT work plan iii. Mengimplementasikan rekomendasi East Asian Vision Group (EAVG) II yang relevan untuk memperkuat kerja sama APT.		memperdalam dialog kerja sama politik dan keamanan, memerangi kejahatan transnasional, kontra terorisme dan ekstrimisme, meningkatkanvkerja sama maritim, mendorong promosi moderasi, kerja sama ekonomi dan kerja sama sosial budaya		
		Tersusunnya APT Work Plan pasca 2022 untuk memperkuat kerja sama APT di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.	2022	Kemlu
		Terimplementasinya APT Work Plan pasca 2022 untuk memperkuat kerja sama APT di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.	2023-2025	Kemlu
		Terbentuknya jejaring (networking) antar Universitas-Universitas di negara APT dalam rangka pengembangan Studi Asia Timur, paket e-learning, dan Summer Camp	2022-2025	Kemlu
		Terlaksananya implementasi kegiatan APT Work Plan secara efektif dan tepat waktu	2022-2025	Kemlu
		Terlaksananya East Asian Vision Group (EAVG) Nomor 9, 11, dan 24 pada isu pendidikan	2022-2025	Kemlu

B.2 Respon Kepada Isu Urgen atau Situasi Krisis yang Berdampak Pada ASEAN Secara Efektif dan Tepat Waktu

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendukung Ketua ASEAN dalam memastikan respon efektif dan tepat waktu untuk situasi urgen atau krisis yang berdampak pada ASEAN, termasuk memberikan jasa baik dan upaya serupa lainnya untuk segera menangani situasi tersebut ii. Mengadakan rapat khusus dalam tingkat pemimpin, menteri, pejabat senior/CPR termasuk melalui konfrensi video dalam perihal situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN	Membangun Mekanisme komunikasi serta penyelenggaraan special meeting/retreat untuk membahas krisis/potensi konflik yang berpengaruh terhadap ASEAN	Terlaksananya Koordinasi dengan Ketua ASEAN serta ASEAN Troika untuk membahas situasi Krisis; Terselenggaranya rapat khusus tingkat menteri atau pejabat senior/CPR untuk membahas situasi krisis yang memengaruhi ASEAN; Terbangunnya Mekanisme Komunikasi antar Negara Anggota ASEAN untuk mencegah Eksalasi Konflik antara lain melalui	2022-2025	Kemlu

iii. Mengaktifkan ASEAN Troika untuk menanggulangi situasi urgen yang berdampak pada perdamaian dan stabilitas secara tepat waktu;		pembentukan Code for Unplanned Encounter at Sea (CUES) dan Hotline of Communication Among Ministries of Foreign Affairs		
iv. Mengeksplorasi upaya dan cara atau mekanisme yang dapat diaplikasikan, yang dapat segera diaktifkan untuk menanggulangi situasi urgen yang berdampak pada ASEAN termasuk perdamaian dan stabilitas kawasan; v. Membangun berdasarkan mekanisme yang sudah ada untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini guna mencegah terjadinya eskalasi konflik.	Penyelenggaraan Knowledge Sharing Best Practice antar negara ASEAN terkait pencegahan konflik	Tersusunnya best practice antar negara anggota ASEAN dalam deteksi dini eksalasi konflik	2022-2025	Kemlu

B.3 Memperkuat Kapasitas ASEAN untuk Membahas Isu Keamanan Non-tradisional Secara Efektif dan Tepat Waktu.

B.3.1 Memperkuat Kerja Sama Dalam Menangani dan Memerangi Kejahatan Lintas Negara

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan status MLAT 2004 menjadi ASEAN Treaty; ii. Mempertimbangkan aksesi negara ketiga pada MLAT 2004 iii. Mengimplementasikan secara efektif ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes yang mencakup terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan di laut, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan dunia maya; iv. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar badan sektoral dalam menangani kejahatan transnasional termasuk melalui tukar-menukar informasi, berbagi pengalaman, latihan bersama, dan aktivitas relevan lainnya;	Membuat pengaturan mengenai proses aksesi negara ketiga atas MLAT 2004	Tersusunnya pengaturan mengenai proses aksesi negara ketiga atas MLAT 2004	2022-2025	Kemkumham
	Implementasi ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime 2016-2025	Terimplementasikannya ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime 2016-2025	2022-2025	Kemlu, Mabes Polri
	Implementasi work plan of the ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism dan ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person	Terimplementasinya work plan of the ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism dan ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person	2022-2025	Mabes Polri ; BNPT
	Pemanfaatan mekanisme pertukaran data dan informasi Interpol (I 24/7) dan ASEANAPOL databas system (e-ADS 2.0)	Termanfaatkannya mekanisme pertukaran data dan informasi Interpol (I 24/7) dan ASEANAPOL database system (e-ADS 2.0)	2022-2025	Mabes Polri
	Implementasi Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO)	Terimplementasinya Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang	2022-2025	KPPPA, Mabes Polri, Kemlu

v. Meningkatkan kerja sama dalam menangani kejahatan lintas negara lainnya yang muncul, termasuk perdagangan gelap satwa liar dan kayu serta penyelundupan manusia, sesuai dengan konvensi internasional terkait vi. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan media melalui kampanye tentang kejahatan lintas negara; vii. Memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk sector swasta, media, dan LSM dalam memerangi kejahatan transnasional viii. Memperkuat kapasitas sistem peradilan pidana termasuk para hakim, jaksa dan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan lintas negara di ASEAN dan melalui kerja sama dengan organisasi regional dan internasional terkait; ix. Meningkatkan kerja sama lembaga penegak hukum, termasuk melalui pertukaran informasi dan data intelijen, perbantuan bersama, patroli yang terkoordinasi dan pengembalian dana hasil kejahatan x. Meningkatkan pertukaran informasi tentang kejahatan lintas negara melalui database yang ada xi. Memperkuat kerja sama dalam memerangi dan menekan kejahatan transnasional, utamanya dokumen palsu dan pengawasan aktivitas keuangan yang dicurigai mendukung kejahatan dan aksi terorisme; xii. Melanjutkan tugas ALAWMM untuk meningkatkan kerja sama mengenai isu ekstradisi	Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi data intelijen	Terlaksananya kerja sama pertukaran informasi data intelijen	2022-2025	Mabes Polri ; Mabes TNI
	Meningkatkan Kerja Sama Sub-Regional terkait Keamanan Maritim	Terlaksananya Kerja Sama Sub Regional terkait Keamanan Maritim, khususnya di Perairan Sulu dan Selat Malaka.	2022-2025	Mabes Polri ; Bakamla ; Mabes TNI
	Pelaksanaan Workshop dan pelatihan pemeriksaan dokumen perjalanan palsu	Terlaksananya Pelaksanaan Workshop dan pelatihan pemeriksaan dokumen perjalanan palsu	2022-2025	Kemkumham
	Pembentukan Extradition Treaty di ASEAN	Tersusunnya draft ASEAN Extradition Treaty	2022-2025	Kemkumham

B.3.2 Terus Meningkatkan Kerja Sama Melawan Terorisme

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Mengimplementasikan secara efektif ASEAN Convention on Counter Terrorism dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Tourism; ii. Mengupayakan untuk meratifikasi/mengaksesi instrumen internasional yang berhubungan dengan perlawanan terhadap terorisme iii. Memperkuat kerja sama meningkatkan agenda moderasi dan inisiatif deradikalisasi untuk menegasikan dan defuse radikalisasi, radikalisasi sendiri, dan ekstremisme di ASEAN, termasuk melalui pertukaran pengalaman dan best practices dalam deradikalisasi, rehabilitasi dan re-edukasi untuk mencegah dan menekan aksi teroris; iv. Meningkatkan kerja sama di dalam dan di antara kawasan untuk mendukung inisiatif ditujukan dalam menanggulangi dan memerangi akar masalah terorisme dan kondisi kondusif untuk terorisme, violent extremism dan radikalisme; v. Memperkuat kerja sama antar kawasan untuk mencegah dan menekan arus foreign terrorist fighters vi. Meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, International Law Enforcement Academy, dan Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism serta pusat-pusat terkait lainnya di ASEAN dan kawasan lainnya, untuk terus mengembangkan strategi, teknik dan taktik baru untuk melawan terorisme	Mengimplementasikan Berbagai Kesepakatan ASEAN terkait Terorisme	- Terimplementasikannya ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Comprehensive PoA on Counter Terrorism (ACPOA on CT); - Terimplementasinya Work Plan dari ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2018-2025; - Bali Work Plan (2019-2025)	2022-2025	Mabes Polri ; BNPT
	Mendorong pembentukan regional network of practicioners on Preventing Violent Extremism (PVE)	Terbentuknya regional Practitioners on PVE	2022-2025	BNPT ; Kemlu

vii. Mengembangkan lebih lanjut kapasitas intelijen keuangan / unit yang berwenang dan instansi terkait lainnya yang terlibat dalam upaya anti pencucian uang / pembiayaan kontra-terorisme, untuk mendeteksi, menganalisis dan menginvestigasi pencucian uang hasil kejahatan secara lebih baik, sesuai dengan Rekomendasi Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) viii. Melanjutkan pertukaran pengalaman dan keahlian dalam menerapkan dan menegakkan hukum kontra-terorisme, termasuk melalui seminar dan lokakarya internasional ix. Meningkatkan hubungan antar-unit kontra-terorisme dan lead counter-terrorism responder serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai arsitektur tanggap kontra-terorisme di masing-masing Negara Anggota ASEAN; x. Mendorong kerja sama dan koordinasi isu kontra terorisme dengan melibatkan penegak hukum, militer dan instansi non-militer; xi. Memperkuat kerja sama dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional relevan, termasuk PBB, dalam hal kontra terorisme melalui berbagai inisiatif dan proyek xii. Mengintensifkan berbagi informasi dalam hal teroris dan organisasi kejahatan transnasional, termasuk metode operasional, pergerakan, pendanaan terorisme, dan hal relevan lainnya seperti penyelundupan dan penyalahgunaan senjata api dan peledak termasuk bahan kimia, biologi, radiologi, nuklir dan bahan peledak (CBRN).				

B.3.3 Mewujudkan Aspirasi ASEAN yang Bebas dari Obat Terlarang

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memperkuat peran AMMD dalam koordinasi koheren, komprehensif dan efektif dari strategi ASEAN untuk mewujudkan Kawasan Bebas Narkoba ASEAN; ii. Melanjutkan upaya menuju Kawasan Bebas Narkoba yang menunjukkan ketahanan ASEAN dan komitmen untuk melindungi masyarakat dan komunitas dari penyalahgunaan narkoba iii. Memperkuat langkah-langkah untuk menghambat produksi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta pengendalian impor dan ekspor bahan kimia precursor; iv. Mengembangkan strategi yang holistik, terpadu dan seimbang melalui pengurangan penawaran dan permintaan, untuk mencapai keseimbangan antara pendekatan penyembuhan dan rehabilitasi serta pendekatan penegakan hukum dalam memerangi kejahatan obat-obatan terlarang; v. Mengembangkan standar dan praktik terbaik berdasarkan bukti mengenai perumusan kebijakan dan intervensi terhadap pengawasan dan pencegahan obat-obatan terlarang, serta langkah-langkah terkait lainnya vi. Berbagi best practices dan promosi pendidikan dan program advokasi dengan menargetkan seluruh sektor masyarakat utamanya pemuda;	Implementasi Berbagai Kesepakatan ASEAN terkait Penanggulangan Narkoba	- Terimplementasikannya ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025; - Terimplementasikannya Program-Program dalam Kerangka Grand Design on alternative development;	2020-2025	BNN
	Memperkuat dan Meningkatkan Pemanfaatan The ASEAN Narcotic Coperation Center (ASEAN NARCO)	Peran Aktif Indonesia dalam Pelaksanaan Program-Program The ASEAN Narcotic Coperation Center (ASEAN NARCO)	2022-2025	BNN
	Menjalin Kerja Sama antar Interdiction Command Center dengan Negara-Negara ASEAN	Terbentuknya kerja sama antar command center Negara-Negara ASEAN	2022-2025	BNN
	Mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terimplementasinya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2022-2025	BNN
	Pelembagaan Kerja Sama antara BPOM, Kemenkes, BNN dan K/L terkaitnya dalam Membahas New Psychoactive Substances (NPS)	Terlembaganya Kerja Sama Lintas K/L dalam menangani New Psychoactive Substances (NPS)	2022-2025	BNN
	Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka pengawasan obat terlarang	Ditetapkannya Revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka pengawasan obat terlarang	2024	BNN
	Membetuk dialog antara ASEAN dan Mitra Wicara ASEAN dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan kejahatan terkait narkoba	Terlaksananya dialog antara ASEAN dan Mitra Wicara ASEAN dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan kejahatan terkait narkoba	2022-2025	BNN

vii. Meningkatkan kapasitas laboratorium ilmiah Negara Anggota ASEAN dalam melakukan identifikasi prekursor dan menganalisis resep obat-obatan untuk kegiatan intelijen dan operasi pencegahan obat-obatan terlarang viii. Mempromosikan peran ASEAN Narcotics Cooperation Centre dalam meningkatkan jejaring kinerja dan berbagi pengalaman dan intelijen diantara aparat penegak hukum isu narkoba di Negara Anggota ASEAN ix. Memperkuat kapasitas sistem peradilan pidana termasuk hakim, jaksa dan aparat penegak hukum untuk pengawasan obat-obatan terlarang; x. Mengembangkan ASOD Work Plan untuk mencapai aspirasi kawasan Bebas Narkoba; xi. Meningkatkan kerja sama dengan Mitra Eksternal, termasuk Mitra Wicara dan organisasi internasional dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan kejahatan terkait narkoba xii. Mengembangkan pengaturan hukum multilateral atau bilateral untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia precursor. xiii. Mendorong pertukaran informasi mengenai profil sindikat dan kejahatan obat-obatan terlarang dan daftar kegiatan peredarannya xiv. Menyediakan transfer pengetahuan praktik terbaik mengenai pengontrolan dan pembuangan bahan kimia esensial dan prekursor	Memperluas Kerja Sama dengan Instansi Terkait Penanggulangan Narkoba Negara-Negara ASEAN, khususnya yang belum memiliki MoU dengan BNN.	Terbentuknya Kerja Sama Penanggulangan Narkoba dengan Instansi Penanggulangan Narkoba Negara-Negara ASEAN	2022-2025	BNN

B.3.4 Meningkatkan Kerja Sama Melawan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memastikan ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children sesegera mungkin dan pelaksanaannya secara efektif, serta melaksanakan ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children; ii. Mendorong ratifikasi dan implementasi UN Convention Against Transnational Organised Crimes, serta Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children iii. Memperkuat respon sistem peradilan sekaligus mencegah upaya perdagangan orang dengan tetap melindungi korban perdagangan orang berdasarkan instrument ASEAN relevan dan apabila dapat diaplikasikan protokol dan konvensi internasional perdagangan orang lainnya; iv. Meningkatkan kerja sama untuk memerangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia dengan Mitra Wicara dan mitra lainnya;	Implementasi The ASEAN Convention on Trafficking in Persons especially Women and Children (ACTIP) dan ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, especially Women and Children (APA)	Terimplementasinya ACTIP dan APA	2020-2025	Mabes Polri ; Kemen PPPA
	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri	Terlaksananya Perlindungan PMI di Luar Negeri	2022-2025	Kemenaker ; BP2MI ; Kemlu
	Mendorong kerja sama teknis pertukaran informasi dan pertukaran praktik terbaik melalui Highly Specialized Unit (HSU) on TIP dalam kerangka SOMTC	Terlaksananya kerja sama teknis pertukaran informasi dan pertukaran praktik terbaik melalui Highly Specialized Unit (HSU) on TIP dalam kerangka SOMTC	2022-2025	Mabes Polri

B.3.5 Mengupayakan Penghapusan Penyelundupan Senjata Kecil dan Senjata Ringan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendorong implementasi secara penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Sektoral terkait, untuk mencegah, memerangi dan memberantas perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan dalam segala	Meningkatkan peran Indonesia dalam SOMTC Working Group on the Smuggling and Trafficking of Small Arms and Light Weapons	'Partisipasi Aktif Indonesia dalam SOMTC Working Group on the Smuggling and Trafficking of Small Arms and Light Weapons	2022-2025	Mabes Polri

aspeknya, sesuai UN Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, serta the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons; dan ii. Berupaya untuk menekan penyelundupan senjata melalui inisiatif regional;				

B.3.6 Memperkuat Kerja Sama dalam Memerangi Kejahatan Siber (Cybercrimes)

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memperkuat kerja sama dalam memerangi kejahatan siber, termasuk melalui waktu yang tepat untuk berbagi informasi dan best practices diantara lembaga penegakan hukum, dengan perlunya melakukan upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan hukum yang sesuai dan kapabiltas untuk menanggulangi kejahatan siber; ii. Memperkuat kapasitas otoritas peradilan pidana untuk menerapkan hukum dan undang- undang tentang kejahatan siber dan bukti elektronik; iii. Meningkatkan pelatihan penegakan hukum terkait keamanan siber dan kejahatan siber; iv. Memperkuat kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan pertukaran informasi antara sektor swasta dan lembaga penegak hukum guna mengidentifikasi dan mengurangi ancaman kejahatan siber; v. Meningkatkan kesaradaran dan pemahaman dari Negara Anggota ASEAN akan kejahatan siber dan cyber-terrorism.	Penguatan Peran Indonesia dalam Forum ASEAN terkait Penanganan Kejahatan Siber	Partisipasi Indonesia dalam SOMTC Working Group on Cyber Crime Partisipasi Indonesia dalam ASEAN-Australia Cyber Dialogue	2022-2025	BSSN; Kemlu; Mabes Polri
	Mendorong Pembentukan Point of Contact untuk pertukaran informasi dan penanggulangan insiden siber serta Kerja Sama antar CERT di kawasan (ASEAN CERT)	Penguatan Point of Contact Insiden Siber antar Negara Anggota ASEAN Penguatan Kerja sama ASEAN CERT	2022-2025	BSSN

B.3.7 Memperkuat Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan, berdasarkan dengan hukum domestik dan kebijakan masing-masing negara untuk secara bersama menanggulangi masalah bersama termasuk pemalsuan identitas dan dokumen perjalanan, sekaligus mencari upaya untuk menggunakan teknologi yang relevan untuk mengelola perbatasan secara lebih efektif untuk menghentikan pergerakan teroris dan kriminal; dan ii. Menjajaki, apabila dimungkinkan, adanya patroli perbatasan dan inspeksi yang terkoordinasi di antara Negara Anggota ASEAN untuk memerangi kejahatan trans- nasional, khususnya perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, serta penyelundupan barang, manusia dan senjata, sesuai dengan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan masing-masing negara.	Pelaksanaan Koordinasi Custom, Immigration and Qurantine (CIQ) di Lingkup ASEAN	Terlaksananya Koordinasi Custom, Immigration and Qurantine (CIQ) di Lingkup ASEAN	2020-2025	Kemkumham, Kemenkeu, Kemhan
	Mendorong Sinergitas Konektivitas Perbatasan di IMT-GT dan BIMP-EAGA untuk Mendukung Keamanan Perbatasan	Meningkatnya Keamanan Kawasan Perbatasan di IMT-GT dan BIMP EAGA	2022-2025	Kemkumham, Mabes Polri, Mabes TNI, Kemenkeu
	Meningkatkan kerja sama operasi bersama di wilayah perbatasan	Meningkatkan kerja sama operasi bersama di wilayah perbatasan Terlakasannya patroli perbatasan dan inspeksi terkoordinasi dengan negara tetangga (Malindo, Indonesia-Singapura, Mapilindo, Marlex)	2022-2025	Mabes Polri

B.3.8 Memperkuat Kerja Sama ASEAN Mengenai Manajemen Bencana dan Tanggap Darurat

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan respon dini dan bersama secara lebih efektif pada tingkat politis dan operasional dalam mengaktifkan pengaturan manajemen bencana ASEAN untuk membantu negara terdampak pada saat situasi bencana besar; ii. Mengimplementasikan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) sebagai platform bersama yang utama untuk manajemen bencana di kawasan	Pengimplementasian Berbagai Kesepakatan ASEAN terkait Penanggulangan Bencana	Terimplementasikannya Work Programme AADMER 2021-2025; Terimplementasikannya ASEAN Standards and Certification for Expert in Disaster Management Programme (ASCEND);	2022-2025	BNPB

iii. Meningkatkan peran kunci ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance untuk manajemen bencana di kawasan dan apabila dipandang perlu, menjalin kemitraan dengan badan atau organisasi relevan di tingkat nasional atau kawasan atau internasional seperti UN Humanitarian Respond Depot, the ASEAN Disaster Preparedness Centre, Regional AHDR Coordination Centre dan UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; iv. Mengoperasionalisasikan secara penuh SOP Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief dan Emergency Response Operations untuk membentuk kegiatan bersama dalam pemberian bantuan kepada daerah-daerah yang terkena dampak bencana di Negara Anggota ASEAN, sejalan dengan AADMER; v. Meningkatkan koordinasi sipil-militer dalam memberikan respon cepat dan efektif untuk becana alam besar dan kegawatdaruratan; vi. Promosi sinergi manajemen bencana antara ASEAN dan mekanisme ASEAN-led lainnya seperti ARF, APT, EAS dan ADMM Plus dengan ASEAN Committee on Disaster Management sebagai penggerak proses; vii. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana diintegrasikan ke dalam strategi ASEAN mengenai manajemen bencana dan tanggap darurat.		Terimplementasikannya Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) terutama Chapter VI; Terimplementasikannya ASEAN Declaration on One ASEAN One Response Terimplementasikannya Joint Operations and Coordination Centre of ASEAN (JOCCA)		
	Penguatan Kerja Sama antar Negara Anggota ASEAN dan Mitra Wicara dalam Isu Penanggulangan Bencana	Terbentuknya MoU antara ASEAN dan Mitra Wicara terkait Disaster Management Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM terkait Penanggulangan Bencana	2022-2025	BNPB
	Penguatan Peran Indonesia dalam Berbagai Forum ASEAN terkait Penanggulangan Bencana	- Partisipasi Aktif Indonesia dalam Working Group on Knowledge, Innovation and Management dan Working Group on Recovery;	2022-2025	BNPB

B.3.9 Meningkatkan Kapasitas ASEAN Untuk Mengatasi Kejahatan Transnasional dan Tantangan Lintas Batas

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memperkuat mekanisme ASEAN yang sudah ada untuk manajemen pencegahan agar secara efektif dapat menanggulangi tantangan baru, termasuk bermitra dengan Mitra Wicara, PBB dan badan relevan lainnya dengan persetujuan negara yang berkepentingan; ii. Menyelenggarakan pertemuan spesial, jika dibutuhkan, untuk menanggulangi isu lintas batas seperti polusi asap, pandemi, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, limbah berbahaya, insiden tumpahan minyak, perdagangan satwa liar dan kayu; iii. Mendorong penelitian oleh lembaga-lembaga riset, universitas dan lembaga akademis terkait lainnya untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan baru dan lintas batas yang timbul dari masalah keamanan non-tradisional.	Penyelenggaraan Workshop mengenai isu-isu lintas batas	Terselenggaranya Workshop mengenai isu-isu lintas batas	2022-2025	Kemlu

B.4.1 Mendorong Langkah Membangun Rasa Saling Percaya dan Kegiatan Diplomasi Preventif

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memajukan pertukaran dan kerja sama antara pejabat pertahanan dan saling berkunjung antara institusi pelatihan militer untuk mempromosikan rasa saling percaya dan pemahaman; ii. Memajukan proses ARF menuju diplomasi preventif, melalui implementasi dari ARF Preventive Diplomacy Work Plan 2011 secara efektif sekaligus meneruskan langkah- langkah pembangunan kepercayaan;	Ikut Serta dalam Forum-Forum di Bidang Pertahanan dan Keamanan ASEAN	Paritisipasi Aktif Indonesia dalam ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACFDM) dan Pertemuan Kepala Staf Angkatan Tiga Matra Tahunan Partisipasi Aktif Indoensia dalam Network of ASEAN Defence and Security Institution (NADI);	2022-2025	Kemhan, Mabes TNI

iii. Menghimpun praktik-praktik terbaik mengenai Langkah Membangun rasa saling percaya, diplomasi preventif dan resolusi konflik untuk dikembangkan lebih lanjut oleh ARF; iv. Mengeksplorasi dan mempertimbangkan potensi mediasi / fasilitasi dialog dan konsiliasi di bawah proses ARF, dengan persetujuan seluruh pihak yang terlibat; v. Identifikasi dan bermitra dengan organisasi yang sependapat, seperti PBB, dalam preventive diplomacy capacity building program, pelatihan tukar-menukar pengalaman di bawah kerangka kerja ARF.;	Mendorong Pembahasan dan Mendukung Implementasi Diplomasi Preventif dalam ASEAN Regional Forum (ARF)	Terimplementasinya ARF Work Plan on Preventive Diplomacy Meningkatnya Kontribusi Indonesia dalam ARF ASEAN Security Outlook Terlaksananya berbagai kegiatan kemitraan peningkatan kapasitas dalam isu Preventive Diplomacy	2022-2025	Kemhan, Kemlu

B.4.2 Mendorong Transparansi, dan Pemahaman Kebijakan Pertahanan Serta Persepsi Keamanan yang Lebih Baik

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memberikan penjelasan ringkas secara sukarela mengenai perkembangan politik dan keamanan di kawasan; ii. Melakukan konsultasi dan pemajuan kerja sama dalam pertahanan kawasan dan isu keamanan antara ASEAN dan Mitra Wicara termasuk Mitra Eksternal, termasuk diantaranya melalui ADMM-Plus; iii. Terus berkontribusi dan mempublikasikan ASEAN Security Outlook and ARF Security Outlook secara tahunan serta mendorong publikasi buku putih pertahanan oleh Negara Anggota ASEAN dan Mitra Wicara dengan tujuan untuk memperdalam saling pengertian dan kepercayaan antara negara-negara di dalam dan di luar kawasan; iv. Meningkatkan partisipasi efektif pejabat pertahanan ARF di aktivitas ARF.	Mendiseminasikan perkembangan politik dan keamanan terkini kepada semua pemangku kepentingan	terselenggaranya diseminasi perkembangan politik dan keamanan terkini kepada semua pemangku kepentingan	2022-2025	Kemhan
	Memperkuat Peran Indonesia dalam Forum ADMM/ADMM Plus, khususnya dalam isu Indo-Pasifik, Laut China Selatan, dan Keamanan Maritim	Meningkatnya peran dan kontribusi Indonesia dalam Forum ADMM/ADMM Plus	2022-2025	Kemhan
	Mendorong penyelenggaraan Joint Exercise antara ASEAN dan Mitra Wicara untuk penanganan isu keamanan bersama	Terselenggaranya Joint Exercise antara negara ASEAN dan Mitra Wicara	2022-2025	Kemhan

B.4.3 Membentuk Cara-cara Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang Ada dan Mempertimbangkan Penguatannya Dengan Mekanisme Tambahan, Apabila Diperlukan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan peran konstruktif ASEAN, dalam memajukan pendekatan berbasis aturan menuju penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Piagam ASEAN, TAC, dan instrumen relevan ASEAN termasuk prinsip hukum internasional; dan; ii. Memanfaatkan Protokol yang mengacu pada ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism dan Aturan- aturan terkait lainnya (Rules of Good Offices, Rules of Mediation, Rules of Conciliation and Rules of Arbitration).	Penyelenggaraan Konsultasi dan Statement tertulis apabila terdapat indikasi potensi konflik di kawasan	Dimanfaatkannya ASEAN Charter in Dispute Settlement Mechanism dalam Setiap penyelesaian Permasalahan di Kawasan	2022-2025	Kemlu

B.4.4 Memperkuat Program Penelitian Tentang Perdamaian, Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Menggunakan ASEAN-IPR secara efektif berdasarkan TORnya, termasuk melakukan studi untuk mempromosikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan perdamaian, proses perdamaian dan resolusi konflik, termasuk mempromosikan kolaborasi dan jejaring kinerja antara ASEAN- IPR dan institusi relevan lainnya ii. Menyelenggarakan lokakarya dan seminar regional dan internasional mengenai langkah membangun rasa saling percaya, diplomasi preventif, pencegahan konflik, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian pasca konflik;	Pemberian Dukungan Terhadap Operasional ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR)	Terlaksananya Pembayaran kontribusi Indonesia untui ASEAN IPR Terlaksanakannya Kajian / Studi terkait Resolusi Konflik di bawah kerangka ASEAN IPR	2022-2025	Kemlu

iii. Memperkuat kapasitas dan kerja sama antar lembaga penelitian dan akademis, khususnya ASEAN-ISIS Network dan Dewan Kerja Sama Keamanan di Asia Pasifik (Council for Security Cooperation in the Asia Pacific) dalam menangani isu-isu resolusi dan manajemen konflik.				

B.4.5 Mendorong Partisipasi Aktif Negara Anggota ASEAN Dalam Upaya Menjaga Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian Pasca- Konflik, Sesuai Dengan Kapasitas Negara Anggota Masing-masing

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Mempromosikan ASEAN Regional Mine Action Centre untuk studi, dokumentasi dan berbagi best practices untuk menanggulangi aspek kemanusiaan ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak ii. Mendorong lebih lanjut partisipasi Negara Anggota ASEAN dalam operasi penjaga perdamaian PBB dan pembangunan perdamaian pasca- konflik di luar kawasan atas dasar fleksibilitas, sukarela dan tidak mengikat; iii. Memanfaatkan dan memperkuat ASEAN Peacekeeping Centres Network untuk berbagi praktik terbaik dan meningkatkan pembangunan kapasitas, termasuk menekankan kontribusi Negara Anggota ASEAN kepada PBB; iv. Mendata dan menjajaki kemungkinan membentuk suatu database mengenai kapabilitas penjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian pasca- konflik, apabila dianggap perlu, melibatkan Negara Anggota ASEAN. v. Meningkatkan dialog dan kerja sama dengan pusat-pusat penjaga perdamaian, lembaga penelitian dan	Ikut Serta dalam Kegiatan Humanitarian Mine Action (HMA) dan Peacekeeping Operation (PKO)	Meningkatnya Partisipasi Indonesia dalam kegiatan HMA dan PKO	2022-2025	Kemhan ; Kemlu
	Mendorong Pembentukan Pasukan Perdamaian ASEAN	Disepakatinya Pembahasan Inisiatif Pembentukan Pasukan Perdamaian ASEAN	2022-2025	Kemhan

institusi akademis di kawasan lain serta PBB dan organisasi penjaga perdamaian regional dan internasional lainnya, melalui pertukaran informasi mengenai praktik terbaik serta membangun kapasitas dalam menjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian pasca- konflik; vi. Mendorong kerjasama dan koordinasi antar partisipan negara anggota ASEAN di PBB menjaga perdamaian dan membangun perdamaian paska konflik vii. Mendorong kontribusi Negara Anggota ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam mendukung upaya PBB untuk menjaga perdamaian dan membangun perdamaian pasca- konflik di luar kawasan paska konflik viii. Mendorong pengembangan sumber daya manusia dan program-program peningkatan kapasitas dalam upaya pembangunan perdamaian pasca- konflik: a. Menyusun pedoman untuk pelatihan dan penilaian peningkatan kapasitas; b. Mengidentifikasi topik-topik pelatihan prioritas; c. Merancang program pelatihan pada topik-topik prioritas yang teridentifikasi dan pengembangan materi pelatihan; d. Melaksanakan program tahunan di setiap bidang yang ditargetkan; e. Mengembangkan program kerja sama dengan pihak eksternal dan lembaga keuangan terkait untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kapasitas dalam rekonstruksi pasca-konflik dan pembangunan perdamaian; f. Berupaya mengembangkan program pelatihan yang sistematis bagi para pendidik formal dan penyuluh masyarakat di				

bidang pendidikan perdamaian dan rekonsiliasi, yang dapat dikonseptualisasikan dan diimplementasikan. ix. Melaksanakan latihan bersama dan rencana ARF and ADMM plus termasuk tabletop dan rencana scenario-based terhadap operasi penjaga perdamaian dan apabila dibutuhkan dengan persetujuan partisipan.				

B.4.6 Memajukan Dan Memperkuat Nilai-nilai yang Berorientasi Pada Perdamaian

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Melaksanakan studi lebih lanjut untuk meningkatkan kerja sama dalam rekonsiliasi dan memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian ii. Mempromosikan partisipasi publik dalam pengembangan kerja sama pasca konflik yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi, temasuk mendorong masukan komprehensif dari kalangan akademik, media dan LSM, dan komunitas; iii. Meningkatkan pemahaman antar-komunal melalui pertukaran kegiatan.	Menyelenggarakan Kegiatan-Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Paca Konflik bekerja sama dengan Akademisi, Media, dan Kelompok Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Pasca Konflik	2022-2025	Kemlu

B.5.1 Memastikan Implementasi Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty Dan Rencana Aksi-nya (Plan Of Action) Secara Efektif

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan kerja Komisi SEANWFZ untuk memastikan implementasi efektif SEANWFZ Treaty dan Plan of Action-nya melalui program spesifik; ii. Mengintensifkan upaya yang sedang berlangsung dari Negara Pihak SEANWFZ Treaty dan Negara Nuklir untuk menyelesaikan isu	Implementasi Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty danRencana Aksi-nya (Plan of Action)	Terdorongnya kerja sama negara para pihak untuk menyelesaikan isu-isu terkait pengimplementasian SEANWFZ Treaty dan Plan of Action-nya; Partisipasi aktif Indonesia dalam pertemuan SEANWFZ;	2022-2025 2022-2025	Kemlu Kemlu

yang menjadi permasalahan berdasarkan pada prinsip SEANWFZ Treaty berlandaskan pada penandatanganan dan ratifikasi Protokol sesegara mungkin; iii. Melanjutkan untuk menyampaikan Resolusi SEANWFZ dua-tahunan kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB; iv. Mempromosikan dan meningkatkan peran SEANWFZ dan Negara-Negara Pihak dalam forum multilateral yang relevan dan kerangka kerja pelucutan dan non- proliferasi, termasuk Review Conference of the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons v. Mendorong seluruh Negara Anggota ASEAN untuk mengaksesi instrumen-instrumen terkait seperti Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty dan the International Atomic Energy Agency (IAEA) Additional Protocols.		Terlaksananya Perjanjian Garda Aman (SafeGuards) dan terdorongnya adopsi Protokol Tambahan (additional protocols) IAEA di kawasan Asia Tenggara; Terdorongnya aksesi instrumen SEANWFZ terkait oleh negara anggota ASEAN melalui forum ASEANTOM Meningkatnya kerjasama regional terkait Garda-Aman (Safeguards) seperti Asia-Pacific Safeguards Networks (APSN) Tersosialisasinya posisi bersama ASEAN terkait non-proliferasi, pelucutan senjata dan penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai	2022-2025 2022 2022-2025 2022-2025	BAPETEN Kemlu BAPETEN BAPETEN

B.5.2 Mengembangkan Pendekatan ASEAN yang Terkoordinir untuk Meningkatkan Keamanan Nuklir, Bekerja Sama Dengan International Atomic Energy Agency dan Mitra Terkait Lainnya

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Formalisasi hubungan antara ASEAN dan IAEA ii. Mendorong penggunaan energi nuklir secara damai sesuai dengan prosedur keselamatan, keamanan dan standar perlindungan IAEA; iii. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan bersama di bidang teknologi nuklir sipil, dengan organisasi internasional, seperti IAEA, melalui loka karya, seminar dan pertukaran ahli.	Implementasi Kerjasama ASEAN untuk Meningkatkan Keamanan Nuklir	Terlaksananya APSN Plan of Action; Terlaksananya ASEANTOM Work Plan; Tersedianya sistem pemantuan radiasi untuk mendukung keselamatan nuklir di Asia Tenggara; Terselenggaranya pelatihan, pertukaran informasi, dan pengalaman di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan jaringan sistem peringatan awal (early warning system) di tingkat regional	2022-2025 2022-2025 2022-2025 2022-2025	BAPETEN BAPETEN BAPETEN BAPETEN

iv. Mendorong aksesi terhadap Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, Convention on Nuclear Safety dan Convention on Early Notification of a Nuclear Accident; dan		Terselenggaranya pelatihan, pertukaran informasi, dan pengalaman di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan proteksi fisik dan keamanan instalasi nuklir di tingkat nasioanl dan regional	2022-2025	BAPETEN
v. Memperkuat ASEAN Network Regulatory Bodies on Atom Energy (ASEANTOM) dan mengembangkan kemitraan dengan organisasi pengawasan nuklir lainnya di kawasan untuk berkontribusi pada non proliferasi nuklir, menjaga standar internasional keamanan nuklir, menjaga kecelakaan terkait nuklir dan menjaga dari terorisme nuklir.		Terselenggaranya pelatihan, pertukaran informasi, dan pengalaman di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan proteksi fisik dan keamanan instalasi nuklir di tingkat nasioanl dan regional	2022-2025	BAPETEN
		Terselenggaranya kegiatan pengembangan kapasitas regional melalui pusat unggulan (I-Consep) terkait keamanan dan kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional dan regional	2022-2025	BAPETEN
	Pengembangan Proyek Kerjasama ASEAN untuk Meningkatkan Keamanan Nuklir	Terdorongnya aksesi Konvensi Bantuan Atas Kedaruratan Nuklir dan Radiasi (Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accidentor Radiological Emergency) oleh semua negara anggota ASEAN;	2022-2025	Kemlu
		Terdorongnya aksesi Konvensi Keselamatan Nuklir (Convention on Nuclear Safety) oleh semua negara ASEAN	2022-2025	BAPETEN
		Terdorongnya aksesi Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir dan Fasilitas Nuklir (Convention on Physical Protection of Nuclear Materials and Nuclear Facilities) oleh semua negara anggota ASEAN	2022-2025	BAPETEN
		Terdorongnya aksesi Konvensi terkait The Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC) oleh semua negara anggota ASEAN	2022-2025	BAPETEN
		Terselenggaranya Koordinasi kajian keamanan nuklir di tingkat nasional dan Asia Tenggara	2022-2025	BAPETEN
		Meningkatnya peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum ASEANTOM	2022-2025	BAPETEN
		Meningkatnya kerjasama di tingkat Asia Tenggara seperti melalui ASEANTOM, untuk mendorong perbaikan standar keselamatan	2022-2025	BAPETEN

		pengangkutan zat radioaktif di kawasan Asia Tenggara Terdorongnya aksesi Konvensi Limbah (Joint Convention) oleh semua negara anggota ASEAN.	2022-2025	BAPETEN

B.5.3 Mendukung Terwujudnya Zona Bebas Senjata Nuklir di Kawasan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mempromosikan kesadaran dari area bebas nuklir dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara zona bebas nuklir dan Mongolia, termasuk melalui berbagi pengalaman dan best practices untuk mewujudkan dunia bebas nuklir; ii. Mendorong partisipasi dan peran konstruktif ASEAN dalam Conference of States Parties dan Signatories of Treaties that Establish Nuclear Weapon-Free Zones and Mongolia.	Implementasi Indonesia dalam Mewujudkan Zona Bebas Senjata nuklir di Kawasan	Terselenggaranya diseminasi informasi area dan kebijakan bebas nuklir ke pemangku kepentingan Terlaksanakannya pertemuan SEANWFZ Excom WG serta mendorong aksesi dan ratifikasi P5 terhadap Protokol SEANWFZ	2022-2025 2022-2025	Kemlu Kemlu

B.5.4 Mendorong Upaya Pelucutan Senjata dan NonProliferasi Senjata Pemusnah Massal Serta Meningkatkan Kapasitas ASEAN Untuk Mengatasi Pelepasan Zat-zat Berbahaya/agen Senjata Pemusnah Massal yang Disengaja/tanpa Disengaja

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mempromosikan universalisasi instrumen yang ada terkait dengan pelucutan dan non- proliferasi senjata pemusnah masal, termasuk medianya dan material terkait dan implementasi efektif dari instrument internasional yang dapat diaplikasikan sekaligus meningkatkan kerja sama di tingkat regional dan multilateral untuk isu ini; ii. Meningkatkan kerja sama dalam menanggulangi proliferasi senjata pemusnah massal dengan mendorong adopsi dan implementasi efektif kontrol regulasi ekspor berdasarkan kewajiban dan praktik internasional yang relevan;	Kontribusi Indonesia dalam Mewujudkan Kawasan ASEAN Bebas dari ancaman senjata pemusnah massal dan CBRNE	Tersedianya arsitektur deteksi keamanan nuklir di tiap negara anggota ASEAN untuk mencegah terjadinya penyelundupan sumber radio aktif; Tercapainya kerja sama antar negara ASEAN dalam penanggulangan dan pengendalian atas penyelundupan sumber radio aktif dan kargo lintas barang yang terkontaminasi zat radio aktif Terselenggaranya pelatihan, pertukaran informasi dan pengalaman di kawasan Asia Tenggara dalam	2022-2025 2022-2025 2022-2025	BAPETEN BAPETEN BAPETEN

iii. Mempromosikan kerja sama untuk menjaga kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas dari ancaman senjata pemusnah massal dan CBRNE; iv. Meningkatkan kapasitas untuk mengatasi pelepasan zat berbahaya/agen dari WMD yang disengaja / tanpa disengaja, melalui kerja sama dengan organisasi internasional dan pihak eksternal terkait; dan v. Memperkuat kerja sama untuk mengatasi dampak kemanusiaan dari senjata nuklir, dengan tujuan untuk memperkuat standar dan norma-norma dalam mendukung dunia yang terbebas dari senjata nuklir.		mencegah penyelundupan dan penyalahgunaan sumber radioaktif di tingkat nasional dan regional.		

B.6.1 Mempertahankan Laut Tiongkok Selatan Sebagai Laut yang Diwarnai Kedamaian, Kemakmuran, dan Kerja Sama

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Melanjutkan praktik konsultasi diantara Negara Anggota ASEAN dalam isu Laut China Selatanm termasuk konsultasi DOC dan COC;	Peran aktif Indonesia dalam mempertahankan Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari ASEAN	Pelaksanaan Joint Working Group on DOC dan Senior Officials' Meeting on DoC;	2022-2025	Kemlu
ii. Mengintesifkan dialog dan konsultasi antara ASEAN dan RRT dalam isu LCS;		Terlaksana monitoring dan asessment implementasi DOC	2022-2025	Kemlu
iii. Memastikan implementasi DOC secara penuhdan efektif, termasuk pemantauan dan penilaian implementasinya secara efektif;		Implementasi Work Plan tahunan DOC	2022-2025	Kemlu
iv. Mengintensifkan negosiasi antara ASEAN dan RRT untuk mengesahkan COC secepatnya dan memastikan implementasinya secara penuh dan efektif;		Disepakatinya second reading dan third reading dari COC yang memuat aspek penghormatan terhadap kebebasan pelayaran dan penerbangan; penyelesaian sengketa secara damai; dan penghormatan hukum internasional dan UNCLOS 1982	2022	Kemlu
v. Menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi di antara pihak yang bersengketa dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan, melalui dialog dan konsultasi oleh negara yang terkait secara langsung sesuai dengan prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982;		Dibentuknya Kelompok Kerja yang dapat fokus menangani aspek substansi, administrasi termasuk kerahasiaan dokumen negosiasi COC (perlu konfirmasi lebih lanjut untuk sasaran ini)	2022-2025	Kemlu
vi. Semua pihak menahan diri dalam aktivitas yang dapat mengkomplikasi dan meningkatkan eskalasi sengketa dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas keamanan, termasuk diantaranya, menahan diri dari menempati fitur maritim yang saat ini tidak dihuni termasuk pulau, karang, dan fitur lainnya;		Terdiseminasikan perkembangan negosiasi COC kepada Kementerian dan Lembaga terkait guna memastikan implementasi COC	2022-2025	Kemlu
		Tersampaikannya prakarsa Indonesia pada setiap Pertemuan JWG on DOC dan SOM on DOC	2022	Kemlu
		Diperbaharuinya Point of Contact for Hotline of Communication between Ministry of Foreign Affairs	2022-2025	Kemlu
		Dipahaminya kesepakatan-kesepakatan early harvest measures dipahami oleh aparat penegak hukum dan K/L terkait	2022-2025	Kemlu dan Polri

vii. Melaksanakan kegiatan kerja sama, langkah-langkah dan proyek-proyek bersama yang memungkinkan, sebagaimana diatur dalam DOC berdasarkan konsensus antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang akan bermuara pada realisasi COC; viii. Menjajaki atau melaksanakan kegiatan kerja sama antar pihak-pihak yang berkepentingan di bidang perlindungan lingkungan bahari; ix. Menjajaki atau melaksanakan kegiatan kerja sama antar pihak-pihak yang berkepentingan di bidang penelitian ilmiah mengenai laut dan kegiatan lainnya yang telah disepakati; x. Memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan di atas LCS sesuai dengan prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982; xi. Memajukan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan antara ASEAN dan RRT, termasuk melalui implementasi early harvest measures yang telah disepakati secara efektif; xii. Memerangi kejahatan transnasional, termasuk dan tidak terbatas pada peredaran gelap narkoba, perompakan dan perampokan di laut dan senjata; xiii. Melaksanakan lebih lanjut langkah membangun rasa saling percaya dan diplomasi preventif di Laut Tiongkok Selatan, termasuk mengembangkan SOP untuk mencegah insiden seperti pertempuran yang tidak direncanakan di laut; xiv. Mendorong pertukaran praktik terbaik dan pembelajaran mengenai penyelesaian sengketa maritim dan kerja sama maritim.		Terselenggaranya berbagai seminar dalam kerangka kerja sama ASEAN-China untuk meningkatkan pemahaman mengenai tantangan di Laut China Selatan.	2022-2025	Kemlu

B.6.2 Meningkatkan Kerja Sama Maritim untuk Mengatasi Masalah Maritim Secara Komprehensif

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan koordinasi antara mekanisme ASEAN dalam kerja sama maritim, seperti ASEAN Maritime Forum, untuk secara komprehensif menanggulangi isu-isu maritim;	Optimalisasi Kerja Sama Maritim Indonesia dalam Kerangka Kerja Sama ASEAN	Mengomptimalisasi ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum (ACGMLEF)	2022-2025	BAKAMLA
ii. Mempromosikan dialog dan kerja sama isu maritim dalam mekanisme ASEAN-led, termasuk Expanded ASEAN Maritime Forum dengan tetap memastikan sentralitas ASEAN;		Partisipasi aktif dan kontribusi pada Pertemuan AMF, EAMF dan mekanisme kerjasama maritim lainnya	2022-2025	Kemlu
		Mengoptimalisasi ASEAN Maritime Security Information Fusion Center	2022-2025	BAKAMLA
iii. Meningkatkan keamanan maritim di kawasan untuk memastikan konektivitas maritim yang berlandaskan pada jalur pelayaran yang aman dan kebebasan navigasi;		Terlaksanakannya patroli terkoordinasi dengan negara- negara tetangga di ASEAN	2022-2025	Mabes AL, BAKAMLA
iv. Meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya penegakan hukum maritim, termasuk saling berbagi informasi, untuk mengidentifikasi tantangan keamanan maritim dan potensi dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan kawasan;		Terbentuknya kerja sama Sub-Regional untuk memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal laut (Sub Regional : Trilateral Cooperation Arrangement di Perairan Sulu dan Malacca Security Cooperation at Sea di Selat Malaka yang didukung oleh Eyes in the Sky	2022-2025	Kemlu, Kemhan, Mabes TNI
v. Memajukan keterkaitan antara mekanisme nasional, regional dan internasional mengenai kerja sama maritim, terutama dalam memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal laut;		Penguatan Kontribussi Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum di kawasan	2022-2025	BAKAMLA ; Kemlu
		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SAR Transportasi dengan baik	2022-2025	BASARNAS
vi. Mempromosikan kerja sama maritime yang lebih erat dalam perlindungan dan menjaga lingkungan laut, termasuk penggunaan sumber daya maritime yang berkesinambungan dan perlindungan anekaragam hayati di laut;	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kekuatan Maritim Indonesia dalam Kerangka Kerjasama ASEAN	Terlaksanakannya latihan bersama dengan negara ASEAN dan Mitra Wicara ASEAN dalam rangka peningkatan keamanan maritim kawasan	2022-2025	Kemhan ; Mabes TNI

vii. Memperluas kerja sama maritim ASEAN untuk secara efektif memerangi kejahatan transnasional termasuk terorisme maritim, penyelundupan barang, manusia dan senjata, peredaran gelap narkoba, perompakan, perampokan di laut, termasuk tantangan lintas batas diantaranya insiden tumpahan minyak, IUU Fishing, melalui aktivitas konkret, dengan memastikan dan menjaga jalur pelaporannya;		Meningkatnya kapasitas institusi penegak hukum laut di kawasan	2022-2025	BAKAMLA
		Terlaksananya kompetensi SDM di bidang SAR transportasi	2022-2025	BASARNAS
		Terselenggaranya kegiatan workshop dan seminar kepada aparat penegak hukum di laut mengenai isu-isu keamanan maritim	2022-2025	Mabes AL ; BAKAMLA
viii. Memperkuat kerja sama keamanan maritim dalam meningkatkan maritime domain awareness dan meningkatkan dampaknya dalam keamanan, ekonomi, dan lingkungan di kawasan;	Implementasi Kerjasama ASEAN di Bidang Maritim	Terimplementasikannya Rencana Aksi Nasional mengenai Sampah Plastik di Laut (2017-2025)	2022-2025	Kemenko Maritim ; Kemlu
ix. Meningkatkan kerja sama di bidang keamanan maritim, pencarian dan penyelamatan, serta memperkuat implementasi ASEAN Declaration on Cooperation in Search and Rescue of Persons and Vessels in Distress at Sea, melalui berbagai kegiatan seperti pertukaran informasi, kerja sama teknologi, pertukaran kunjungan pejabat, tabletop exercises, dan pelatihan lapangan di laut, serta kolaborasi dengan Mitra Wicara dan organisasi maritim internasional terkait lainnya;		Terimplementasikan nya EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation	2022-2025	Kemlu
		Terlaksanakannya Symposium mengenai Marine Plastic Debris di Jakarta	2022-2025	Kemlu
		Meningkatnya awareness di tingkat nasional dan regional akan kejahatan transnasional di laut	2022-2025	Mabes Polri
		Terdorongnya pembentukan Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries	2022-2025	Kemenko Maritim
x. Memperkuat mekanisme kerja sama maritim yang ada, bekerja sama dengan pihak eksternal yang relevan, dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas untuk memerangi aktivitas ilegal di laut;		Terimplementasikan nya ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing	2022-2025	Kemlu
		Terdorongnya implementasi efektif ASEAN Seaports Interdiction Task Force (ASITF) dalam mekanisme ASOD/AMMD melalui aktivitas konkret	2022-2025	BNN
xi. Meningkatkan kerja sama dengan pihak- pihan eksternal yang relevan dalam memerangi pembajakan dalam kasus-kasus yang mempengaruhi warga Negara Anggota ASEAN di wilayah lain;		Penyelenggaraan Program ASEAN-India Workshop on Blue Economy di Mandallika pada tahun 2022	2022-2025	Kemlu

xii. Memperkuat dan memperluas aktivitas pada pengembangan kapasitas lembaga penegak hukum maritim di kawasan, termasuk melalui melibatkan pihak eksternal, khususnya Mitra Wicara.				

B.6.3 Memastikan Penerbangan dan Navigasi Internasional yang Damai, Aman, Bebas dan Tanpa Hambatan, Sesuai Dengan Hukum Internasional yang Berlaku

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Mendukung implementasi hukum dan konvensi internasional terkait secara efektif, termasuk UNCLOS 1982;	Koordinasi dan Partisipasi Indonesia dalam Memastikan Penerbangan dan Navigasi Internasional yang sesuai hukum internasional;	Terimplementasinya hukum dan konvensi internasional terkait secara efektif (termasuk UNCLOS 1982)	2022-2025	Kemlu
ii. Memajukan komunikasi jalur cepat antar lembaga terkait di Negara Anggota ASEAN untuk merespons insiden dan situasi darurat di laut sesegera mungkin;		Terimplementasinya Hotline of Communication Among ASEAN and China MFAs di LCS	2022-2025	Kemlu
iii. Meningkatkan kerja sama di antara Negara Anggota ASEAN dengan pihak eksternal dalam memastikan keselamatan navigasi dan penerbangan di kawasan, termasuk melalui workshop dan seminar untuk berbagi informasi dan best practices;		Dibangunnya dan dikembangkannya jaringan komunikasi jalur cepat antara Instansi Penegak Hukum di Laut	2022-2025	Kemlu, Mabes TNI, Bakamla
iv. Meningkatkan dialog dan kerja sama dengan organisasi internasional yang relevan, seperti PBB, IMO dan ILO untuk memastikan implementasikan efektif dari konvensi dan instrumen terkait kerja sama maritim, termasuk tapi tidak terbatas pada, keselamatan di laut, kesejahteraan pelaut, dan pencegahan polusi dari kapal;		Terimplementasinya ASEAN Direct Communication Infrastructure (ADI) di bawah badan sektoral ADMM	2022-2025	Kemhan
		Terimplementasinya ADMM Concept Paper on Guideline on Maritime Interaction	2022-2025	Kemhan ; Mabes TNI
		Terimplementasinya Guideline on Air Encounters Between Military Aircrafts di bawah kerangka ADMM	2022	Kemhan ; Mabes TNI
v. Meningkatkan implementasi MoU on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Responses sebagai mekanisme kerja sama kawasan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas serta mendorong perbantuan bersama.		Partisipasi aktif Indonesia pada EAS Conference on Maritime Security and Cooperation	2022	Kemlu ; Kemhan
	Peningkatan Kerjasama ASEAN di Bidang Penerbangan dan Navigasi	Kunjungan ke Organisasi Internasional dalam rangka menyampaikan kepentingan Indonesia dan ASEAN untuk menjalin kerja sama;	2022-2025	Kemlu

		Terbentuknya Regional Office Against Human Trafficking, Forced Labour and Slavery at Sea bekerja sama dengan ILO	2022-2025	Kemlu, KKP

C. Sentralitas Asean Di Kawasan yang Dinamis Dan Berwawasan Luas

C.1.1 Memperkuat Sentralitas Asean untuk Membentuk Arsitektur Kawasan yang Terus Berkembang yang Terbuka, Transparan, Inklusif dan Berdasarkan Aturan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Melakukan pembahasan yang lebih fokus diantara Pejabat senior untuk mendiskusikan dan menentukan arah strategis isu yang menjadi perhatian di ASEAN; ii. Mengelaborasi visi bersama untuk arsitektur regional untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam lanskap geopolitik yang terus berubah; iii. Memastikan implementasi Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations secara efektif dan menjajaki instrumen yang mengikat secara hukum berdasarkan TAC untuk kawasan yang lebih luas; dan iv. Memastikan agar Badan Sektoral mendapatkan informasi yang baik tentang pendekatan strategis ASEAN dan fokus kerja sama dengan pihak eksternal.	Pelaksanaan koordinasi dalam negeri guna pembahasan isu isu yang menjadi perhatian ASEAN	Terlaksanannya koordinasi internal untuk membahas isu yang menjadi perhatian ASEAN	2022-2025	Kemlu
	Partisipasi aktif Delegasi RI pada berbagai Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Plus One dan ASEAN-led mechanisms	Partisipasi aktif Delri pada berbagai Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Plus One dan ASEAN-led mechanisms lainnya	2022-2025	Kemlu
	Implementasi Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations	Terimplementasikannya Manila Plan of Action to Advance the Phnom Penh Declaration on the EAS Development Initiative (2018-2022)	2022	Kemlu
		Terlaksanakannya koordinasi bersama negara anggota ASEAN dan negara peserta dalam menyusun outcome dokumen KTT EAS	2022-2025	Kemlu
		Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi bersama negara peserta EAS melalui forum pertemuan East Asia Ambassadors Meeting in Jakarta (EAMJ)	2022-2025	Kemlu

C.1.2 Memperkuat Efektivitas Berbagai Mekanisme yang Dipimpin Asean, Termasuk Merampingkan Proses Kerjanya

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Melanjutkan untuk menginisiasi, menjadi tuan rumah, mengetuai aktivitas dan pertemuan bersama Mitra Wicara dan pihak eksternal lainnya dalam konteks ASEAN-led mechanisms; ii. Meningkatkan berbagi informasi, termasuk institusionalisasi praktik cross-briefing dan pertukaran kalender aktivitas dari pertemuan badan sektoral ASEAN yang relevan dan mekanisme SEAN-led dalam isu-isu lintas sektoral; iii. Memperkuat dan mengonsolidasikan proses EAS sebagai Leaders-led forum untuk dialog strategis dalam hal politik, keamanan dan ekonomi termasuk membentuk pengaturan yang tepat untuk fasilitasi persiapan, konsistensi dan keberlangsungan dan tindak lanjut isu yang dibahas oleh para Kepala Negara; iv. Memperkuat proses dan mekanisme APT sebagai sarana pembangunan masyarakat, integrasi ekonomi, kerja sama pembangunan dan peningkatan kapasitas, termasuk implementasi rekomendasi terkait dalam Laporan EAVG II dan inisiatif lainnya yang berhubungan dengan APT. v. Memperkuat ARF sebagai forum penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan keamanan yang telah ada dan baru muncul, melalui peningkatan Langkah Membangun rasa saling percaya (CBMs) serta langkah-langkah konkret menuju diplomasi preventif, termasuk melalui implementasi HaNoi Plan of Action to Implement the	Koordinasi dengan Mitra Wicara ASEAN	Terlaksanakannya koordinasi dalam negeri dengan K/L membahas isu yang menjadi perhatian ASEAN dan Mitra Wicara Terlaksanakannya koordinasi dengan Mitra Wicara ASEAN Terlaksananya koordinasi dan konsultasi negara anggota ASEAN dalam berbagai forum pertemuan Terlaksanakannya Indonesia menjadi Country Coordinator untuk ASEAN-US (2021-2024)	2022-2025	Kemlu
	Memperkuat implementasi mekanisme kerjasama ASEAN Plus Three	Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi bersama negara anggota ASEAN Plus Three (APT) dalam berbagai forum Pertemuan Terimplementasikan nya East Asian Vision Group Nomor 9, 11 dan 24 pada isu pendidikan. Terimplementasikan nya APT Cooperation Work Plan 2018-2022, dan work plan periode selanjutnya (2023-2027)	2022-2025	Kemlu
	Memperkuat implementasi mekanisme kerjsama ASEAN Regional Forum	Terimplementasinya ARF Work Plan di berbagai isu (maritime security, counter terrorism and transnational crime, disaster relief, non proliferation and disarmament dan ICTS) di berbagai workshop dan pertemuan	2022-2025	Kemlu

ARF Vision Statement secara efektif serta mengupayakan metode kerja yang lebih efektif untuk menyampaikan hasil substantif pada pertemuan ARF; vi. Memperkuat proses ADMM dan ADMM Plus untuk membantu memajukan Visi ASEAN untuk arsitektur regional, membantu sentralitas ASEAN dan meningkatkan kapasitas regional serta kemampuan bersama dalam menanggulangi tantangan dan peluang yang ada atau muncul di masa depan.				

C.2 Memperdalam Kerjasama Dengan Dialog Kemitraan, Memperkuat Keterlibatan Dengan Pihak Eksternal dan Mencari Potensi Mitra Baru Untuk Keuntungan Hubungan Bersama dan Juga Respond Secara Bersama dan Konstruktif Terhadap Perkembangan Global

C.2.1 Memperkuat Kerja Sama Substantive dan Strategis Dengan Mitra Wicara

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mengadopsi pendekatan yang lebih strategis bersama Mitra Wicara dengan mengidentifikasi kepentingan ASEAN dan prioritas dengan Mitra Wicara tersebut; ii. Bekerja sama dengan Mitra Wicara, melalui mekanisme yang ada, untuk mengatasi masalah dan tantangan yang ada atau muncul sekaligus memperkuat perkembangan kerja sama di ASEAN; iii. Bekerja bersama-sama dengan Mitra Wicara untuk memastikan implementasi masing-masing Rencana Aksi secara efektif, termasuk pemanfaatan dana kerja sama yang ada antara ASEAN dan Mitra Wicara secara efektif untuk meningkatkan kerja sama di seluruh bidang;	Penyusunan Plan Of Action dengan masing-masing negara mitra ASEAN dan Organisasi Internasional Mitra ASEAN	Tersusunnya Naskah Masukan Indonesia untuk Plan of Action (POA) untuk: 1. ASEAN-Australia (2020-2024) 2. ASEAN-Rusia (2021-2025) 3. ASEAN-Amerika Serikat (2021- 2025) 4. ASEAN-Kanada (2021-2025) 5. ASEAN-Selandia Baru (2021- 2025) 6. ASEAN-India (2021-2025) 7. ASEAN-Republik Korea (2021-2025) 8. ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok (2021-2025) 9. ASEAN-Jepang 10. ASEAN-PBB (2021-2025) 11. ASEAN-Uni Eropa (2023-2027) 12. ASEAN Plus Three Cooperation Workplan (2023-2027) 13. East Asia Summit (EAS) Plan of Action (2023-2027)	2022 - 2025	Kemlu
iv. Meningkatkan kapasitas K/L terkait dengan ASEAN dalam formulasi proyek dan penelaahannya untuk secara efektif menggunakan dana kerja sama yang ada.	Koordinasi dalam negeri dalam rangka mengimplementasi Plan of Action ASEAN dengan negara mitra ASEAN dan Organisasi Mitra ASEAN	Terlaksanakannya koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka mendorong implementasi Plan of Action (POA) ASEAN	2022-2025	Kemlu

		dengan masing-masing Negara Mitra ASEAN dan Organisasi Internasional Mitra ASEAN	2022-2025	Kemlu
	Koordinasi dalam negeri dalam rangka pemanfaatan dana kerja sama ASEAN	Terlaksanakannya koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka mendorong pemanfaatan dana kerja sama yang ada Terlaksananya kegiatan K/L dan Pusat Studi ASEAN yang didanai oleh ASEAN ASEAN Trust Fund dan ASEAN Project Fund Terlaksananya sosialiasi dan coaching clinic ASEAN Trust Fund dan ASEAN Project Fund kepada stakeholders	2022-2025	Kemlu

C.2.2 Mengembangkan dan Menjaga Kemitraan yang Efektif Dengan Pihak Eksternal Untuk Mendukung Visi Masyarakat Asean 2025

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Memperkuat hubungan ASEAN dengan pihak eksternal, termasuk dengan Special Observer dan Guest of ASEAN; ii. Melanjutkan tugas ASEAN Coordinating Council Working Group dalam mempertimbangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan aplikasi Timor-Leste serta partisipasinya pada kegiatan ASEAN dalam konteks kebutuhan pembangunan kapasitasnya; iii. Meningkatkan engagement antara CPR dan Sekretariat ASEAN dengan Duta Besar non-ASEAN dan organisasi internasional lainnya yang relevan yang terakreditasi pada ASEAN; iv. Mengembangkan proyek dan memastikan pemanfaatan secara efektif dan efisien dana kerja sama dan dana lainnya yang terkait dengan kerja sama ASEAN dengan pihak	Penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri, SOM dan Working Group ASEAN dengan negara mitra dan OI Mitra ASEAN	Terselenggarakannya pertemuan tingkat Menteri, SOM dan Working Group ASEAN untuk membahas isu-isu strategis dalam kerangka kerja sama ASEAN dengan Negara Mitra ASEAN dan Organisasi Internasional Mitra ASEAN	2022-2025	Kemlu
	Persiapan Indonesia untuk menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023	Terlaksanakannya persiapan Indonesia untuk menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023	2022-2023	Kemlu
	Implementasi tugas sebagai ASEAN Coordinating Council Working Group dalam mempertimbangkan aspek yang berhubungan dengan partisipasi Timor Leste dalam Kegiatan ASEAN	Tersusunnya posisi Indonesia dalam kunjungan Fact Finding Mission pilar Politik Keamanan ke TimorLeste	2022-2025	Kemlu
		Tersusunnya tindak lanjut hasil dari Fact Finding Mission pilar Politik Keamanan dan mendorong pelaksanaan kunjungan Fact Finding Mission pilar Ekonomi dan pilar Sosial Budaya	2022-2025	Kemlu

eksternal untuk mendukung Masyarakat ASEAN; v. Memanfaatkan secara lebih efektif peran ACTCs untuk mempromosikan ASEAN "dan kerja sama antara ASEAN dan negara tuan rumah atau organisasi internasional; vi. Eksplorasi proyek kerja sama dengan organisasi regional, seperti Gulf Cooperation Council, Economic Cooperation Organisation, Community of Latin American and Caribean States, South Asian Association for Regional Cooperation, Shanghai Cooperation Organisation dan Pacific Alliance termasuk organisasi internasional dan regional lainnya; vii. Mempertimbangkan permintaan dari pihak eksternal untuk kemitraan formal dengan ASEAN berdasarkan Guidelines for ASEAN's External Relations, termasuk berlandaskan hubungan saling menguntungkan untuk mendukung pembentukan Masyarakat ASEAN dengan tetap memperhatikan pentingnya pendekatan menyeluruh berdasarkan pertimbangan geostrategis.		Terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Timor Leste (workshop / seminar yang tidak bersifat policy making yang dilaksanakan ASEAN)	2022-2025	Kemlu
	Pelaksaanaan konsultasi dengan Duta Besar Non-ASEAN dan Organisasi Internasional lainnya yang relevan dengan ASEAN melalui melalui pertemuan-pertemuan ASEAN tingkat Committee of Permanent Representatives (CPR): CPR Interface, CPR-Regional Groupings	Terlaksanaannya konsultasi dengan Duta Besar Non-ASEAN dan Organisasi Internasional lainnya yang relevan dengan ASEAN melalui melalui pertemuan-pertemuan ASEAN	2022-2025	Kemlu, PTRI ASEAN
	Implementasi kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal dengan menggunakan dana kerja sama ASEAN	Tersosialisasinya pemanfaatan dana ASEAN kepada PSA	2022-2025	Kemlu, Setnas ASEAN Indonesia
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bersama negara anggota ASEAN dan Mitra Wicara dalam rangka implementasi Work Plan / Priority Cooperation Area / Plan of Action ASEAN dan pemanfaatan dana kerja sama dengan Mitra Wicara	2022-2024	Kemlu dan ASEAN
		Terlaksanaannya pertemuan antara Committee of Permanent Representatives (CPR) dengan K/L terkait dalam rangka mendorong pemanfaatan dana kerja sama yang ada dalam kerangka kerja sama ASEAN dengan Negara Mitra dan Organisasi Internasional	2022-2025	Kemlu dan ASEAN
	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat ASEAN dalam rangka memanfaatkan dalam rangka meningkatkan dan mempromosikan ASEAN di negara akreditasi ACT	Terlaksanaannya koordinasi dan konsultasi dengan Sekretariat ASEAN melalui pertemuan CPR dan CPR WG	2022-2025	Kemlu dan ASEAN

	Eksplorasi proyek kerja sama ASEAN dengan organiasi regional lainnya	Tersusunannya Naskah Masukan Indonesia untuk Work Plan dengan dengan Organisasi Regional Mitra ASEAN : 1. Gulf Cooperation Council 2. Economic Cooperation Organisation, Community of Latin American and Caribean States 3. South Asian Association for Regional Cooperation 4. Shanghai Cooperation 5. Pacific Alliance 6. Lain-lain	2022-2025	Kemlu ; PTRI ASEAN
		Terlaksananya pertemuan koordinasi antara negara AEAN dengan negara non-mitra ASEAN dan Organisasi internasional yang tengah dijajaki	2022-2025	Kemlu ; PTRI ASEAN
	Melakukan penjajakan kerja sama dengan negara-negara non-ASEAN dan OI dalam rangka mempertimbangkan permintaan kemitraan formal dengan ASEAN	Terlaksananya konsultasi dengan Pejabat Senior / Duta Besar / Special Envoy negara-negara non-ASEAN dan Organisasi regional / Internasional	2022-2025	Kemlu ; PTRI ASEAN

C.2.3 Mengembangkan Keterlibatan Yang Kuat Dengan Mitra Potensial Baru

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mempertimbangkan kemitraan baru dengan negara atau organisasi yang potensial dan tertarik berlandaskan pada hubungan saling menguntungkan termasuk dukungan mereka pada pembentukan Masyarakat ASEAN; dan ii. Mengkaji modalitas lainnya yang tepat untuk terlibat dengan mitra potensial baru dalam hubungan yang saling menguntungkan.	Melakukan penjajakan kerja sama dengan mitra potensial baru (negara non-ASEAN dan Organisasi Internasional)	Terlaksananya konsultasi dengan Pejabat Senior / Duta Besar / Special Envoy negara-negara non- ASEAN dan Organisasi regional / Internasional	2022-2025	Kemlu ; PTRI ASEAN
		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi bersama negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN dalam mengkaji modalitas mitra potensial	2022-2025	Kemlu ; PTRI ASEAN

C.2.4 Meningkatkan Kapasitas Asean Untuk Berkontribusi Dan Menanggapi Isu Internasional Kunci Yang Menjadi Perhatian Bersama

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan konsultasi dan kerja sama dalam isu-isu multilateral yang menjadi perhatian bersama untuk memproyeksikan suara ASEAN yang satu dan mengembangkan posisi bersama, dimana jika diperlukan, untuk membentuk dan mendorong isu-isu penting pada agenda global; ii. Mengembangkan waktu yang lebih tepat untuk mengeluarkan ASEAN Statement dalam isu-isu penting internasional yang menjadi perhatian bersama. iii. Meningkatkan kerja sama antara ASEAN dan organisasi multilateral lainnya pada isu-isu internasional yang relevan dan menjadi perhatian bersama; dan iv. Memperkuat koordinasi diantara Negara Anggota ASEAN dan jika memungkinkan, menyampaikan kandidat ASEAN untuk posisi-posisi penting di forum internasional.	Menyusun posisi Indonesia/ASEAN statement di tingkat leaders maupun menteri terkait isu internasional yang menjadi perhatian bersama	Dikeluarkannya berbagai ASEAN Statement di tingkat Leaders maupun Menteri terkait dengan isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama; Terintensifkannya komunikasi antara Pejabat CPR, Pejabat Senior dan Menteri Luar Negeri	2022-2025 2022-2025	Kemlu Kemlu
	Meningkatkan kerja sama antara ASEAN dan organisasi Internasional lainnya	Diselenggarakannya ASEAN-UN Informal Meeting dan CPR- UN Interface Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi bersama negara anggota ASEAN dan Organisasi Multilateral Terlaksanakannya ASEAN-UN Informal Meeting secara berkala	2022-2025 2022-2025 2022-2025	Kemlu Kemlu Kemlu

D. Memperkuat Kapasitas Dan Keberadaan Institusional ASEAN Yang Kuat

D.1 Mengarusutamakan Pekerjaan ASEAN dan Mengembangan Koordinasi Antar Badan ASEAN dan Meningkatkan Terbentuknya Hubungan Eksternal ASEAN dan Memperkuat Sekretariat ASEAN

D.1.1 Mengimplementasikan Laporan dan Rekomendasi dari High Level Task Force on Strengthening The ASEAN Secretariat And Reviewing The ASEAN Organs Sebagaimana Disepakati oleh Para Pemimpin ASEAN Di KTT ASEAN Ke-25 Di Nay Pyi Taw

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
Mengimplementasikan Laporan dan Rekomendasi dari High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs sebagaimana disepakati oleh para Pemimpin ASEAN di KTT ASEAN ke-25 di Nay Pyi Taw	Implementasi Laporan dan Rekomendasi dari High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs	Terlaksananya koordinasi internal dalam mengimplementasikan rekomendasi dari High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs	2022-2025	Kemlu
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN dalam menindaklanjuti rekomendasi dari High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs	2022-2025	Kemlu

D.2 Memperkuat Keberadaan dan Wawasan ASEAN

D.2.1 Meningkatkan Keberadaan Institusi ASEAN di Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mendorong pembentukan unit/divisi yang didedikasikan untuk ASEAN pada Kementerian / Instansi terkait di Negara Anggota ASEAN;	Meningkatkan keberadaan institusi ASEAN di tingkat nasional, regional, dan internasional	Terlaksananya koordinasi dalam negeri antar K/L (terutama yang menjadi focal point kerja sama ASEAN)	2022-2025	Setnas ASEAN Indonesia
ii. Mendorong pembentukan Lembaga / Pusat ASEAN dalam bidang kerja sama tertentu di masing-masing Negara Anggota ASEAN dengan mempertimbangkan keberlangsungan pendanaannya		Meningkatnya dukungan Pemerintah Indonesia dalam penguatan ASEAN- IPR dan Sekretariat ASEAN-IPR penguatan ASEAN-IPR dan Sekretariat ASEAN-IPR	2022-2025	Kemlu

serta fungsi efektif dan efisiensi Sekretariat ASEAN dan Organ-organ lainnya secara menyeluruh; dan iii. Mendorong pembentukan Pusat Studi ASEAN dan/atau Program Studi ASEAN di Negara Anggota ASEAN dan memfasilitasi jaringannya, serta memperkuat AUN, untuk meningkatkan kesadaran dan identitas ASEAN di tingkat regional dan internasional.		Ditunjukannya Direktur Eksekutif ASEAN-IPR periode 2021-2024 dan keberlangsungan beroperasinya Sekretariat ASEAN- IPR	2022-2025	Kemlu
		Terdorongnya kontribusi oleh Negara-negara Anggota ASEAN baik terkait pendanaan Sekretariat maupun dalam kegiatan- kegiatan ASEAN- IPR	2022-2025	Kemlu
		Meningkatnya jumlah Pusat Studi ASEAN di universitas	2022-2025	Kemlu
		Terlaksananya kegiatan seminar dan diskusi mengenai ASEAN di tingkat nasional dan ASEAN di universitas-universitas	2022-2025	Kemlu
		Terdorongnya kerja sama antara Pusat Studi ASEAN di Indonesia dengan sesama Pusat Studi ASEAN di negara anggota ASEAN lainnya	2022-2025	Kemlu

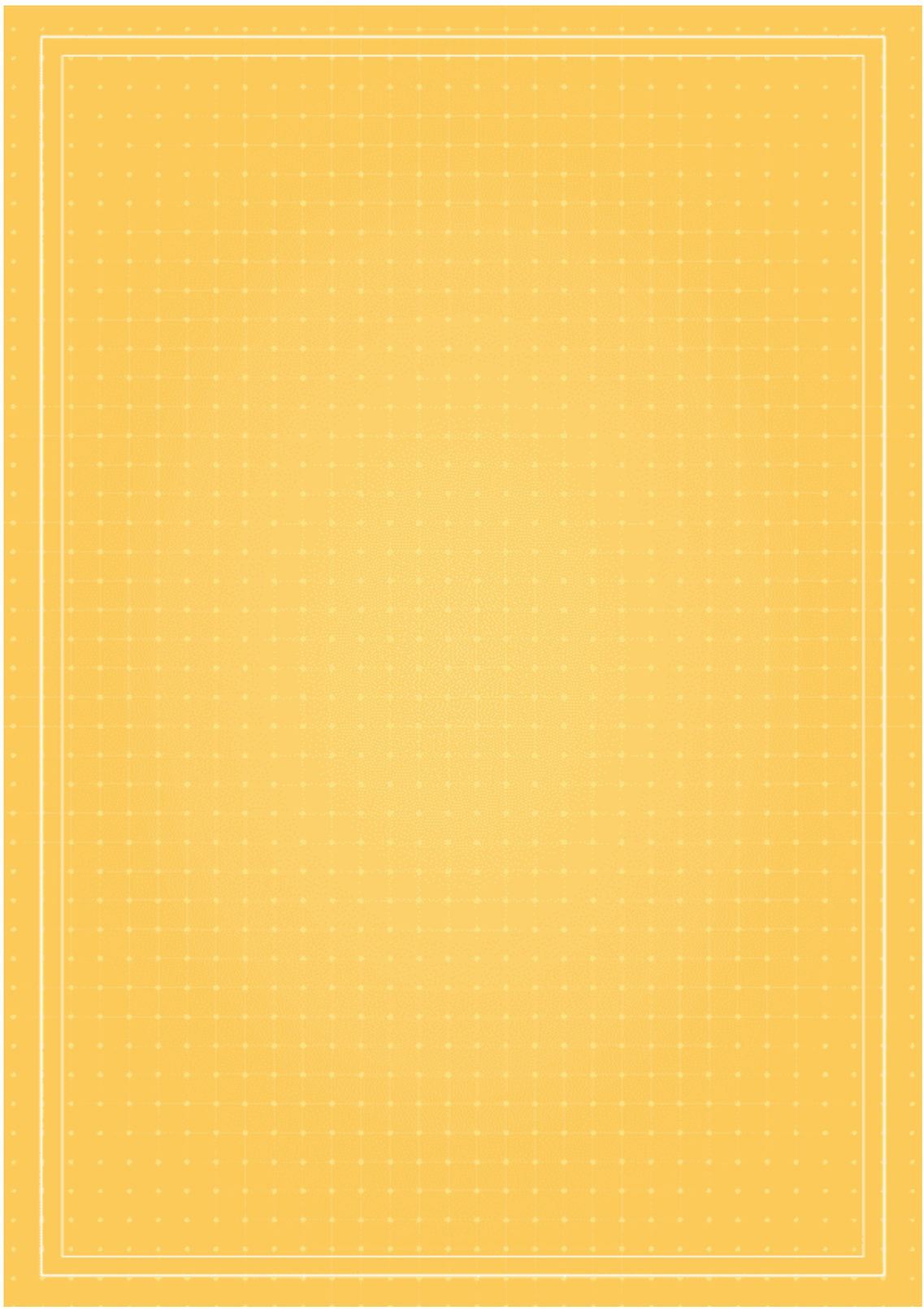
D.2.2 Meningkatkan Keberadaan dan Kesadaran terhadap ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan interaksi antara Badan sektoral ASEAN dan pemangku kepentingan yang relevan untuk meningkatkan keberadaan dan nilai ASEAN serta memperkuat koordinasi antara keduanya; ii. Mengimplementasikan ASEAN Communication Master Plan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ASEAN sebagai Community of Opportunities sebagaimana dimandatkan oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-25 di Nay Pyi Taw	Meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ASEAN	Terlaksananya diseminasi kegiatan mengenai ASEAN di seluruh Provinsi di Indonesia (melalui kerja sama dengan Pemda dan PSA setempat)	2022-2025	Kemlu
		Meningkatnya peranan Pusat Studi ASEAN	2022-2025	Kemlu
		Tersebarluaskannya publikasi mengenai ASEAN melalu media cetak, elektronik ataupun media sosial	2022-2025	Kemlu
		Termanfaatkannya peran ASEAN Foundation dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kesadaraan ASEAN di Indonesia	2022-2025	Kemlu

iii. Memastikan kegiatan dan program peningkatan kesadaran ASEAN yang peka terhadap gender dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya iv. Meningkatkan profil dan keberadaan ASEAN dan Masyarakat ASEAN di negara tuan rumah/ organisasi internasional.		Terimplementasinya dan dimanfaatkannya program AICHR Five Years Work Plan Tersosialisasinya program peningkatan kesadaran ASEAN yang inklusi (mencakup golongan minoritas)	2022-2025 2022-2025	Kemlu Kemlu


“Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN
menjadi suatu masyarakat yang bersatu, inklusif,
dan tangguh pada tahun 2025”
Visi Masyarakat ASEAN


Rp
Rencana Aksi Nasional
Pilar Ekonomi



Pilar Ekonomi



Era baru Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui pengesahan "The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community" dan "The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together" yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi sampai 2025. Deklarasi ini menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang resmi diberlakukan pada 1 Januari 2016.

Untuk mengimplementasikan Cetak Biru MEA 2025, maka ditetapkan Prioritas Tahunan (Annual Priority-AP) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing negara setiap tahunnya. Tingkat capaian implementasi AP selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi ASEAN maupun Indonesia. Tingkat capaian pada level ASEAN pada 2016 mencapai 44,7% sementara untuk Indonesia lebih tinggi yaitu 51,1%, demikian juga untuk tahun 2020 tingkat capaian ASEAN sebesar 64,7% sementara Indonesia adalah 67,9%.

Merespon hal tersebut, pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) ASEAN 2025 yang didalamnya juga memuat RAN MEA 2025. Penyusunan RAN ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan seluruh prioritas tahunan yang sudah disepakati untuk memastikan bahwa MEA 2025 dapat berjalan tepat waktu namun tetap menekankan peningkatan daya saing nasional pada berbagai bidang ekonomi. Daya saing nasional menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam memanfaatkan kerja sama ASEAN khususnya untuk memasuki era Global Value Chain (GCV).

RAN MEA 2025 disusun bersama-sama dengan 35 Kementerian/Lembaga yang menjadi pembina sektor dan K/L terkait lainnya dibawah Pilar Ekonomi memuat indikator strategis dalam Cetak Biru MEA 2025 yang kemudian diterjemahkan dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan sasaran/indikator yang terukur dalam satu periode waktu dan instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut. RAN MEA 2025 memuat secara rinci berbagai program dan rencana kerja dalam Cetak Biru MEA 2025 yang berjumlah 138 Rencana Aksi dengan target waktu yang berbeda- berbeda. RAN MEA 2025 juga merupakan salah satu langkah strategis untuk memudahkan pengawasan implementasi dari masing-masing pilar MEA 2025.

Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh

Terdapat 23 Rencana Aksi yang ditetapkan khususnya untuk mengurangi hambatan memperkuat perdagangan baik barang maupun jasa melalui berbagai fasilitas yang diberikan untuk memperkuat partisipasi negara-negara ASEAN dalam Global Value Chain khususnya peningkatan ekspor dan impor. Perbaikan lingkungan investasi juga dilakukan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi global pada beberapa sektor prioritas: manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Stabilitas dan inklusifitas sektor keuangan sebagai kunci integrasi di ASEAN serta memperluas akses jasa keuangan melalui digital platform dan sistem pembayaran real-time. Tenaga kerja juga mendapat perhatian dengan penyusunan standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan fasilitasi pergerakan tenaga kerja melalui MRA.

"Implementasi MEA 2025 dituangkan dalam Cetak Biru MEA 2025 yang terdiri dari 5 pilar utama, yaitu: (a) Ekonomi ASEAN terintegrasi dan kohesif, (b) ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis, (c) Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, (d) ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, dan (e) ASEAN yang global."

ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis

Sejumlah 24 Rencana Aksi ditetapkan untuk mewujudkan ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis melalui berbagai program kebijakan persaingan usaha yang efektif dengan memperkuat kapasitas dan mekanisme persaingan. Perlindungan konsumen menjadi bagian tidak terpisahkan dari kondisi pasar modern yang seimbang. Sektor lain yang juga mendapat perhatian adalah: penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, peningkatan inovasi berbasis teknologi, tata kelola yang baik, fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan serta perkembangan megatren global.

Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral

Ditetapkan sebanyak 56 Rencana Aksi yang difokuskan dalam bidang transportasi khususnya untuk menciptakan koridor angkutan lintas batas negara (darat, laut dan udara), pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kerja sama antar badan sektoral seperti e-commerce, energi dan mineral, pertanian dan kehutanan, pariwisata, kesehatan serta ilmu pengetahuan didorong untuk semakin baik ke depan melalui berbagai program kerja sama lintas sektoral karena saling terkait dan mendukung.

ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat

Ditetapkan sebanyak 31 Rencana Aksi yang fokus pada sektor UMKM melalui peningkatan produktivitas, daya saing, pemanfaatan teknologi, inovasi, pemasaran, serta meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan SDM. Disamping itu, penguatan sektor swasta dan peningkatan kemitraan serta kolaborasi dalam hal pembiayaan juga ditingkatkan. Keterlibatan semua pemangku kepentingan baik dari sisi pemerintah maupun non pemerintah terus ditingkatkan dalam upaya mendukung integrasi kawasan.

ASEAN yang global (Global ASEAN)

Sebanyak 4 Rencana Aksi disepakati untuk mendukung peningkatan peran ASEAN dalam perekonomian global melalui kerja sama yang lebih komprehensif yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Disamping itu, juga dilakukan reviu terhadap FTA yang sudah ada maupun meningkatkan kemitraan ekonomi dengan mitra wicara non-FTA termasuk juga dengan forum kerja sama regional dan internasional lainnya seperti APEC, ADB, WB, IMF, OECD, dan G20.

A. Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh

A.1 Perdagangan Barang

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
1. Implementasi AEC Blueprint 2015 terkait penghapusan tarif berdasarkan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan fasilitasi perdagangan telah memberikan kontribusi pada arus perdagangan barang yang lebih besar. Dalam AEC 2025, ASEAN terus berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan regulasi perbatasan dan domestik yang menghambat perdagangan, sehingga perdagangan barang yang kompetitif, efisien, dan mulus di kawasan ASEAN dapat tercapai	Implementasi ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	Review ATIGA antara lain mencakup ketentuan automatic MFN yang lebih luas, penyederhanaan ROO, dll serta penyiapan ratifikasi dan implementasinya	2022-2025	Kemendag, BKF, Kemenkeu, Kementan, BSN, LNSW dan KL terkait lainnya
		Penyelesaian Transposisi dan Implementasi penuh transposisi HS 2022	2022-2025	Kemendag, BKF, Kemenkeu, dan KL terkait lainnya
	Optimalisasi Pelaksanaan dan Penyederhanaan ROO	Penyederhanaan Certificate of Origin (CO) Form D	2022-2025	Kemendag
	Pelaksanaan National Single Windows dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan ASEAN Single Window (ASW)	Terimplementasikannya ASW di Indonesia	2022-2025	LNSW
	Pelaksanaan Kerja Sama National Trade Repositories dan ASEAN Trade Repositories	Inventarisasi dan Pembaruan database ASEAN Non Tariff Measures (NTM) untuk memastikan tercakup dalam ASEAN Trade Repository (ATR)/ National Trade Repository (NTR)	2022-2025	Kemendag ; LNSW
		Pemutakhiran konten ATR Indonesia khususnya untuk topik NTMs dengan melakukan klasifikasi NTMs Indonesia sesuai dengan standar United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).	2022-2025	Kemendag, LNSW
		Review NTMs Indonesia dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan business friendly	2022-2025	Kemenko Perekonomian, Kemendag

		Teridentifikasi NTMs negara tujuan ekspor yang berpotensi menghambat ekspor Indonesia di negara ASEAN	2022-2025	Kemendag
		Implementasi NTMs Guidelines dan GRP di seluruh K/L terkait ekspor impor serta standar dan kesesuaian	2022-2025	Kemenko Perekonomian
		Terlaksananya Kerja Sama dan Konsultasi terkait Penanganan Kasus Hambatan Ekspor dengan Negara Mitra Dialog (ASEAN +1 FTA dan kemitraan lainnya)	2022-2025	Kemendag
	Implementasi Elemen Sertifikasi Mandiri ASEAN	Memperdalam implementasi regional dari inisiatif fasilitasi perdagangan seperti program Otoritas Ekonomi Operator (Authorized Economic Operator/AEO) dan program Sertifikasi Mandiri.	2022-2025	Kemendag, *DJBC Kemenkeu
	Persiapan implementasi ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA)	Penandatanganan dan persiapan menuju implementasi ASEAN MRA on Type Approval of Automotive Products	2022-2025	Kemendag, Kementerian Perhubungan
		Penandatanganan dan persiapan menuju implementasi MRA on Building and Construction Materials	2022-2025	Kemendag, Kemenperin
		Finalisasi, penandatanganan dan persiapan menuju implementasi (proses ratifikasi) pada ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Traditional Medicines; ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Health Supplement	2022-2025	BPOM, Kemenkes

		Finalisasi, penandatangan dan persiapan menuju implementasi ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement	2022-2025	Kemendag, BPOM +Kementan, Kemenperin, Kemenkes
		Penyusunan, finalisasi dan persiapan menuju implementasi Perjanjian ASEAN Pharmaceutical Regulatory Policy (APRP); ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework (APRF)	2022-2025	BPOM, Kemenkes
		Terimplementasinya ASEAN Common Technical Dossier (ACTD)/ASEAN Common Technical Requirements (ACTR) on Drugs	2022-2025	BPOM, Kemenperin
		Terimplementasinya Mutual Recognition Arrangements (MRA) Good Manufacturing Practices (GMP) on Drugs di Indonesia	2022-2025	BPOM
		Terimplementasinya Mutual Recognition Arrangements (MRA) on Bio-equivalence (BE) Study Report	2022-2025	BPOM
		Terimplementasinya ASEAN Cosmetic Directive (ACD)	2022-2025	BPOM
		Terimplementasinya ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Inspection and Certifcation Systems on Food Hygiene for Preparred Foodstuff Products	2022-2025	BPOM, Kemenperin

A.2 Perdagangan Jasa

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
2. Melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN terus memperluas jangkauan dan mengurangi berbagai hambatan akses pasar serta national treatment lintas sektor, usaha ini serupa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh WTO. Selanjutnya ASEAN melakukan fasilitasi negosiasi dan implementasi the ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) sebagai instrument hukum.	Meratifikasi, Mengimplementasikan, dan Mereviu ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	Diratifikasinya ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) Terlaksananya ATISA di Indonesia Dilakukannya General Review terhadap ATISA	2022-2025	DPPJ Kemendag
	Optimalisasi Mekanisme untuk Menarik Investasi Asing (Foreign Direct Investment) di Sektor Jasa	Teridentifikasinya kebutuhan bersama Kementerian/Lembaga kebutuhan sektor jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait posisi runding Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Jasa dalam rangka penanaman modal asing	2022-2025 2022-2025	Deputi I Kemenko Perekonomian DPPJ Kemendag, BKPM
	Mengeksplorasi Pendekatan Alternatif untuk Liberalisasi Jasa	Dilakukannya review terhadap Peraturan Presiden tentang Daftar Negative Investasi yang disesuaikan dengan komitmen ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 10 Dibentuknya kerangka kebijakan (framework) ketentuan pembukaan akses pasar jasa keuangan Terlaksananya AFAS Paket 7 dan persiapan implementasi AFAS Paket 8 dan 9 sektor jasa keuangan Terlaksananya capacity building proses transposisi AFAS dari Positive List ke Negative List	2022-2025 2022-2025 2022-2025 2022-2025	BKF, OJK, BI BKF, Kemendag, Kemenkeu, Direktorat Deregulasi PM BKPM BKF Kemenkeu, OJK, BI BKF Kemenkeu, OJK, BI DPPJ Kemendag

A.3 Lingkungan Investasi

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
3. ASEAN bertujuan meningkatkan daya tarliknya sebagai tujuan investasi global yang terbuka, transparan dan kondusif. Melalui implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), liberalisasi dilakukan pada sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan serta layanan yang terkait dengan sektor ini yang secara signifikan memperkuat perlindungan investasi dan transparansi hukum investasi, peraturan dan pedoman administrasi.	Implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	Ratifikasi the Fourth Protocol to Amend ACIA Terwujudnya kebijakan investasi yang tidak lebih restriktif daripada yang dikomitmenkan di dalam ACIA inisiatif kerja sama di ASEAN termasuk promosi bersama ASEAN untuk menjaduikan ASEAN sebagai tujuan investasi	2022 2022-2025	Kemenko Maritim dan Investasi, BKPM, Kemendag BKPM, Kemenko Maritim dan Investasi

A.4 Integrasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Stabilitas Keuangan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
4. Memastikan bahwa sektor keuangan yang stabil dan inklusif sebagai tujuan kunci integrasi ekonomi regional. Visi integrasi sektor keuangan tahun 2025 meliputi tiga tujuan strategis, yaitu integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan, serta tiga area yang berkaitan, yakni Liberalisasi Neraca Modal, Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Akhir Transaksi, dan Peningkatan Kapasitas	Memperkuat Integrasi Sektor Keuangan Regional Melalui Implementasi ASEAN Framework Agreement on Services - Financial Services Liberalisation (AFAS - FSL)	Pengesahan dan implementasi AFAS - FSL 7-9	2022-2025	BKF-Kemenkeu, Kemendag, OJK, BI
	Penyusunan Kerja Sama Bilateral dalam kerangka ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)	Terselesaikannya Kerja Sama Bilateral dalam kerangka ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)	2020-2025	OJK, Kemenkeu
	Penguatan Kerja Sama pengawasan lintas batas terkait implementasi ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)	Terjalin Kerja Sama pengawasan lintas batas terkait implementasi ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)	2020-2025	OJK
	Mengharmonisasikan pasar modal Indonesia dengan common practice internasional untuk memfasilitasi investasi di pasar modal lintas batas ASEAN	Penerapan siklus penyelesaian transaksi di Bursa Efek yang semakin harmonized dengan bursa di negara-negara lain	2020-2025	OJK

	Mendorong Pengembangan Pasar Obligasi	Pengembangan pasar obligasi untuk investor profesional Penerbitan green bonds Pengembangan e-book building untuk penawaran umum obligasi	2022-2025 2022-2025 2022-2025	OJK OJK OJK
	Diseminasi dan Pendidikan Produk dan Jasa Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat yang Belum Terlayani untuk mendorong inklusi keuangan	Terlaksananya diseminasi dan produk dan Jasa Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat	2022-2025	OJK, Kemenkeu Bank Indonesia
	Intensifikasi Kerja Sama Pertukaran Informasi Makroekonomi antar Otoritas Fiskal dan Moneter	Terlaksananya kerja sama Pertukaran Informasi Makroekonomi antar Otoritas Fiskal dan Moneter	2022-2025	BKF Kemenkeu, BI
	Penyusunan Kajian untuk Mengadopsi Praktik dan Standar Internasional sesuai Kepentingan Nasional bagi Perbankan	Disusunnya Kajian untuk Mengadopsi Praktik dan Standar Internasional sesuai Kepentingan Nasional bagi Perbankan	2020 - 2025	OJK

A.5 Fasilitasi Pergerakan Tenaga Kerja Terampil dan kunjungan Pelaku Usaha

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
5. Fasilitasi pergerakan tenaga kerja di ASEAN, melalui MRA yang memungkinkan 8 (delapan) profesi untuk melakukan praktik di negara ASEAN lain melalui pengakuan kualifikasi dan jika dimungkinkan melalui implementasi ASEAN Qualifications Reference Frameworks (AQRF). Negara anggota ASEAN dapat secara suka rela mendukung proses life long learning, memperluas saling pengakuan dan ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP). Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi pegerakan antar batas sementara serta business visitors yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi.	Reviu Komitmen Indonesia dalam Lingkup ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP)	Terlaksananya reviu atas Komitmen Indonesia dalam Lingkup ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP)	2022-2025	Kemenaker, BNSP
	Penyusunan Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI)	Tersusunnya Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI)	2022-2025	Kemenaker, BNSP
	Penerapan Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System	Identifikasi Sektor Prioritas Sesuai CPC Request and Offer Penyusunan peta OKUPASI dalam Kerangka Kualifikasi KKNI Registrasi Standar Kompetensi Selain SKKNI ke dalam Sistem Nasional Penyusunan Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Pengembangan Sistem Data dan Informasi Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dapat diakses Publik	2022-2025	Kemenaker, BNSP

A.6 Meningkatkan Partisipasi dalam GVC

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
6. Memperkuat partisipasi GVC negara-negara anggota ASEAN, baik melalui penghapusan pembatasan formal (akses pasar dan tindakan diskriminasi) atau fasilitasi perdagangan dan penyesuaian peraturan yang lebih baik.	Fasilitasi perdagangan yang berfokus pada impor dan ekspor	Pembangunan Sistem Logistik Nasional yang optimal Tersedianya bahan baku dan bahan penolong industri Meningkatnya harmonisasi dengan standar internasional dan dukungan terhadap pengembangan kapasitas untuk standar kepatuhan	2022-2025	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,Deputi V Kemenko Perekonomian

	Kolaborasi antara Instansi Pemerintah (G2G), instansi Pemerintah dan Bisnis (G2B), serta Bisnis dan Bisnis (B2B) melalui National Logistic Ecosystem (NLE)	Terlaksananya kolaborasi layanan logistik yang optimal	2022-2025	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,Deputi V Kemenko Perekonomian

B. ASEAN Yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis

B.1 Kebijakan Persaingan yang Efektif

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
7. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif dengan pasar yang berfungsi dengan baik, operasional dan efektif, dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam persaingan bagi semua perusahaan, terlepas dari kepemilikan. Peraturan persaingan yang sehat dilaksanakan dengan cara memfasilitasi liberalisasi pasar yang terpadu dan berbasis produksi, serta mendukung pembentukan wilayah yang lebih kompetitif dan inovatif.	Melaksanakan Peer Review Persaingan Usaha dengan Negara ASEAN	Terlaksananya peer review terhadap negara anggota ASEAN	2022-2025	KPPU
	Penyusunan dan Implementasi Procedures for Joint Investigations and Decision on Cross-Border Cases	Tersusun dan Terimplementasikannya Procedures for Joint Investigations and Decision on Cross-Border Cases	2022-2025	KPPU
	Penyusunan ASEAN Competition Business Perception Index (ACBPI) untuk mengukur tingkat awareness pelaku usaha di ASEAN terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha	Dilaksanakannya Country Survey bagi penyusunan ASEAN Competition Business Perception Index (ACBPI)	2024	KPPU
	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas di bidang persaingan usaha bagi otoritas di ASEAN	Meningkatnya kapasitas otoritas persaingan dalam melakukan implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha	2022-2025	KPPU
	Mempertahankan dan mengembangkan Web Portal Persaingan Usaha sebagai pusat informasi online bagi pemangku kepentingan di ASEAN	Dikembangkannya Web Portal Persaingan Usaha sebagai pusat informasi online	2022-2025	KPPU

B.2 Perlindungan Konsumen

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
8. Perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fair market place yang modern, efektif dan efisien, penting agar konsumen dapat meminta akses informasi yang memudahkan mereka untuk membuat pilihan, dalam hal ganti rugi yang efektif, produk dan jasa yang sesuai standard dan keamanan. Peningkatan perdagangan lintas batas, penggunaan e-commerce dan berbagai metode perdagangan baru hasil globalisasi dan kemajuan teknologi membuat pemerintah perlu menemukan kebijakan inovatif untuk melakukan perlindungan dan menunjukan kepentingan konsumen. Hal ini membutuhkan sistem proteksi konsumen nasional yang komprehensif dan berfungsi baik melalui legislasi yang efektif, mekanisme pemulihan dan berorientasi publik.	Penyusunan dan Implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2021-2025	Tersusunnya dan Terimplementasinya Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2020-2024. Tersusunnya dan Terimplementasinya Rencana Aksi Perlindungan Konsumen.	2021-2025	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag
	Implementasi ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) & ASEAN Handbook on Consumer Protection	Terimplementasinya ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) & ASEAN Handbook on Consumer Protection	2021-2025	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag
	Penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen	Meningkatnya jumlah penanganan pengaduan konsumen	2021-2025	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag
	Penyelenggaraan Diseminasi dan Peningkatan Kapasitas Terkait Keberdayaan dan Hak serta Kewajiban Konsumen	Meningkatnya jumlah konsumen yang mengerti hak dan kewajibannya Meningkatnya jumlah media informasi perlindungan konsumen Meningkatnya pengetahuan dan pemahanan konsumen Meningkatnya keterampilan SDM Perlindungan konsumen (PK)	2021-2025	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kemendag

B.3 Penguatan Kerja Sama Hak Kekayaan Intelektual

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
9. Hak Kekayaan Intelektual memiliki perang penting dalam memberikan kontribusi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan sosial-ekonomi di tingkat nasional dan regional. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) merupakan bagian penting bagi Anggota ASEAN untuk peningkatan kapasitas teknologi, mendorong transfer teknologi serta penumbuhan inovasi dan kreativitas.	Memperkuat Kelembagaan Kekayaan Intelektual (KI) dan membangun infrastruktur KI	Meningkatnya layanan KI, terutama di bidang paten, merek dan desain industri, indikasi geografis. Perbaikan informasi layanan Paten terhadap masyarakat melalui website Ditjen Kekayaan Intelektual	2022-2025 2022-2025	Kemenperin, KemkopUKM Kemenkum HAM Kemenkum HAM

B.4 Pertumbuhan yang didorong Produktifitas, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan, dan Komersialisasi Teknologi.

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
10. Daya saing ASEAN jangka panjang terletak pada peningkatan Produktivitas kerja secara signifikan termasuk peningkatan performance total produktivitas yang tersambung dalam GVCs. Sehingga ASEAN perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan adapsi dan difusi terhadap teknologi yang berkembang berbasis inovasi. Maka pengembangan SDM yang mumpuni dan R&D termasuk penguatan ekosistem institusi dan kebijakan yang mendukung hal tersebut perlu ditingkatkan. 11. Melakukan promosi inovasi nasional, termasuk pengembangan mekanisme cross-border di berbagai bidang.	Pembinaan Pembangunan Science Techno Park (STP)	Terselenggaranya Pembinaan pembangunan Science Techno Park yang optimal	2022-2025	Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelaksanaan kegiatan World Class University Program	Terlaksananya Program World Class University Program	2022-2025 *selesai 2020	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan K/L terkait

B.5 Kerja Sama Perpajakan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
12. Kerja sama perpajakan berfungsi sebagai salah satu elemen kunci untuk mendukung daya saing regional di ASEAN dengan mengatasi masalah hambatan fiskal. Beberapa tindakan berkelanjutan dan di masa depan telah dilakukan	Implementasi dan Pembaharuan Double Tax Agreement (DTA) dengan Negara-Negara ASEAN	Terimplementasinya DTA Bilateral dengan Myanmar Pembaharuan dan peningkatan DTA versi lama dengan AMS lainnya	2022-2025	Kemenkeu
	Pembahasan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di ASEAN untuk Menjamin Kesehatan Fiskal	Terimplementasinya Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di Indonesia secara optimal	2022-2025	Kemenkeu
	Meningkatkan kolaborasi kerja sama Exchange of Informasi (EOI) dengan seluruh ASEAN Member States (AMS)	Terlaksananya kerja sama Exchange of Informasi (EOI) dengan seluruh ASEAN Member States (AMS)	2022-2025	Kemenkeu

B.6 Tata Kelola yang Baik

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
13. ASEAN memahami urgensi dari tata kelola yang baik (good governance) yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dinamis	Memperkuat Kemitraan Multi Pihak (KMP) dalam kerja sama pembangunan	Menguatnya mekanisme KMP dalam kerja sama pembangunan	2022-2025	Dir. Polugri KPI Bappenas

B.7 Peraturan yang Efektif, Efisien, Koheren dan Responsif, serta Praktik Regulasi yang Baik

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
14. Peraturan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi dan perilaku usaha. Dorongan menuju kawasan ASEAN yang tumbuh dengan kuat, kompetitif, dinamis, dan inovatif memerlukan adanya regulasi yang non-diskriminatif, pro- kompetitif, efektif, koheren serta memberikan peluang bagi tumbuhnya wira usaha. Hal-hal tersebut menuntut para pembuat kebijakan/regulator untuk selalu responsif, akuntabel serta menerapkan praktek- praktek regulasi yang baik dalam penyusunan regulasi. Oleh karenanya implementasi GRP dalam penyusunan peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa AMS secara efektif dapat mengidentifikasi masalah sekaligus meminimalkan biaya kepatuhan (compliance), serta mengurangi distorsi dan inkonsistensi yang timbul dari berbagai regulasi.	Menyelesaian dan Implementasi RUU Hukum Perdata Internasional dan RUU Pengesahan Contract for International Sale of Goods (CISG)	Terimplementasi UU HPI secara optimal Terimplementasi UU Pengesahan Contract for International Sale of Goods secara optimal	2022-2025	LNSW, Kemenkeu, KemenkumHam, BKPM, Kemenko Perekonomian,
	Meningkatan Kapasitas Web Single Portal Peraturan Peundang-Undangan INR/ATR di Sistem INSW	Meningkatnya Kapasitas Web Single Portal Peraturan Peundang-Undangan INR/ATR di Sistem INSW	2022-2025	LNSW

B.8 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
15. ASEAN memahami pentingnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagai bagian integral strategi pertumbuhan kawasan. Termasuk di dalamnya perlindungan lingkungan dan Sumber Daya Alam, pengembangan energi hijau, energi terbarukan serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mendukung perencanaan nasional.	Terpenuhinya capaian optimal dari target Energi Baru Terbarukan dalam RENSTRA 2020-2024	Tercapainya target-target EBT dalam RENSTRA 2020-2024	2020-2024	Kemen ESDM
	Pengembangan Kerangka Kerja Pembangunan Rendah Karbon	Peningkatan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dan Green Climate Funds (GCF)	2022-2025	KLHK ; BKF

		Terlaksananya kerja sama internasional untuk mendukung pembiayaan teknologi rendah emisi yang lebih terjangkau (CCT, CCS, dll)	2022-2025	Deputi II Kemenko Perekonomian, Kemen ESDM, Kemen PUPR.
		Terselenggarakannya program-program energi yang sejalan dengan Nationally Determined Contributions (NDCs)	2022-2025	Kemen ESDM
	Penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	2022-2025	KLHK
	Pengembangan industri berbasis kehutanan	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	2022-2025	KLHK

B.9 Megatren Global dan isu-isu Terkait Perdagangan yang mengemuka

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
16. ASEAN perlu membangun dan menjaga hubungan industrial untuk memfasilitasi investasi bagi pekerja dan perusahaan sebagai pusat pembelajaran guna peningkatan industri dan pengelolaan penyesuaian tenaga kerja dalam proses integrasi ASEAN. Hal ini mencakup proses dialog sosial secara mendalam mengenai tanggung jawab bersama dan peningkatan sinergitas yang lebih kuat antara perusahaan, pekerja dan pemerintah guna memastikan daya saing, dinamika dan inklusivitas negara- negara anggota ASEAN yang lebih baik.	Fasilitasi investasi bagi pekerja dan perusahaan sebagai pusat pembelajaran guna peningkatan industri dan pengelolaan penyesuaian tenaga kerja dalam proses integrasi ASEAN	Terlaksananya fasilitasi investasi bagi pekerja dan perusahaan di Indonesia	2020-20254	Kemendag

C. Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral

C.1 Transportasi

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
17. Memperluas dan memperbesar konektivitas, efisiensi, integrasi, keselamatan dan keberlanjutan transportasi ASEAN untuk memperkuat daya saing ASEAN dan mendorong kawasan pertumbuhan dan perkembangan yang inklusif serta mendorong kerja sama transportasi ASEAN yang fokus di bidang transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut dan fasilitasi transportasi, dan untuk merangkul transportasi berkelanjutan sebagai fokus sektoral baru yang penting karena memiliki peran penting untuk dimainkan dalam keberlanjutan pengembangan kawasan ASEAN	Membangun Jaringan Transportasi Darat Guna Meningkatkan Integrasi Infrastruktur Kawasan	Meningkatnya integrasi infrastruktur transportasi darat Pengembanganan koridor Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)	2022-2025	Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenko Maritim, Kemen BUMN
	Optimalisasi ASEAN Single Aviation Market (ASAM) guna meningkatkan infrastruktur transportasi udara di kawasan	Meningkatnya efisiensi dan kapasitas manajemen lalu lintas udara dan konektivitasnya	2022-2025	Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenko Maritim, Kemen BUMN
	Memperkuat konektivitas maritim kawasan melalui pembentukan kerja sama transportasi maritim kawasan (ASEAN Singgle Shipping Market) dan implementasi konvensi International Maritime Organization (IMO)	terlaksananya Dukungan terhadap pembentukan ASEAN Single Shipping Market. Meningkatnya dan memantau KPI pada efisiensi pelabuhan. Meningkatnya kapasitas 47 pelabuhan yang ditunjuk. Terbentuknya kerja sama dengan mitra dialog dan mitra lainnya untuk menyelesaikan kesepakata di bidang transportasi laut.	2022-2025	Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenko Maritim, Kemen BUMN
	Mengimplementasikan Kerangka Kerja Sama ASEAN di Bidang Transportasi	Terimplementasinya Kerja Sama ASEAN di Bidang Transportasi: (1) ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT), (2) The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST) (3) The ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)	2022-2025	Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenko Maritim, Kemen BUMN

		(4) The ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Transport Passengers by Road Vehicles (CBTP)		
	Merumuskan kerangka kerja kebijakan kawasan untuk mendukung transportasi berkelanjutan	Tersusunnya kerangka kerja kebijakan moda transportasi rendah emisi dan efisiensi energi dan inisiatif transportasi yang mudah digunakan di Indonesia Pemanfaatan energi terbarukan sebagai moda transportasi di indonesia	2022-2025	Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenko Maritim, Kemen BUMN

C.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
18. Teknologi informasi dan Komunikasi yang kuat dan konektivitas yang mendalam di ASEAN akan memfasilitasi terbentuknya lingkungan bisnis yang kondusif yang menarik dan mempromosikan perdagangan, investasi dan kewirausahaan. ASEAN perlu melanjutkan prioritas untuk menjembatani digital gap dan memastikan seluruh komunitas dan bisnis dapat memperoleh keuntungan dari pengadopsian Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berbasis TIK berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga.	Terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berbasis TIK	2022-2025	Kemenkominfo, Kemendag, Kemenkeu
	Pengembangan SDM bidang TIK melalui Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Nasional Kerja Indonesia (SKKNI) Bidang Kominfo	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kominfo	2022-2025	Kemenkominfo

C.3 E-Commerce

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
19. E-commerce memiliki peran penting tidak hanya dalam perdagangan lintas batas tapi juga memfasilitasi investasi melalui jasa intermediary. E- commerce juga teah mengurangi hambatan perdagangan secara signifikan dan mendatangkan keuntungan bagi UMKM. Oleh karenanya ASEAN perlu meningkatkan kerja sama dengan dasar Pasal 5 E-ASEAN Framework Agreement yang diadopsi November 2000 dengan tujuan menyusun ASEAN Agreement on E- commerce untuk memfasilitasi transaksi e-commerce lintas batas	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	Terimplementasinya Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	2022-2025	Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagannngan
	Implementasi Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	Terimplementasinya Implementasi Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	2022-2025	Kemenkominfo dan Kementerian Keuangan
	Penyusunan dan Implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.	Tersusunnya dan terimplementasinya UU Perlindungan Data Pribadi	2022-2025	Kemenkominfo dan Kemenko Polhukam

C.4 Energi

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
20. Rencana Aksi Kerja Sama Energi ASEAN (APAEC) 2016-2025 akan diimplementasikan dengan tema "Meningkatkan Konektivitas Energi dan Intergrasi Pasar di ASEAN Demi Mencapai Ketahanan Energi, Aksesibilitas, Keterjangkauan dan Keberlanjutan Bagi Semua" dalam dua fase yaitu fase pertama dimulai tahun 2016-2020 dan fase kedua dimulai tahun 2021-2025.	Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik di Kalimantan dan Sumatera	Terbangunnya pembangkit tenaga listrik di Kalimantan dan Sumatera sesuai kebutuhan	2022-2025	Kementerian ESDM, Kemen BUMN
	Implementasi Kerja Sama ASEAN Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)	Terimplementasinya Kerja Sama ASEAN Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)	2022-2025	Kementerian ESDM, Bappenas, Kemen PUPR. Kemenko Perekonomian
	Membangun infrastruktur transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan akses energi	Meningkatnya akses tenaga listrik dalam negeri dan potensi perdagangan listrik lintas negara melalui pembangunan transmisi tenaga listrik di Kalimantan dan Sumatera	2022-2025	Kementerian ESDM

	Melakukan pemantauan dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan studi ASEAN inyterconection master plan study (AIMS) III Status:AIMS-III sedang tahap finalisasi dan telah dilaporkan oleh HAPUA ke AMEM-38 2020	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan studi AIMS- III	2022-2025	Kemenko Maritim dan Investasi, Kemen ESDM, Kemen BUMN
	Membangun basis data dan informasi terkonsolidasi terkait infrastruktur gas di ASEAN.	a. Adanya Basis data dan informasi infrastruktur gas di kawasan ASEAN yang terkonsolidasi b. Pembentukan ASEAN Energy Database System (AEDS)	2022-2025	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR
	Diseminasi Teknologi Batu Bara Bersih/Clean Coal Technologi (CCT)	Terlaksananya diseminasi teknologi batu bara bersih/clean coal technologi kepada sektor batu bara di Indonesia	2023	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR
	Meningkatkan partisipasi AMS dalam Pengembangan ASEAN Coal COE di Indonesia.	Disetujuinya TOR pendirian Centre of Excellence (COE) oleh AMS Persiapan Pendirian dan Operasionalisasi ASEAN Coal COE	2022-2025	Kementerian ESDM
	Mengurangi intensitas energi di Indonesia	Diterapkannya manajemen energi dan audit energi di sektor Industri dan Bangunan Gedung. Terlaksananya promosi EE&C project baik skala nasional maupun internasional Terimplementasikan skema aturan Green Building Code ASEAN Meningkatnya kesadaran publik terhadap hemat energi Meningkatnya standar efisiensi bahan bakar kendaraan sesuai standar ASEAN Diterapkannya manajemen transportasi untuk penghematan energi	2022-2025	Kementerian ESDM Kementerian ESDM Kementerian ESDM, Kementerian PUPR

	Meningkatkan Komponen Energi Terbarukan dalam ASEAN Energy Mix (Total Penyediaan Energi Primer)	Terlaksananya koordinasi dan kerja sama dengan universitas untuk mempromosikan kerja sama, pengembangan teknologi, sharing fasilitas riset dan pertukaran serta mobilitas peneliti bidang Renewable Energy (RE). Terlaksananya pembiayaan proyek RE. Meningkatnya kapasitas terkait penyiapan regulasi, R&D teknologi dan bisnis model dalam rangka pemenuhan kebutuhan biofuel sebagai bahan bakar di Indonesia. Terimplementasinya mandatory B40 (Biodiesel 40%) sesuai Permen ESDM No. 12/2015	2022-2025	Kemen ESDM
	Optimalisasi Kerja Sama di Bidang Energi Nuklir Sipil di ASEAN	Terlaksananya penguatan kerjasama peningkatan kapasitas dan kelitbangan di bidang nuklir	2022-2025	Kementerian ESDM

C.5 Pangan, Pertanian dan Kehutanan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
21. Integrasi yang lebih dalam di sektor Food, Agriculture, Forestry FAF di kawasan dan dunia dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: i. Meningkatkan fasilitasi perdagangan dan integrasi ekonomi ii. Memperkuat kerja sama dan kapasitas produksi berkebelanjutan iii. Meningkatkan produktivitas pertanian	Menyusun pedoman ASEAN untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab di sektor pertanian dan perikanan	Tersusunnya pedoman ASEAN untuk Promosi Investasi di sektor Pertanian dan Perikanan	2022-2025	Kementan, KKP, Kemenristek/BRIN
	Optimalisasi Mekanime Kerangka Public-Private Partnership Regional (PPP) Sektor Pertanian dan Perikanan	Peningkatan PPP pada produksi dan pemrosesan kopi menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan	2022-2025	Kementan, KKP, BKPM

iv. Meningkatkan investasi di sektor pertanian dan teknologi, dan v. Memastikan keterlibatan produsen pertanian dalam proses globalisasi	Meningkatkan produksi pangan komoditas strategis dan Ternak	Meningkatnya produksi ternak Meningkatnya produksi hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan peningkatan ekspor melalui pengembangan kawasan hortikultura berbasis korporasi	2022-2025	Kementan
	Mengembangkan Model Kelembagaan Petani, UKM, dan Lembaga Permodalan dalam meningkatkan usaha sektor pertanian dan perikanan	Terbentuknya Model Kelembagaan Petani, UKM, dan Lembaga Permodalan dalam meningkatkan usaha sektor pertanian dan perikanan	2022-2025	Kementan, KUKM
	Mensosialisasikan Good Agricultural Practices (GAP) Kepada Masyarakat	Tersosialisasiknannya Good Agricultural Practices (GAP) Kepada Masyarakat	2022-2025	Kementan
	Penerapan Internet of Things (IoT) di Sektor Pertanian	Diterapkannya Internet of Things (IoT) pada praktek pertanian termasuk diseminasi dan manajemen pengelolaan hasil pertaniannya.	2022-2025	Kementan
22. ASEAN Standard on Organic Agriculture (ASOA)	Pembentukan Kerja Sama Riset Pertanian dengan Negara Anggota ASEAN	Terlaksananya kerja sama Riset Pertanian dengan Negara Anggota ASEAN	2022-2025	Kementan
	Harmonisasi SNI Pertanian Organik dengan ASEAN Standard on Organic Agriculture (ASOA)	Terdapat harmonisasi SNI Pertanian Organik dengan ASEAN Standard on Organic Agriculture (ASOA)	2022-2025	Kementan
23. Meningkatkan produksi pangan, perikanan/ akuakultur;	Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perikanan Budidaya	(1) Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern (2) Penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar,dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;	2022-2025	KKP

		(3) Pengembangan pakan ikan mandiri yang murah dan berkualitas menggunakan bahan baku lokal; (4) Akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif; (5) Membangun sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi; (6) Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya serta pendampingan teknis		
	Mengharmonisasikan Standar dan Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida ASEAN dengan SNI untuk Mengatasi NTMs dan NTBs	Harmonisasi Standar dan Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida ASEAN dengan SNI untuk Mengatasi NTMs dan NTBs	2022-2025	Kementan
	Optimalisasi Kerja Sama dan Harmonisasi Terkait Sanitary and Phytosanitary (SPS) dengan Negara-Negara ASEAN	Terlaksananya Kerja Sama dan Harmonisasi Terkait Sanitary and Phytosanitary (SPS) dengan Negara-Negara ASEAN	2022-2025	Kementan
	Mengimplementasikan ASEAN Integrated Food Security (AIFS) dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS)	Terimplementasinya ASEAN Integrated Food Security (AIFS) dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS)	2022-2025	Kementan

	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2022-2025	Kementan
	Mewujudkan produksi perikanan dan distribusi yang merata	Terdistribusinya Perikanan yang Merata Melalui Peningkatan Fasilitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan	2022-2025	KKP
	Sinkronisasi tata ruang perikanan budidaya sesuai Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, jenis komoditas, dan kesesuaian lahan	Tata Ruang Perikanan Budidaya yang sesuai dengan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),	2022-2025	KKP
	Penerapan Budidaya Perikanan Berwawasan Lingkungan	(1) Diterapkannya Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) (2) Digunakannya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (3) Digunakannya Recirculation Aquaculture System (RAS) (4) Penggunaan pakan dan obat ikan yang sesuai ketentuan (managemen pakan), (5) Pengendalian resistensi anti mikroba (Antimicrobial resistance) (6) Pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi (7) Pengendalian ikan berbahaya dan/atau ikan merugikan.	2022-2025	KKP
	Meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi sumber daya perikanan budidaya	1. Meningkatkan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi di semua tipologi ekosistem yaitu air tawar, payau, dan laut; untuk domesti dan peningkatan devisa negara;	2022-2025	KKP

		2. Inovasi usaha perikanan budidaya dengan teknologi 4.0 (contoh: auto Feeder, investasi Digital, sistem pemantauan/monitoring, sistem pengendalian singga pemanfaatan teknologi digital untuk mengefisienskan mata rantai pasok. 3. Pemanfaatan teknologi digital pada unit budidaya ikan 4. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan; 5. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produksi perikanan budidaya	2022-2025	KKP
	Meningkatkan Produktivitas Usaha Hutan Produksi	Meningkatnya perencanaan pengelolaan hutan produksi Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman Meningkatnya produksi HHBK dan Inwenstasi Usaha Jasa Lingkungan	2022-2025	KLHK
	Pelaksanaan Perhutanan Sosial	Meningkatnya luas areal hutan yang dikelola masyarakat Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial	2022-2025	KLHK

C.6 Pariwisata

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
24. Visi AEC 2025 di bidang pariwisata adalah mengupayakan kawasan ASEAN menjadi daerah tujuan yang unik, keragaman pengalaman dan memiliki semangat kuat untuk mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan dan responsif.	Meningkatkan promosi destinasi wilayah subregional dalam kerangka kerjasama IMT-GT dan BIMP EAGA sebagai single destination.	Meningkatnya promosi dan Pemasaran ASEAN melalui kampanye Asia Tenggara sebagai tujuan wisata tunggal	2022-2025	Kemenparekraf
	Meningkatkan Kerja Sama dengan Negara Anggota ASEAN, khususnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia, dalam Pengembangan Produk Wisata Lintas Batas (yaitu : Fishing, Paramotor, Geopark, MICE (MICE in cross border), MICE in Cross Border.) Mendukung Visi ASEAN dalam hal pengembangan destinasi yang berkualitas dengan mengedepankan keanekaragaman dan keunikan pengalaman berwisata	Produk Pariwisata Indonesia yang terdiversifikasi dengan produk pariwisata di Kawasan	2022-2025	Kemenparekraf
	Menarik Investasi di Sektor Pariwisaya Melalui Penerbitan Portofolio Investasi	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	2022-2025	Kemenparekraf
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata	Meningkatknya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata	2022-2025	Kemenparekraf
	Membangun Infrastruktur Konektivitas dan Amenitas Pendukung di Destinasi Pariwisata Prioritas Pembangunan infrastruktur Udara (Bandara) dan Darat (Jalan Tol) di 10 Destinasi Prioritas juga Amenitas pendukung lainnya seperti air, listrik dan jaringan internet	Meningkatnya konektivitas, infrastruktur destinasi pariwisata serta amenitas pendukungnya	2022-2025 2022-2025	Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf Kemenhub, Kemenparekraf
	Mewujudkan pola pariwisata ASEAN yang lebih inklusif dan berkelanjutan	Terjalinnya sinergi unsur pentahelix, (Pemerintah, Pelaku Bisnis, Akademisi, Komunitas dan Media) dalam pembangunan pariwisata	2022-2025	Kemenparekraf

	Pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok	2022-2025	KLHK

C.7 Kesehatan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
25. ASEAN akan terus mengembangkan industri layanan kesehatan yang kuat,yang berkontribusi pada fasilitas, produk, dan layanan kesehatan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas di wilayah tersebut, yang mencakup pengetahuan dan pengobatan tradisional, dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan sumber daya genetik yang efektif, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (GRTKTCE).	Mempromosikan Investasi PPP Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan	Tersedianya sektor penyedia fasilitas kesehatan dengan investasi PPP untuk layanan kesehatan sesuai komitmen di Kawasan.	2022-2025	Kemenkes
	Implementasi kompetensi inti & standar praktik dokter gigi Indonesia sesuai dengan standar kompetensi minimum dokter gigi ASEAN	Penyusunan Kompetensi Inti dan Standar Praktik Dokter Gigi Terimplementasinya kompetensi inti & standar praktik dokter gigi Indonesia sesuai dengan standar kompetensi minimum dokter gigi ASEAN	2022-2025	Kemenkes
	Implementasi kompetensi perawat Indonesia yang telah disesuaikan dengan 5 (lima) kompetensi inti perawat ASEAN kepada pemangku kepentingan terkait.	Dilaksanakannya Reviu Kompetensi Perawat Nasional Terhadap 5 (lima) Kompetensi Inti Perawat ASEAN Penetapan dan sosialisasi kompetensi perawat Indonesia yang telah disesuaikan dengan 5 (lima) kompetensi inti perawat ASEAN kepada pemangku kepentingan terkait.	2022-2025	Kemenkes, Kemendag, Kemendikbud
	Implementasi kerangka kebijakan regional di bidang layanan kesehatan di Indonesia	Terimplementasinya ASEAN Medical Device Directive (AMDD)	2022-2025	Kemenkes

	Penguatan TIK untuk mendukung pengembangan konsep e-Health	Menguatnya TIK untuk mendukung pengembangan konsep e-Health	2022-2025	Kemenkes
	Fasilitasi Mobilitas Tenaga Kesehatan Indonesia dalam Kerangka ASEAN MRA	Tersedianya rencana kebutuhan dan rencana pengembangan tenaga kesehatan. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi dokter/dokter gigi spesialis melalui kegiatan alih iptekdok menguatnya pengaturan dan implementasi regulasi terkait dengan evaluasi kompetensi dan adaptasi bagi dokter lingkup ASEAN.	2022-2025	Kemenkes dan Kemendag

C.8 Mineral

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
26. Kerjasama Mineral ASEAN dalam Rencana Aksi 2016-2025 (AMCAP-III) akan dilaksanakan dalam dua fase, Fase I 2016-2020 dan Fase II 2021-2025, bertujuan menciptakan sektor mineral ASEAN yang dinamis dan kompetitif untuk kesejahteraan masyarakat ASEAN melalui peningkatan perdagangan dan investasi,dan memperkuat kerja sama dan kapasitas pembangunan mineral berkelanjutan di wilayah tersebut	Operasionalisasi ASEAN Mineral Database and Information System (AMDIS)	Tersusunnya ASEAN Mineral Database and Information System (AMDIS)	2022-2025	Kementerian ESDM

C.9 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
27. ASEAN menyadari bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya saing ekonomi kawasan perlu didukung oleh ketersediaan Science, Technology and Innovation. Dalam hal ini APASTI menjadi referensi penting.	Penguatan Perluasan Mobilitas Ilmuwan dan Peneliti Indonesia di kawasan	Terfasilitasinya mobilitas ilmuwan dan peneliti Indonesia ke negara-negara ASEAN	2022-2025	Kemenristek/BRIN
	Peningkatan Kapasitas Kerjasama Program ASEAN Citation Index (ACI)	Terimplementasinya Peningkatan Kapasitas Kerjasama Program ACI	2022-2025	Kemenristek/BRIN
	Peningkatan Kapasitas Kerja Sama Program 4IR: Implementasi Artificial Intelligence pada Bidang Pertanian, Energi, Keamanan Siber dan Industri Kreatif	Terimplementasinya Kapasitas Kerja Sama Program 4IR: Implementasi Artificial Intelligence pada Bidang Pertanian, Energi, Keamanan Siber dan Industri Kreatif	2022-2025	Kemenristek/BRIN

D. ASEAN yang Berdaya Tahan, Inklusif, Berorientasi Pada Rakyat, dan Berpusat Pada Rakyat

D.1 Memperkuat Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
28. Program UMKM yang lebih terstruktur dan terarah akan dilembagakan untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan daya tahan UMKM yang lebih besar dari manfaat dari integrasi ASEAN serta inisiatif menuju peningkatan kondusif. Dukungan kebijakan UMKM dan langkah- langkah terkait pasar yang disempurnakan diperlukan untuk mendukung tujuan ini, dan untuk mendorong produktivitas UMKM dan inovasi serta pengembangan yang inklusif dan adil, dan peluang berbasis gender untuk usaha mikro dan UKM.	Pembentukan 'Factory Sharing' Berstandar Internasional bagi UMKM	Terbentuknya 'Factory Sharing' Berstandar Internasional bagi UMKM	2022-2025	Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendag
	Standardisasi Internasional produk UKM	Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Manajemen Mutu UMKM untuk Kebutuhan Ekspor	2024	Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendag
	Melaksanakan Pelatihan Bagi UMKM untuk Menembus Pasar Global	(1)Terlaksananya Coaching UMKM yang sesuai dengan standar internasional (2) Terlaksananya kerja sama lembaga internasional untuk pengembangan produk dan pemasaran yang optimal	2024	Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendag

	Mengadaptasi Konsep Taobao untuk Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan dan Inovasi UMKM	Terbentuknya ekosistem kewirausahaan di seluruh provinsi	2022-2024	Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendag
	Meningkatkan Akses Pembiayaan (Bank - Non Bank) Bagi UMKM	Persentase KUKM yang Memperoleh Pembiayaan Perbankan dan Non Bank	2022-2024	Deputi I Kemenko Perekonomian, supporting: BI, OJK
	Optimalisasi SMESCO dalam Mendorong Ekspor UMKM	Persetase UKM Ekspor yang Memanfaatkan SMESCO WTC	2022-2024	Kemenkop UKM
	Pengembangan Jaringan Outlet UMKM (Sarinah, Bandara, Rest Area, dan Koperasi)	Persentase Produk UMKM yang dipasarkan melalui jaringan outlet Sarinah, bandara, rest area dan koperasi	2022-2024	Kemenkop UKM
	Meningkatkan Pemanfaatan E-Commerce sebagai Sarana Pemasaran UMKM	Persentase UKM Formal yang Memanfaatkan Teknologi Digital dalam Pemasaran	2024	Kemenkop UKM, Kemendag
	Optimalisasi Kerjasama Ekonomi Bilateral dan Multilateral ekspor UMKM	Meningkatnya ekspor UKM sebesar 15% per tahun di negara-negara yang memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia Terbentuknya wadah / Pusat konsultasi kebijakan UKM	2024 2022-2024	Kemenkop UKM Kemenkop UKM
	Pembentukan Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi Bagi UMKM	Terbentuknya Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi Bagi UMKM	2022-2024	Kemenkop UKM
	Pemberian Fasilitasi UMKM untuk Memperoleh Sertifikasi Produk (HaKI, Sertifikat Halal, Merek, hak Cipta, SNI/HACCP/S- PIRT, Izin BPOM dll)	Jumlah KUKM yang Memperoleh Sertifikasi	2022-2024	Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenperin
	Optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	Pengelolaan hutan berkelanjutan	2022-2025	KLHK
	Peningkatan regulatory assistance dalam pengembangan Makanan	Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	2022-2024	BPOM

	Peningkatan regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik yang menerapkan standar obat tradisional dan kosmetik	2021-2024	Kemenkop UMKM, BPOM
	Penyelenggaraan forum komunikasi lintas sektor untuk kemudahan dan percepatan perizinan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik	Persetanse lintas sektor dan pemerintah daerah yang mendukung kemudahan dan percepatan perizinan UMKM Obat Tradisiomnal dan Kosmetik	2021-2024	Kemenkop UMKM, BPOM, BKPM, Kemenperin, Kementerian PUPR
	Optimalisasi dukungan ekspor dan perlindungan daya saing produk obat tradisional dan suplemen kesehatan nasional	Peningkatan jumlah pendampingan UMKM OT untuk dapat memenuhi persyaratan ekspor	2021-2024	BPOM, Kemenkop UKM, Kemdag
	Profiling/mapping sarana produksi UMKM OT dan intervensi lanjutan dalam rangka peningkatan penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik	Data hasil mapping/clustering UMKM OT	2021-2024	BPOM, Kemenkop UKM

D.2 Memperkuat Peran Sektor Swasta

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
29. Peran sektor swasta sangat penting sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses Integrasi ASEAN. Dalam MEA 2025, keterlibatan sektor swasta diakui dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan- tujuan ASEAN. Masukan dan kemitraan sektor swasta sangat penting tidak hanya dalam merancang strategi dan inisiatif regional, tetapi juga dalam mengidentifikasi hambatan untuk mewujudkan integrasi ekonomi regional yang lebih dalam. Berbagai upaya untuk melibatkan sektor bisnis dan organisasi berbasis masyarakat harus dilakukan secara lebih efektif,	Memfasilitasi Pertemuan Reguler guna Memperkuat Koordinasi antara ASEAN-BAC Indonesia, Asosiasi Bisnis Nasional dan Regional	Meningkatknya koordinasi antara ASEAN-BAC, asosiasi bisnis regional, dengan ASEAN Sekretariat terkait mekanisme pelaporan, umpan balik, dan tindak lanjut.	2022-2025	Kemenko Perekonomian, Kemendag, cq. Ditjen PPI dan K/L terkait, ABAC, KADIN

baik untuk menyediakan akses informasi yang lebih terhadap implementasi, dan untuk mendapatkan umpan balik.				

D.3 Kemitraan Publik-Swasta

Isi Cetak Biru	Draft Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
30. PPP merupakan alat penting bagi para pembuat kebijakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial dengan melibatkan sektor swasta, sharing resiko dan ketersediaan pendanaan, terutama untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan infrastuktur di bawah AEC dan MPAC.	Menciptakan Forum Diskusi dan knowledge sharing terkait Public Private Partnership (PPP)	Terlaksananya forum diskusi dan knowledge sharing terkait PPP	2022-2025	Bappenas
	Menyusun mekanisme koordinasi antar Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RI dengan pemangku kepentingan lain.	Tersusunnya mekanisme koordinasi antar Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RI dengan pemangku kepentingan lain.	2022-2025	Bappenas
	Mendorong Pemanfaatan PPP Untuk proyek - proyek infrastruktur	Dimanfaatkannya PPP untuk proyek - proyek infrastruktur di Indonesia	2022-2025	Bappenas

D.4 Mengurangi Kesenjangan Pertumbuhan

Isi Cetak Biru	Draft Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
31. Mempertimbangkan rekomendasi Jangka Menengah dari Rencana Kerja IAI II dan Pengawasan Pembangunan Berkeadilan di ASEAN	Meningkatkan Rangking Ease of Doing Business (EODB) Indonesia	Meningkatnya Rangking EODB Indonesia	2022-2025	BKPM ; Kemenko Perekonomian
	Mengintegrasikan Online Single Submission dengan Portal Layanan Perizinan Berusaha di K/L/D	Berkurangnya beban dari adanya regulasi bisnis terhadap pembentukan dan operasionalisasi badan usaha formal	2022-2025	BKPM
	Melaksanakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	Terlaksananya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	2022-2025	Deputi I Kemenko Perekonomian, OJK, BI ,

	Meningkatkan Produkivitas dan Daya Saing Perekonomian Daerah	Meningkatnya Produkivitas dan Daya Saing Perekonomian Daerah Melalui: - Penyelesaian Regulasi untuk Meningkatkan Investasi di Daerah - Pengembandan Model Pemberdayaan Masyarakat Pasca Sertifikasis Hak Tanah - Melakukan Training of Tranier dan Penyuluhan Pendampingan kepada Daerah yang memiliki potensi produk Unggulan	2022-2025	Kemenko Perekonomian ; Kemendagri
	Mengidentifikasi Donor Pembangunan untuk Memberikan Bantuan Teknis dan Keuangan Bagi Startup dan UMKM	Teridentifikasinya Donor Pembangunan untuk Memberikan Bantuan Teknis dan Keuangan Bagi Startup dan UMKM	2022-2025	Kemenko Perekonomian

D.5 Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Integrasi Kawasan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
32. Pelibatan para pemangku kepentingan untuk mendukung transparansi dalam kegiatan-kegiatan di ASEAN dan perkembangan integrasi kawasan sangat penting. Para stakeholder tersebut, termasuk NGO dapat berkontribusi aktif dalam proses implementasi integrasi ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah dengan memberikan masukan/saran/ dukungan terkait dampaknya terhadapa masyarakat ASEAN.	Meningkatkan Awareness Terkait MEA di Daerah. Sosialisasi MEA di pusat dan daerah. Monitoring Implementasi MEA Indonesia. Pengembangan Pusat MEA Indonesia. Pengembangan kerjasama dengan Pusat Studi ASEAN	Meningkatnya Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam isu-isu ekonomi untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai inisiatif integrasi ekonomi ASEAN;	2022-2025	Kemenko Perekonomian, Kemlu, Kemendag

E. ASEAN yang Global

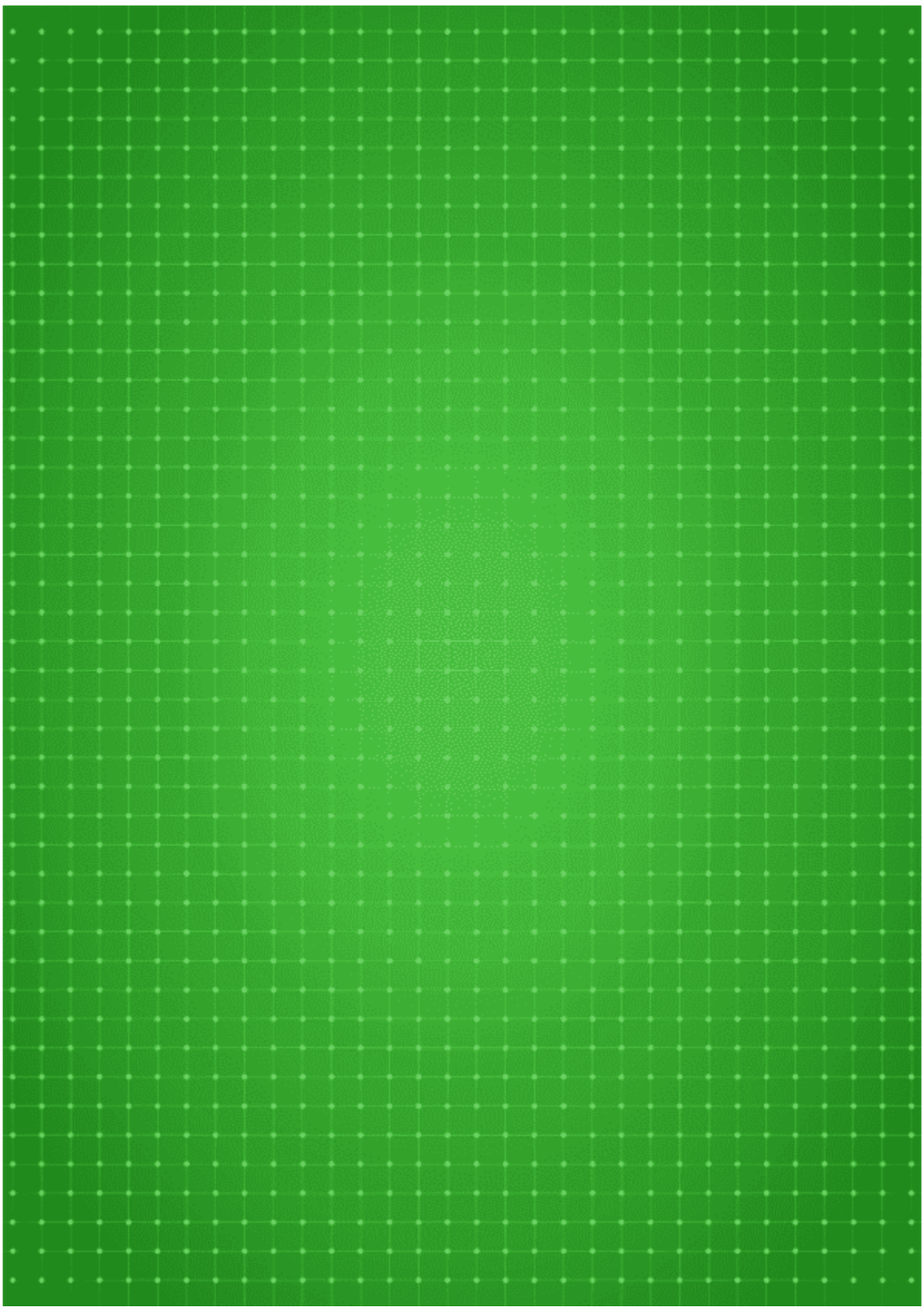
Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
33. ASEAN terus membuat kemajuan dalam hal integrasi kawasan kepada ekonomi global melalui FTA dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif/ Comprehensive Economic Partnership (CEP) dengan Cina, Jepang, Republik Korea, India, Australia, dan Selandia Baru.	Meratifikasi dan Implementasi Perundingan RCEP	Terimplementasinya perundingan RCEP dan turunannya	2022-2025	Kemendag, Kemenko Perekonomian
	Implementasi kerangka kerjasama ASEAN + FTA di Indonesia	Terimplementasinya ASEAN-Hong Kong FTA Melakukan review atas FTA/CEP ASEAN+1 yang sudah ada Implementasi pemanfaatan kerja sama ekonomi dan teknis dalam ASEAN+FTA	2022-2025	Kemendag dan Kemenko Perekonomian Kemlu
	Meningkatkan kemitraan ekonomi dengan Mitra Wicara non- FTA ASEAN	Dukungan terhadap implementasi program kerja Perdagangan dan investasi ASEAN-EU, ASEAN-Russia, ASEAN-US Melaksanakan Perundingan ASEAN-EU FTA	2022-2025	Kemendag dan Kemenko Perekonomian
	Meningkatkan Paritisipasi dan Kemitraan dengan forum- forum kerjasama sub-regional, regional, global dan multilateral	Terimplementasinya MoU between The Eurasian Economic Cooperation (EEC) and The Association of Southeast Asian on Economic Cooperation (ASEAN) Partisipasi dan kemitraan dalam berbagai forum kerja sama regional dan Sub Regional ASEAN, i.e. ASEAN Coordinating Committee on Micro and Small Medium Enteprises (ACCMSME), ASEAN Coordinating Commite on E-Commerce(ACCEC), ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperative (ACEDAC), ASEAN Sektoral Working Group on Agricultural Cooperative (ASWGAC), The Brunei Darussalam-Indonesia- Malaysia-Philippines East ASEAN	2022-2025	Kemendag dan Kemenko Perekonomian

		Growth Area (BIMP-EAGA), The Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle IMT-GT Penyusunan riset mengenai keterlibatan strategis dengan forum-forum kerjasama regional seperti APEC, Eurasian Economic Union (EAEU) dan lainnya. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan global bilateral bersama pemerintah maupun organisasi lainnya. berkontribusi untuk mendukung adanya reformasi dalam sistem perdagangan internasional (WTO) khususnya penyelesaian isu-isu Doha Development Agenda (DDA); pemilihan anggota Appellate Body; penyelesaian perundingan Fisheries Subsidies; serta pembahasan isu-isu baru di WTO. Keterlibatan dengan The Asian Development Bank (ADB), The World Bank, The International Monetary Fund (IMF), OECD, dan institusi regional dan global lainnya. Update hasil kerja sama forum keuangan G20 pada pertemuan-pertemuan ASEAN		

“Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 harus sangat terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis; dengan peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; serta suatu masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, terintegrasi dengan ekonomi global”

Visi Masyarakat ASEAN


Rencana Aksi Nasional
Pilar Sosial Budaya



Pilar Sosial Budaya



Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (MSBA) atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) merupakan bentuk kerja sama yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Sesuai dengan Piagam ASEAN, Masyarakat Sosial Budaya ASEAN terdiri dari 15 badan sektoral di tingkat pejabat tinggi sebagai platform kerja sama Kementerian dan Lembaga di ASEAN. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dengan 12 Kementerian dan Lembaga teknis sebagai pengampu dari 15 badan sektoral.

"Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dengan 12 Kementerian dan Lembaga teknis sebagai pengampu dari 15 badan sektoral"

Visi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 adalah membangun komunitas ASEAN yang Mengikutsertakan dan Memberi Manfaat bagi masyarakat, Inklusif, Berkelanjutan, Tangguh, dan Dinamis. Visi tersebut dijabarkan secara detil melalui beberapa tujuan di bawah ini, yaitu:

1. Mewujudkan suatu masyarakat yang berkomitmen, partisipatif dan bertanggung jawab secara sosial melalui mekanisme yang akuntabel dan inklusif agar memberikan keuntungan bagi seluruh rakyat ASEAN, dan dilandasi oleh prinsip tata kelola yang baik

2. Mewujudkan suatu masyarakat inklusif yang memajukan kualitas hidup yang tinggi, kesetaraan akses atas kesempatan bagi semua pihak dan pemajuan serta perlindungan hak asasi bagi perempuan, anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kelompok rentan dan terpinggirkan

3. Mewujudkan masyarakat berkelanjutan yang memajukan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup melalui mekanisme efektif guna memenuhi kebutuhan rakyat saat ini dan di masa mendatang

4. Mewujudkan suatu masyarakat yang tangguh dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dan menyikapi kerentanan ekonomi dan sosial, bencana alam, perubahan iklim dan berbagai ancaman dan tantangan yang mengemuka

5. Mewujudkan suatu masyarakat dinamis dan harmonis yang sadar dan bangga terhadap identitas, kebudayaan, dan warisannya seraya memperkuat kemampuan untuk berinovasi dan berkontribusi secara proaktif dalam masyarakat global

"Visi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 adalah membangun komunitas ASEAN yang Mengikutsertakan dan Memberi Manfaat bagi masyarakat, Inklusif, Berkelanjutan, Tangguh, dan Dinamis"

Sebagai panduan dalam melaksanakan langkah aksi untuk mewujudkan Visi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (MSBA), telah disusun Cetak Biru Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 yang terdiri dari 5 Karakteristik, 18 Langkah Utama, dan 109 Langkah Strategis. Guna mengkoordinasikan implementasi Cetak Biru Pilar MSBA 2025 di tingkat nasional, Kemenko PMK bersama dengan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN telah menyusun Rencana Aksi Nasional yang merupakan hasil penyelarasan dari RPJMN, Rencana Kerja K/L, dan Rencana Kerja Badan Sektoral.

Kelima Karaktersitik Cetak Biru Pilar MSBA 2025 dijabarkan melalui langkah utama sebagaimana dijelaskan pada poin-poin berikut bersama dengan contoh Rencana Aksi Nasional yang mendukungnya.

Mengikutsertakan dan Memberi Manfaat bagi Masyarakat

Karakteristik ini menargetkan pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses di ASEAN serta pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga. Indonesia telah menunjukkan upaya untuk mengikutsertakan masyarakat di semua level untuk meningkatkan komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab sosial masyarakat Indonesia sebagai masyarakat ASEAN melalui berbagai kegiatan seperti perayaan rutin HUT ASEAN, ASEAN Car Free Day, pendirian Pusat Studi ASEAN di berbagai universitas yang cukup berperan dalam mempromosikan ASEAN di kalangan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Contoh upaya Indonesia dalam pelibatan masyarakat pada kerja sama ASEAN sebagaimana tercantum dalam RAN adalah pembentukan platform ASEAN Pool of Experts on Civil Service (A-EXPECS) untuk mengumpulkan para pakar pengelolaan ASN di ASEAN. Kemudian salah satu capaian terbesar Indonesia di tingkat regional terkait karakteristik ini adalah perumusan Narasi Identitas ASEAN yang telah diresmikan pada KTT ASEAN ke-37 yang menawarkan konsep definisi identitas ASEAN untuk menguatkan kesadaran masyarakat dan rasa memiliki terhadap ASEAN.

Inklusif

Karakteristik ini mencakup beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi hambatan, tersedianya akses kebutuhan dasar yang setara, serta pemajuan dan perlindungan HAM, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Adapun rencana aksi terkait karakteristik ini beberapa di antaranya adalah pengembangan Jamkesnas, Implementasi program bantuan sosial dan bantuan penunjang pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan dan pekerja migran.

Berkelanjutan

Karakteristik "Berkelanjutan" fokus pada area isu kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, iklim yang berkelanjutan, serta Sustainable Consumption and Production (SCP). Rencana Aksi yang mendukung pencapaian langkah utama dan langkah strategis karakteristik ini di antaranya adalah pengelolaan kawasan konservasi, pemulihan lahan gambut, penyelenggaraan kota sehat, dan fasilitasi daerah dalam penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim.

Tangguh

Karakteristik "Tangguh" memuat berbagai macam target terkait ketahanan masyarakat ASEAN dalam situasi krisis seperti bencana alam, perubahan iklim, ancaman kesehatan, biologi, kimia, dan bahaya narkoba. Pelaksanaan diklat penanggulangan bencana kesiapsiagaan dan respons pandemi COVID-19 dan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang merupakan beberapa dari rencana aksi yang mendukung karakteristik ini.

Dinamis

Karakteristik "Dinamis' mencakup target mewujudkan ASEAN yang terbuka, adaptif, kreatif, inovatif, responsif, dan menumbuhkan budaya kewirausahaan. Adapun rencana kerja di Kementerian dan Lembaga yang mendukung karakteristik ini contohnya adalah pengiriman delegasi pemuda Indonesia pada pertemuan atau pertukaran pemuda tingkat ASEAN, serta fasilitasi pemuda sebagai kader kewirausahaan. Selain itu capaian Indonesia di tingkat regional dalam mendorong ASEAN sebagai kawasan yang terbuka dan adaptif adalah penyelenggaraan ASEAN Youth Interfaith Camp yang memberikan kesempatan bagi para pemuda ASEAN untuk saling mengenal budaya dan keyakinan yang beraneka ragam serta mempelajari toleransi.

"Keketuaan Indonesia di badan sektoral bidang ketenagakerjaan telah berhasil merumuskan Deklarasi ASEAN terkait Pengembangan SDM untuk Menghadapi Perubahan Dunia dan Masa Depan Kerja"

Dalam usaha pencapaian target dalam Cetak Biru Pilar MSBA 2025, selain di tingkat nasional melalui RAN, Indonesia juga mengambil peranan di tingkat regional. Sebagai contoh adalah beberapa capaian Indonesia sebagai ketua badan sektoral. Yang pertama adalah terciptanya narasi Identitas ASEAN dan peningkatan kerja sama ekonomi kreatif pada keketuaan Indonesia di badan sektoral bidang seni dan kebudayaan. Selain itu juga pada keketuaan Indonesia di badan sektoral bidang ketenagakerjaan telah berhasil merumuskan Deklarasi ASEAN terkait Pengembangan SDM untuk Menghadapi Perubahan Dunia dan Masa Depan Kerja. Kemudian pada keketuaan Indonesia di badan sektoral bidang kesehatan, telah berhasil merumuskan SOP ASEAN untuk Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta membentuk mekanisme Dana Penanggulangan COVID-19, Persediaan Alat Medis Regional ASEAN, dan Pusat Studi Regional ASEAN untuk Penyakit Menular dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

A. Mengikutsertakan dan Bermanfaat bagi Rakyat

A.1 Keterlibatan para Pemangku Kepentingan dalam Proses di ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Melembagakan kebijakan ASEAN mengenai keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan yang relevan dalam kerja Organ dan Badan ASEAN termasuk inisiatif pembuatan kebijakan, menyatukan penilaian dampak ke dalam pengembangan kebijakan, pengembangan program, implementasi dan pengawasan, dan lain-lain; dan ii. Mendorong kerangka kerja dan panduan kemitraan guna melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi efektif berbagai inisiatif ASEAN dan pemajuan kesadaran publik terhadap program dan pencapaian MSBA.	Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan Pedesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang melakukan kerjasama dan kemitraan	2022-2024	Kemendes PDTT
	Mengembangkan dan memanfaatkan Aplikasi ASEAN Pool of Experts on Civil Service (A-EXPECS) Workshop ACCSM (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters) Tahun 2020 Pemanfaatan Aplikasi ASEAN Pool of Experts on Civil Service (A-EXPECS)/ tabulasi pakar kepegawaian ASEAN	Terintegrasinya Sistem Informasi ASN. Jumlah Experts/Members yang memanfaatkan aplikasi A- EXPECS.	2022-2023	BKN
	Pelaksanaan Inpres No.1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Terlaksananya Inpres No.1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	2022-2024	Kemenkes;
	Pembinaan Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Germas	2022-2024	Kemenkes
	Koordinasi dan Kemitraan di Bidang Kepemudaan (Antar Daerah dan Luar Negeri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Kemitraan di Bidang Kepemudaan. Jumlah Lembaga Rintisan implementasi MoU Kerjasama Kepemudaan.	2022-2025	Kemenpora
	Mengembangkan dan Fasilitasi Keikutsertaan Pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Internasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan olahraga pendidikan. Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Internasional.	2022-2023	Kemenpora

	Program Pertukaran Mahasiswa Luar Negeri dengan Negara-Negara Anggota ASEAN	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Luar Negeri	2022-2025	Kemendikbud
	Pemberian Beasiswa Negara Berkembang	Jumlah Mahasiswa Yang Menerima Beasiswa Negara Berkembang	2022-2025	Kemendikbud
	Publikasi bahan ajar PAUD ke negara ASEAN (Tingkat regional)	Tersusunnya bahan ajar PAUD ke negara ASEAN (Tingkat regional)	2022-2025	Kemendikbud
	Pelaksanaan Kegiatan BIPA	Jumlah WNA yang mengikuti pembelajaran BIPA	2022-2025	Kemendikbud
	Kerjasama kelembagaan antara lembaga Pendidikan Islam di Indonesia dengan lembaga Pendidikan di luar negeri	Terselenggaranya kerjasama kelembagaan antara lembaga Pendidikan Islam di Indonesia dengan lembaga Pendidikan di luar negeri	2022-2025	Kemenag
	Pelaksanaan Sistem Seleksi CASN/ASN Berbasis CAT	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Tes Menggunakan Fasilitas CAT	2022-2023	BKN
	Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	Persentase Instansi yang Telah Memanfaatkan Hasil Penilaian Kompetensi Melalui Assessment Center (AC) BKN	2022-2023	BKN
	Penerbitan Majalah Masyarakat ASEAN Komunitas ASEAN	Meningkatnya awareness masyarakat tentang ASEAN	2022-2025	Kemenkominfo
	Koordinasi dan Kemitraan Keolahragaan dengan Lembaga Lintas Sektoral, antar tingkat Pemerintah Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kemitraan Keolahragaan dengan Lembaga Lintas Sektoral, antar tingkat Pemerintah Daerah dan Luar Negeri	2022-2023	Kemenpora
	Pengiriman Delegasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	Jumlah Partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaann	2022-2025	Kemendikbud

	Penyelenggaraan Event Diplomasi Budaya antar bangsa	Jumlah Event Warisan dan Diplomasi Budaya yang Diapresiasi Masyarakat	2022-2025	Kemendikbud
	Partisipasi dalam Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN	Jumlah Delegasi dalam POM ASEAN	2022-2025	Kemendikbud

A.2 Rakyat yang diberdayakan dan Lembaga yang Diperkuat

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Meningkatkan kompetensi dan ketangguhan pemangku kepentingan terkait melalui teknologi canggih dan kemampuan manajerial untuk memperbaiki kapasitas kelembagaan dalam mengatasi tantangan saat ini dan kecenderungan yang mengemuka, seperti bencana alam, wabah penyakit dan perubahan iklim; ii. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai kelompok usia sebagai sarana penghubung dengan masyarakat regional dan global; iii. Mendorong partisipasi pemerintah/otoritas daerah, provinsi, kabupaten, kotamadya dan kota melalui pemerintah pusat dalam pengembangan program peningkatan kapasitas ASEAN yang bermanfaat bagi setiap masyarakat; iv. Memajukan hukum kebijakan dan praktek yang tidak diskriminatif melalui pengembangan lembaga yang efektif, tanggap, akuntabel dan transparan di seluruh tataran;	Perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian yang Diselesaikan Sesuai Target	2022-2025	BKN
	Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Guru	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi bagi guru	2022-2025	Kemendikbud
	Pengiriman Doktor bidang Agama Islam ke Luar Negeri	Jumlah Doktor Agama Islam yang Dikirim ke Luar Negeri	2022-2025	Kemenag

v. Memperkuat pelayanan sipil melalui peningkatan kapasitas yang efektif, pengembangan sumber daya manusia dan kolaborasi program di antara negara anggota ASEAN; vi. Memajukan kesadaran ASEAN di antara pejabat pemerintah, pelajar, anak, pemuda dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya membangun identitas ASEAN; dan vii. Berupaya mencapai kesetaraan gender				

B. Inklusif

B.1 Pengurangan Hambatan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Mengurangi ketidakadilan dan memajukan kesetaraan akses terhadap perlindungan sosial dan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat serta dan keterlibatan dalam masyarakat, seperti mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja, pedoman, dan mekanisme untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, kekejaman, dan pengabaian; ii. Menyusun pedoman bagi pemeliharaan mutu dan dukungan terhadap perempuan, anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan; iii. Menyusun mekanisme kawasan untuk mengembangkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi semua;	Penyelenggaraan kesehatan kerja	Jumlah Kab/kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	2022-2024	Kemenkes
	Penanganan Kemiskinan Melalui Program Jaminan Sosial Keluarga & Bantuan Sosial Pangan	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan.	2022-2025	Kemensos
	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	Jumlah penduduk yg menjadi peserta penerima bantuan iuran/PBI melalui JKN/KIS	2022-2025	Kemenkes

iv.Mendorong inisiatif kerja sama kawasan untuk mendukung negara anggota ASEAN dalam mengimplementasikan Deklarasi Bali tentang Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN dan Dekade ASEAN bagi Penyandang Disabilitas (2011-2020)				

B.2 Kesetaraan Akses bagi Semua

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Memperkuat platform kawasan untuk memajukan kesetaraan peluang partisipasi dan pelibatan yang efektif bagi perempuan, anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil, serta kelompok rentan dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program ASEAN; ii. Mengembangkan strategi kawasan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan anggaran ASEAN di seluruh pilar dan sektor; iii. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan strategi dan program di bawah MSBA dan mendorong harmonisasinya dengan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (MPKA) dan MEA, khususnya di bidang perlindungan sosial, jaminan kesehatan secara menyeluruh, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, serta perdagangan manusia;	Penyelenggaraan Program UKS di Sekolah (SD, SMP, SMA)	Jumlah Sekolah yan melaksanakan UKS melalui Bimtek. Pemenuhan UKS di Sekolah sesuai dengan SPM. Jumlah Pembangunan UKS di Madrasah.	2022-2025	Kemendikbud ; Kemenag
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (Semua Jenjang)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang Dibangun	2022-2024	Kemendikbud
	Perbaikan Gizi Mayarakat dalam rangka pencegahan stunting	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah. Presentase Remaja Putri Mendapat Tablet Tambah Darah Presentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya Persentase bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif.	2022-2025	Kemenkes
	Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	Terlaksananya dukungan terhadap pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	2022-2025	Kemendikbud

iv. Menyusun mekanisme dan memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memajukan akses yang lebih luas terhadap layanan sosial dasar bagi semua, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan kejuruan, pelatihan keterampilan, serta pemajuan atas pengakuan keterampilan; v. Mendukung inisiatif negara anggota ASEAN dalam memperkuat analisa dan basis data nasional berdasarkan pengelompokan gender dan usia, termasuk kemiskinan dan keadilan, serta membangun basis data kawasan yang andal untuk sektor-sektor kunci guna mendukung kebijakan dan program ASEAN; vi. Memajukan pengembangan sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, dan kehidupan yang berkelanjutan, khususnya bagi kelompok miskin, melalui akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, kewirausahaan, dan keuangan mikro; vii. Mendorong upaya berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi melalui pendekatan berbasis komunitas, multi- sektoral, dan multi-pemangku kepentingan. ; viii. Menciptakan lingkungan yang mumpuni untuk menyediakan akses bagi pengangguran, kelompok miskin dan terpinggirkan lainnya terhadap sumber daya, peluang, serta upaya perlindungan guna mencegah mereka dari keterpurukan akibat pengaruh negatif ekstrimisme dan ancaman kekerasan;	Implementasi Kartu Indonesia Pintar & Beasiswa Bidik Misi / Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pelajar dari Keluarga Miskin	Jumlah Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (SD-SMP-SMA-SMK). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB. Jumlah Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (Madrasah). Angka Partisipasi Kasar (APK) Madrasah. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan . Jumlah Mahasiwa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.	2022-2024	Kemendikbud ; Kemenag
	Pelaksanaan Pendidikan Karakter	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mendapatkan Penguatan dengan pendidikan karakter Anak Remaja memperoleh pendampingan peningkatan kapasitas personal dan sosial sebagai agen perubahan dalam pencegahan dan penggulangan perilaku beresiko.	2022-2024	Kemendikbud
	Pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing yang kuliah di PTKIN di Indonesia	Meningkatnya Jumlah Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Asing	2022-2025	Kemenag
	Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa di luar negeri	Meningkatnya kualitas pengabdian mahasiswa dan terwujudnya pertukaran pengetahuan dan budaya mahasiswa	2022-2025	Kemenag
	Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan Keluarga	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.	2022-2023	Kemenkes

ix. Memastikan pembuatan keputusan yang inklusif, partisipatif dan representatif di semua tingkatan dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada pada situasi kurang beruntung, termasuk kelompok etnis minoritas, anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; x. Mendorong pertumbuhan inklusif melalui langkah-langkah yang tepat di tingkat nasional untuk memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan lainnya; xi. Mendorong peluang yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas dan akses terhadap informasi dengan penekanan prioritas pada pemajuan akses secara menyeluruh terhadap pendidikan; xii. Mendorong masyarakat yang sehat, peduli, berkelanjutan, dan produktif dan suatu masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat yang tahan terhadap ancaman kesehatan dan memiliki akses menyeluruh terhadap layanan kesehatan; xiii.Meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan fasilitas yang dirancang secara universal.		Jumlah Kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Balita dan Anak pra Sekolah Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Jumlah Kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Persentase kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia.		
	Penyehatan Sarana Air Minum & Sanitasi	Persentase sarana air minum yang diawasi atau diperiksa kualitas air minumnya memenuhi standar. Persentase desa/kelurahan yang sudah stop buang air besar sembarangan (ODF). Jumlah kasus penyakit infeksi yang ditularkan melalui makanan (foodborne illnes) yang dilaporkan.	2022-2025	Kemenkes
	Perkuatan Akses Layanan Rujukan Kesehatan	Terlaksananya penguatan akses layanan rujukan kesehatan	2022-2025	Kemenkes
	Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	2022-2025	Kemensos
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan layanan.	2022-2023	Kemenkes

	Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.	Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender		KPPPA, Bappenas

B.3 Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Memajukan mekanisme antar sektoral di kawasan menuju pendekatan menyeluruh dan multidisipliner dalam meningkatkan pemeliharaan mutu, kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan sosial, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, khususnya bagi kelompok rentan, dalam menghadapi bahaya dan resiko/ancaman sosial dan ekonomi yang muncul; ii. Mendorong mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan bagi perlindungan sosial, jaminan kesehatan menyeluruh, pengembangan dan perawatan anak usia dini, perlindungan risiko pembiayaan bagi pengurangan resiko bencana dan penyesuaian terhadap perubahan iklim, serta dana pensiun sosial, melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya; iii. Menyediakan platform kawasan untuk berdialog dan mendukung inisiatif guna mengatasi isu-isu praktek tradisional yang melanggar pemenuhan hak asasi; iv.Mendukung percepatan implementasi di antara negara anggota ASEAN untuk memperluas jaminan, aksesibilitas, ketersediaan, kelengkapan, kualitas,	Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI yang dilindungi	2022-2025	Kemenaker, BP2MI, Kemlu
	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)	Persentase korban dalam KTP (termasuk TPPO) yang mendapat pelayanan sesuai kebutuhan korban	2022-2025	KPPPA
	Pelaksanaan Fasilitasi K/L/Pemda dalam Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Terhadap Anak	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar	2022-2025	KPPPA

kesetaraan, keterjangkauan dan keberlanjutan atas layanan dan perlindungan sosial; v.Meningkatkan efektifitas pelaksanaan deklarasi dan instrumen ASEAN yang terkait hak asasi manusia; vi.Meningkatkan insiatif kawasan untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas melalui Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak; vii.Meningkatkan insiatif kawasan dan partisipasi pemangku kepentingan untuk memajukan penghapusan semua bentuk diskriminasi yang terlembaga dengan kata lain eksploitasi, perdagangan, praktek-praktek berbahaya, dan kekerasan, penganiyaan terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pekerja migran, lanjut usia, dan korban perdagangan manusia, kelompok etnis minoritas, serta kelompok terpinggirkan; viii.Mendorong hubungan antar generasi, keluarga, dan masyarakat dalam memajukan dan melindungi hak lanjut usia, dan menyediakan layanan yang berkualitas dan perlindungan terhadap kaum lanjut usia, sesuai dengan Deklarasi Brunei Darussalam tentang Penguatan Institusi Keluarga: Peduli Kaum Lanjut Usia; ix.Meningkatkan insiatif kawasan sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi pekerja dan pekerja migran.				

C. Berkelanjutan

C.1 Konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Memperkuat kerja sama kawasan untuk melindungi, mengembalikan dan mendorong penggunaan sumber daya ekosistem terrestrial secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghentikan kerugian keanekaragaman hayati, serta menghentikan dan mengembalikan degradasi tanah; ii. Memperkuat kerja sama kawasan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam konteks pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, termasuk melaui implementasi Perjanjian tentang Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN (AATHP), untuk mengatasi pencemaran asap lintas batas secara efektif; iii. Mendorong kerja sama untuk perlindungan, restorasi dan penggunaan lingkungan pesisir dan lingkungan laut secara berkelanjutan, merespons dan menangani resiko pencemaran dan ancaman terhadap ekosistem laut dan lingkungan pesisir, khususnya daerah yang sensitif secara ekologis; iv. Menerapkan praktik pengelolaan yang baik dan memperkuat kebijakan untuk mengatasi dampak proyek pembangunan di pesisir dan perairan internasional dan isu-isu lingkungan hidup lintas batas, termasuk polusi, pembuangan dan pemindahan secara illegal limbah dan zat berbahaya, dan dalam melaksanakannya, memanfaatkan lembaga dan perjanjian kawasan dan internasional yang ada;	Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025	Terlaksananya Perpres No. 56 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025	2022-2025	KLHK
	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas kawasan konservasi yang dipulihkan. Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks Management Effectiveness Tracking Tool (METT) minimal 70%.	2022-2025	KLHK
	Peningkatan Kualitas Sungai pada DAS Prioritas utnuk Sumber Air Baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)	Jumlah sungai pada DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)	2022-2025	KLHK
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	Jumlah Unit Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi secara Sipil Teknis.	2022-2025	KLHK
	Pelaksanaan Perpres No.21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Terlaksananya Perpres No. 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	2022-2025	KLHK
	Peningkatan Pengelolaan Limbah	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Limbah B3. Tersedianya fasilitas penunjang percontohan pengelolaan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jumlah Lahan Terkontaminasi Limbah B3 yang dipulihkan.	2022-2025	KLHK

v. Memperkuat kebijakan dan pengembangan kapasitas dan praktik terbaik untuk melestarikan, mengembangkan dan mengelola laut, lahan basah, lahan gambut, keanekaragaman hayati, dan tanah serta sumber daya air secara berkelanjutan; vi. Mendorong peningkatan kapasitas melalui upaya yang berkesinambungan untuk mencapai pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam secara berkelanjutan; vii. Mendorong kerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup menuju penggunaan ekosistem dan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pendidikan lingkungan hidup, pelibatan masyarakat dan pendekatan publik; viii. Memperkuat kemitraan kawasan dan global serta mendukung impementasi kerangka kerja dan perjanjian internasional yang relevan; ix. Meningkatkan peran ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) sebagai pusat unggulan riset mengenai pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan x. Mendukung implementasi Strategic Plan for Biodiversity 2011- 2020 dan Target Aichi secara menyeluruh.	Pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Inpres No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2022-2025	Kemenko Polhukam ; KLHK
	Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.	terlaksananya Inpres No.5 Tahun 2019	2022-2025	KLHK
	Pemulihan Ekosistem dan Lahan Gambut	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	2022-2025	KLHK

C.2 Kota Ramah Lingkungan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Meningkatkan pendekatan partisipatif dan terpadu dalam perencanaan dan pengelolaan dan perencanaan perkotaan bagi urbanisasi secara berkelanjutan menuju ASEAN yang bersih dan hijau; ii. Memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dan nasional untuk mengimplementasikan strategi dan program menuju kota nyaman huni; iii. Meningkatkan koordinasi diantara sektor terkait untuk menyediakan akses terhadap lahan bersih, ruang publik hijau, udara bersih, air bersih dan aman, serta sanitasi; iv. Memajukan kota yang ramah terhadap anak, pemuda, lanjut usia dan penyandang disabilitas melalui peningkatan koordinasi dengan sektor terkait untuk menyediakan sistem infrastruktur yang dapat diakses dan berkelanjutan; v. Memperkuat secara positif keterhubungan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di antara kawasan perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan; dan vi. Memperkuat kebijakan dan strategi untuk pengelolaan dampak dari pertumbuhan penduduk dan migrasi di kota secara efektif.	Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat	Jumlah kab/kota sehat	2022-2024	Kemenkes

C.3 Iklim Berkelanjutan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan manusia untuk menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama dalam masyarakat yang rentan dan terpinggirkan; ii. Memfasilitasi pengembangan respon yang komprehensif dan koheren terhadap tantangan perubahan iklim, seperti, namun tidak terbatas pada pendekatan multi-sektoral dan multi- pemangku kepentingan. iii. Mendorong sektor swasta dan masyarakat agar memiliki akses terhadap mekanisme pembiayaan yang baru dan inovatif untuk mengatasi perubahan iklim; iv. Memperkuat kapasitas kelembagaan sektoral dan pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), penilaian kerentanan dan kebutuhan adaptasi; v. Memperkuat upaya pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mengurangi emisi GRK dari kegiatan utama pembangunan; vi. Mengarusutamakan pengelolaan risiko perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK dalam perencanaan sektoral; dan vii. Memperkuat kemitraan global dan mendukung implementasi kerangka kerja dan perjanjian internasional yang relevan, seperti the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).	Pelaksanaan Perpres No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)	Terlaksananya Perpres No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)	2022-2025	KLHK
	Pengembangan dan Operasionalisasi SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas.	Operasionalisasi SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas	2022-2025	KLHK
	Pelaksanaan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim	Terlaksananya Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim	2022-2025	KLHK
	Fasilitasi Daerah dalam Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi program kampung iklim (Proklim)	2022-2025	KLHK

C.4 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Memperkuat kemitraan pemerintah-swasta untuk memajukan penggunaan teknologi ramah lingkungan guna memaksimalkan efisiensi sumber daya; ii. Mendorong pendidikan lingkungan hidup (termasuk praktek sekolah berbasis lingkungan hidup), kesadaran, dan kapasitas untuk menerapkan konsumsi dan gaya hidup hijau secara berkelanjutan di semua tingkatan; iii. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang relevan untuk menerapkan pengelolaan sampah dan penghematan energi dengan baik; iv. Mendorong integrasi strategi Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan dan praktik terbaik ke dalam kebijakan nasional dan kawasan atau sebagai bagian dari kegiatan CSR.	Pemanfaatan Produk Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Produk Ramah Lingkungan yang Dimanfaatkan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	2022-2025	KLHK
	Pelaksanaan Sekolah/Kampus Yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)	2022-2025	KLHK

D. Ketahanan

D.1 Asean yang Tahan Bencana yang Mampu Mengantisipasi, Merespons, Mengatasi, dan Bangkit Kembali menjadi Lebih Baik, Lebih Cerdas dan lebih Cepat

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I. Meningkatkan mekanisme dan kapasitas kawasan sehingga ASEAN mampu secara kolektif merespons bencana di dalam dan luar kawasan;	Pelaksanaan Gladi/Simulasi/Diklat/Knowledge Sharing Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Gladi/Simulasi/Diklat/Knowledge Sharing Penanggulangan Bencana	2022-2025	BNPB

ii.Memajukan standar kawasan, termasuk metodologi dan sarana untuk menilai, mencatat, menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana, serta berbagi data yang non-sensitif dan membuat sistem informasi bersama, untuk meningkatkan interoperabilitas, memastikan kesatuan tindakan, dan memperkuat ketahanan; iii.Meningkatkan ketahanan masyarakat lokal dengan mengintegrasikan prinsip ketahanan dalam pengurangan risiko, kesiapan, respon, pemulihan, dan rehabilitasi; iv.Mendorong keterhubungan dan koherensi kebijakan, dan mensinergikan inisiatif bagi pengurangan risiko bencana, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, tindakan kemanusiaan dan pembangunan secara berkelanjutan; v.Melembagakan ketahanan dengan memperkuat lembaga dan kapasitas beradaptasi untuk mengurangi risiko yang ada dan mencegah risiko di masa mendatang; vi.Memanfaatkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional untuk mengembangkan budaya ketahanan; dan vii.Meningkatkan kapasitas, teknologi dan ketahanan masyarakat terhadap dampak amunisi yang belum meledak terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan di daerah pedesaan.	Pelaksanaannya Sistem Informasi Rencana Kontijensi (SIrenkon) Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sirenkon	2022-2025	BNPB
	Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bidang Fisik	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bidang Fisik	2022-2025	BNPB
	Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Jumlah provinsi dan kab/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan krisis kesehatan	2022-2025	Kemenkes

D.2 ASEAN yang Lebih Aman dan Mampu Merespons Segala Bahaya Terkait Kesehatan, termasuk Bahaya Biologis, Kimia dan Radiological-Nuclear, serta Ancaman Lainnya yang Muncul

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i.Memperkuat sistem kesehatan agar memiliki daya tahan, dalam upaya menyiapkan respon yang efektif terhadap bahaya kesehatan, termasuk bahaya biologis, kimia, radiological-nuclear dan ancaman lainnya yang timbul; ii.Memajukan standar kawasan untuk meningkatkan interoperabilitas, memastikan kesatuan tindakan dan memperkuat ketahanan kolektif; dan iii.Meningkatkan pendekatan serta kapasitas manusia dan kelembagaan untuk mendukung penerapan kebijakan, strategi dan program secara efektif dalam upaya menyiapkan dan merespons segala bahaya terkait kesehatan dan ancaman lainnya yang muncul.	Pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia	Terlaksananya Inpres No.4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia	2022-2025	Kemenko PMK / Kemenko polhukam
	Kesiapsiagaan dan respons pandemi COVID-19 dan kegawatdaruratan kesmas di masa yang akan datang	Pengembangan protokol kesehatan respons pandemi/kegawatdaruratan kesmas di tingkat regional ASEAN dan national.	2022-2025	Kemenkes
		Pengembangan protokol penelusuran kontak kasus pandemi/ kegawatdaruratan kesmas untuk lintas batas negara di kawasan ASEAN.	2022-2025	Kemenkes
		Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.	2022	Kemenkes
	Peningkatan Ketahanan Akses, Mutu, dan Kemandirian Obat Publik	Meningkatnya akses, kemadirian, dan mutu obat	2022-2023	Kemenkes; BPOM
	Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Health security	Tersedianya rekomendasi kebijakan untuk implementasi, monitoring dan evaluasi Health Security di tingkat nasional, termasuk penguatan kapasitas laboratorium, biosafety-biosecurity, dan Anti-microbial resistance.	2022-2024	Kemenkes

D.3 ASEAN yang Adaptif dengan Iklim melalui Kapasitas Manusia dan Kelembagaan yang Kuat untuk Beradaptasi dengan Dampak Perubahan Iklim

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Memperluas platform lintas-sektoral dan membuat strategi bersama untuk merespons dampak perubahaan iklim; ii. Mendorong kebijakan yang berlandaskan bukti dan bersifat ilmiah mengenai adaptasi perubahan iklim; dan iii. Mendorong dan mempertimbangkan praktik serta pengetahuan lokal dan tradisional dalam merespons dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.	Implementasi Desa Tangguh Bencana	Terimplementasinya Desa Tangguh Bencana	2022-2025	BNPB

D.4 Penguatan Perlindungan Sosial bagi Perempuan, Anak, Pemuda, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Kelompok Etnis Minoritas ; Pekerja Migran; Kelompok Rentan dan Terpinggirkan, dan Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan termasuk Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Terpencil serta di Wilayah Sensitif Iklim, untuk Mengurangi Kerentanan saat Terjadi Krisis Perubahan Iklim, Bencana dan Perubahan Lingkungan Hidup Lainnya

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Mendorong penilaian risiko dan kerentanan serta langkah- langkah berlandaskan bukti dan ilmiah lainnya bagi kebijakan dan rencana guna memastikan langkah-langkah responsif yang ditargetkan; dan ii. Membangun platform untuk memberdayakan masyarakat di wilayah rawan agar tangguh melalui pengurangan eksposur dan kerentanannya terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan goncangan ekonomi, sosial dan lingkungan serta bencana lainnya.	Penanganan dan Pemulihan Korban Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Penanganan Darurat	2022-2025	Kemensos
	Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bidang Fisik	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bidang Fisik.	2022-2025	BNPB

D.5 Peningkatan dan Optimalisasi Sistem Pembiayaan, Ketersediaan Pangan, Air, Energi,dan Jaringan Pengaman Sosial Lainnya saat Krisis dengan mengupayakan Sumber Daya yang lebih Tersedia, Mudah Diakses, Terjangkau dan Berkelanjutan

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Meningkatkan koordinasi lintas-sektoral dan lintas-pilar untuk memastikan aksesibilitas dan kecukupan pangan pada tingkat rumah tangga, terutama rumah tangga yang rawan, dan kemampuan menangani bencana, goncangan harga dan kelangkaan pangan melalui pengembangan mekanisme dan strategi yang adaptif; ii. Meningkatkan koordinasi lintas-sektoral dan lintas-pilar untuk memastikan aksesibilitas dan ketersediaan layanan energi terjangkau di tingkat rumah tangga serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau; iii. Meningkatkan koordinasi lintas-sektoral dan lintas-pilar untuk memastikan ketersediaan air bersih; fasilitas sanitasi dan listrik bagi rumah tangga pada saat krisis; iv. Meningkatkan penargetan terhadap kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan di saat krisis; dan v. Menjajaki kemungkinan membentuk mekanisme pemblayaan dan asuransi serta strategi pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Bantuan Modal Stimulan Untuk Pengembangan Bumdesa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	2022-2025	Kemendes PDTT
	Bantuan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama Konsolidasi	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang	2022-2025	Kemendes PDTT
	Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama Berkembang	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang	2022-2025	Kemendes PDTT
	Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama Maju	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju	2022-2025	Kemendes PDTT

D.6 Upaya Menuju ASEAN "Bebas-Narkoba"

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Mendorong koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam perumusan kebijakan, mengembangkan dan mengimplementasikan program pencegahan bagi sasaran kelompok yang berbeda, mengadopsi dan menggunakan rehabilitasi dan penanganan yang dan program pasca perawatan, serta penelitian mengenai masalah penyalahgunaan narkoba; dan ii. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab sosial mengenai dampak buruk bahaya narkoba melalui pelibatan masyarakat, advokasi dan kegiatan tekait lainnya.	Pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Nartkotika Tahun 2020-2024	Terlaksananya Inpres No. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelab Narkotika dan Prekursor Nartkotika Tahun 2020-2024	2022-2024	BNN

E. Dinamis

E.1 Menuju ASEAN yang Terbuka dan Adaptif

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Mendorong kebebasan akses universal terhadap teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan legislasi nasional; ii. Memajukan budaya toleransi, saling pengertian dan saling menghormati agama dan dialog antar keyakinan; iii. Menunjukkan ASEAN ke pada dunia luar melalui berbagai pendekatan, seperti program kesenian, festival film dan warisan budaya ASEAN;	Pengiriman Delegasi mengikuti Meeting Kepemudaan Tingkat Internasional (ASEAN)	Jumlah Laporan Pengiriman Delegasi mengikuti Meeting Kepemudaan Tingkat Internasional (ASEAN)	2022-2025	Kemenpora
	Diseminasi ASEAN di Tingkat Nasional	Terlaksananya Diseminasi terkait Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN di tingkat Nasional	2022-2025	Kemenkominfo

iv. Menunjukkan suara bersama ASEAN pada fora sosial-budaya global dan negosiasi, apabila diperlukan; v. Mendorong mobilitas dan interaksi antar rakyat yang lebih luas di dalam dan di luar ASEAN; vi. Memajukan kerja sama di bidang olahraga dan mengembangkan program olahraga secara komprehensif dan inklusif guna meningkatkan gaya hidup yang aktif dan sehat; vii. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas pegawai negeri sipil ASEAN dan sektor publik untuk menyikapi tantangan yang muncul dan kebutuhan masyarakat melalui layanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, pendekatan inovatif dan partisipatif, serta kolaborasi; viii. Menyediakan peluang bagi para pemangku kepentingan terkait untuk berbagi pengetahuan, termasuk pertukaran praktik terbaik dan pertukaran hasil kajian; ix. Menggalakkan semangat kesukarelawanan di antara negara anggota ASEAN untuk memperkuat Masyarakat ASEAN; x. Menunjukkan visibilitas ASEAN melalui upaya pembangunan citra yang komprehensif, melibatkan multi-pemangku kepentingan, multi-kepentingan, yang ditunjukkan melalui identitas bersama ASEAN, seperti HUT ASEAN, Bendera ASEAN, Lagu ASEAN dan Emblem ASEAN; dan				

xi. Mendorong langkah-langkah untuk memastikan terwujudnya suatu masyarakat yang saling peduli, kerukunan sosial dan nilai- nilai kemanusiaan, serta semangat kemasyarakatan.				

E.2 Menuju ASEAN yang Kreatif, Inovatif dan Responsif

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
i. Meningkatkan daya saing SDM ASEAN dengan mendorong pembelajaran seumur hidup, jenjang pendidikan, penyetaraan dan pengembangan keterampilan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh kelompok umur; ii. Mendorong pendekatan ASEAN yang lebih inovatif dalam pendidikan tinggi dengan menggabungkan akademisi, layanan masyarakat, penempatan kawasan, serta dukungan dan inkubasi kewirausahaan; iii. Mendorong kerja sama kawasan di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta memperkuat peran ASEAN pada jejaring penelitian kawasan dan global dengan memajukan inisiatif serta menyediakan insentif dan dukungan bagi penelitian dan pengembangan, termasuk publikasi penelitian; iv. Mendorong pergerakan ide, pengetahuan, keahlian dan keterampilan secara bebas untuk meningkatkan dinamika di kawasan; v. Memperkuat kurikulum dan sistem pendidikan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan disiplin ilmu sektor industri kreatif;				

vi. Mendorong dan mendukung industri kreatif dan pencarian kreatif (creative pursuits), seperti film, musik dan animasi; vii. Memajukan ASEAN sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan; viii. Memperkuat kerja sama kawasan dan global untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lembaga pendidikan tinggi; ix. Mendorong pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan sistem pelatihan berkelanjutan dan pelatihan ulang untuk mendukung pembelajaran seumur hidup dan pengembangan angkatan kerja; dan x. Mendorong pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI), serta memperkuat kerja sama dan penerapannya di ASEAN di bidang ketahanan pangan, obat-obatan, aset budaya tradisional dan produk berbasis keanekaragaman hayati.				

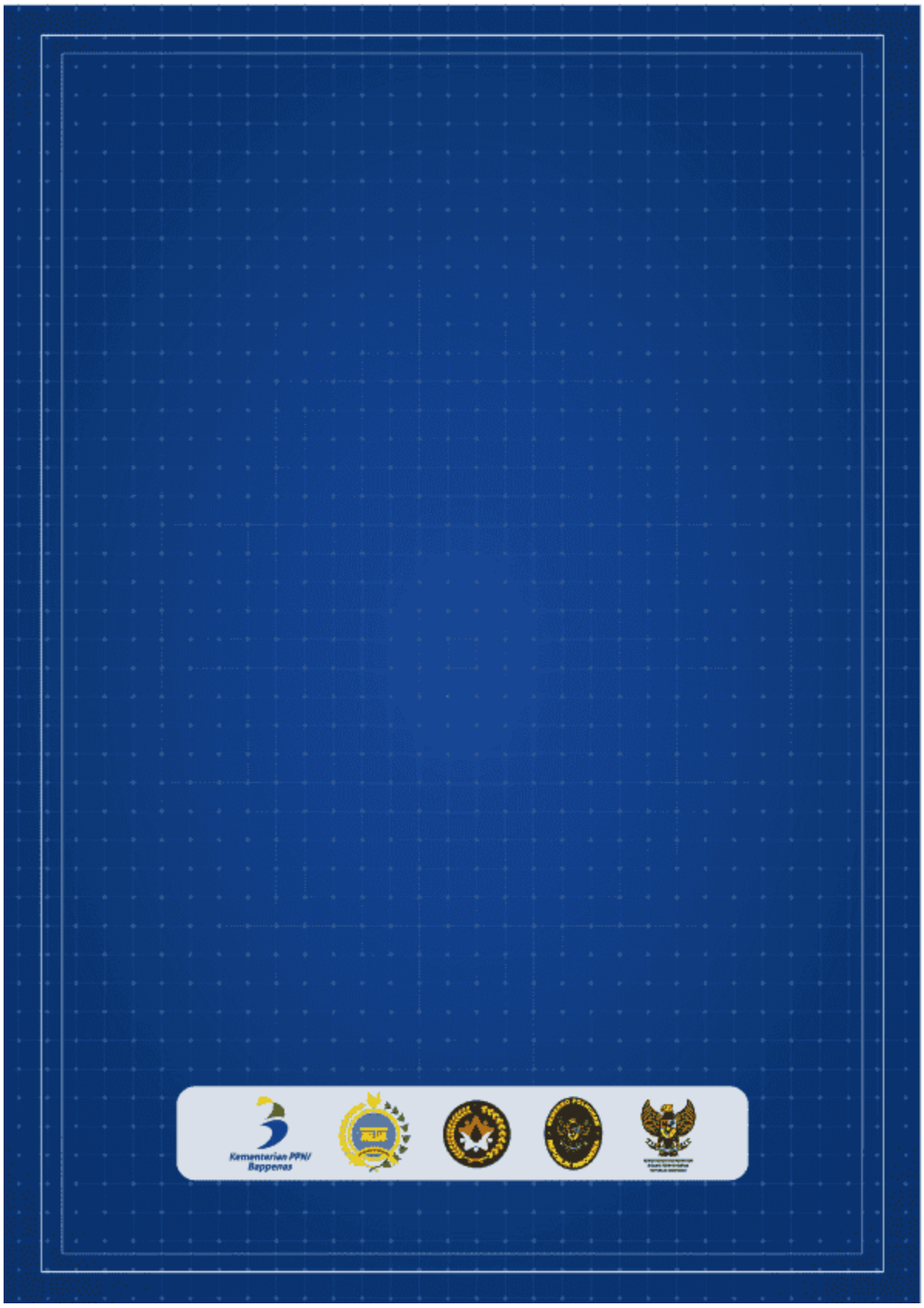
E.3 Menumbuhkan Budaya Kewirausahaan dalam ASEAN

Isi Cetak Biru	Rencana Aksi	Sasaran / Indikator	Periode Waktu	Penanggungjawab
I.Memperkuat lingkungan yang mendukung bagi kewirausahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, seperti pendampingan, pemberian pinjaman, modal ventura dan penggalangan dana, serta dukungan pemasaran;	Fasilitasi pemuda sebagai kader kewirausahaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	2022-2025	Kemenpora

ii. Memajukan dan mengembangkan kewirausahaan sosial yang inklusif dan kreatif bagi para pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan dan terpinggirkan; dan iii. Mendorong inovasi teknis dan kelembagaan dalam penyediaan layanan sosial dan layanan kesehatan.				

“Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada tahun 2025 harus merupakan suatu masyarakat yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi rakyat, dan suatu masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, kokoh, dan dinamis”

Visi Masyarakat ASEAN



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI